

341.758

ART

9

497

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN
INTELEKTUAL DALAM PERSETUJUAN TRIPs DARI GATT
(STUDI KASUS TERHADAP KEJAHATAN MEREK)**

Oleh :
IBNU ARTADI
B. 102 94 0058

Dibawah Bimbingan :
Dr. IS SUSANTO,SH.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1997**

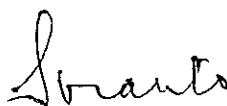
UNIVERSITAS DIPONEGORO

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN
INTELEKTUAL DALAM PERSETUJUAN TRIPs DARI GATT
(STUDI KASUS TERHADAP KEJAHATAN MEREK)**

TESIS

Telah Disetujui Untuk Diajukan Di Depan Penguji
Semarang, Hari Tanggal April 1997

Pembimbing,



(Dr. I.S. SUSANTO, SH.)
NIP. 130324139

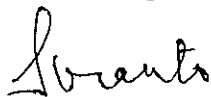
UNIVERSITAS DIPONEGORO**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN
INTELEKTUAL DALAM PERSETUJUAN TRIPs DARI GATT
(STUDI KASUS TERHADAP KEJAHATAN MEREK)**

Disusun oleh :
IBNU ARTADI
NIM.B.102940058

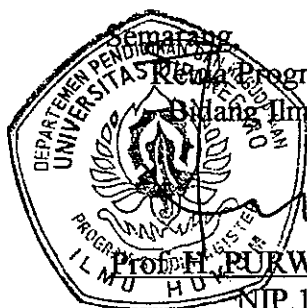
Telah Disetujui Untuk Dipertahankan Di Depan Penguji
Pada Hari Tanggal 1997

Tesis Tersebut Telah Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Derajat Magister (S2) Pada
Program Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro

Pembimbing,



Dr. IS. SUSANTO, SH.
NIP. 130 324 139



April 1997

Rektor Universitas Diponegoro
Program Pascasarjana
Bidang Ilmu Hukum Undip


Prof. H. PURWAHID PATRIK, SH.
NIP. 130 307 058

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat **Allahu Subhanahu Wata Ala** atas rahmat dan karunia Nya, maka segala kendala yang ada dapat diatasi, yang pada akhirnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Secara lahiriyah dengan rendah hati dan hormat ungkapan rasa terima kasih yang dalam dan penghargaan yang tinggi disampaikan kepada Dr. I.S. Susanto, SH. selaku pembimbing, dimana beliau dengan sabar dan penuh kearifan telah mengarahkan, menunjukkan, membimbing, berdiskusi, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis ini pada dasarnya mempersoalkan tentang perlindungan hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dengan studi kasus terhadap kejahatan merek. Topik ini sengaja dipilih penulis, mengingat tingginya pembajakan Merek di tanah air dewasa ini dan terikatnya Indonesia pada persetujuan TRIPs yang akan mulai berlaku pada tahun 2000. Kondisi ini mendorong penulis untuk menjajaki sejauhmana perlindungan hukum terhadap Merek telah diberikan dan sejauhmana upaya pemerintah dalam mengantisipasi berlakunya persetujuan TRIPs itu nantinya.

Atas dasar dan alasan tersebut, penulis kemudian menyusun tesis ini, karena tiadanya perlindungan hukum terhadap Hak Atas kekayaan

Intelektual, khususnya di bidang Merek, tidak saja membuat sepiyal lalu lintas ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan distorsi ekonomi, secara khusus dapat mematikan kreatifitas pencipta. Untuk itulah kemudian penulis menawarkan solusi agar perlindungan hukum itu dapat terwujud dengan menggunakan kebijakan kriminal baik melalui upaya penal maupun non penal.

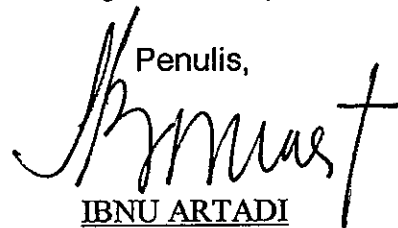
Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, yaitu yang terhormat Prof. Purwahid Patrik,SH, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti program studi S2 Ilmu Hukum .

Demikian juga penulis ucapkan terima kasih kepada tim penguji komprehensif, sehingga mendorong dilakukannya penyempurnaan dan penelitian ini dapat dilanjutkan.

Sebagai kata penutup penulis ingin pula menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak atas bantuan baik moril maupun materiil. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebbaikannya.

Bandung, April 1997.

Penulis,



IBNU ARTADI
NIP.131571029

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Abstraksi.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Hasil Penelitian.....	15
E. Kerangka Pemikiran.....	16
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II. Tinjauan Pustaka.	
A. Perkembangan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Kebutuhan Pengaturannya Dalam Era Globalisasi.	
1. Perkembangan Hak Atas Kekayaan Intelektual...	29
2. Prinsip-prinsip Kebijakan Persetujuan TRIPs...	46

3. Prinsip - prinsip Penegakan Hukum Dalam Persetujuan TRIPs.....	59
4. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas kekayaan Intelektual Di Indonesia.....	70
B. Pendekatan Sistem Kebijakan Sebagai Suatu Metode Analisis.	
1. Antisipasi Perkembangan Kejahatan Ekonomi Dalam Era Globalisasi.....	81
2. Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Kejahatan Ekonomi di Era Globalisasi.....	101
BAB. III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.	
A. Perlindungan Hukum Dalam UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek	126
B. Keterkaitan UU No. 19 tahun 1992 terhadap UU No. 7 tahun 1994 yang berkaitan dengan TRIPs.....	151
C. Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan di Bidang Merk.....	186
BAB IV. PENUTUP.	
A. Kesimpulan.....	223
B. Saran-Saran.....	229
DAFTAR PUSTAKA.	

ABSTRAKSI

Latar Belakang penelitian ini dilandasi oleh adanya kenyataan begitu banyak terjadi pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang Merek di Indonesia. Kondisi ini cukup memprihatinkan, dimana Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Akhir Putaran Uruguay dengan UU No. 7 tahun 1994, yang salah satunya berisi tentang aspek-aspek perlindungan di bidang Hak Atas kekayaan Intelektual. Dalam kaitan ini sejauhmana Indonesia telah mengantisipasi berlakunya persetujuan tersebut pada tanggal 1 Januari tahun 2000.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh UU No. 19 tahun 1992 dan bagaimana keterkaitannya dengan UU No. 7 tahun 1994 serta untuk mengetahui aspek-aspek penegakan hukum terhadap kejahatan Merek.

Adapun Metodologi Penelitian yang digunakan meliputi : obyek penelitian dibatasi pada UU No. 19 tahun 1992 dan bagaimanakah keterkaitannya dengan UU No. 7 tahun 1994 yang berkaitan dengan TRIPs serta bagaimanakah penegakan hukum dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan Merek. Berkaitan dengan obyek yang hendak diteliti mencakup bidang normatif dan empiris. Adapun jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data ditempuh melalui studi dokumen, wawancara dan pengamatan. Wilayah penelitian di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Teknik penyajian data dilakukan dengan teknik kualitatif dan analisa datanya dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik secara taksonomi.

Hasil Penelitian sebagai berikut :

- a. UU No. 19 tahun 1992 telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum baik kepada pemilik maupun kepada konsumen, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya.
- b. Konsekwensi diratifikasinya persetujuan akhir putaran Uruguay yang berkaitan dengan TRIPs oleh UU No. 7 tahun 1994, berupa akibat hukum eksternal yang berarti bersedia menerima segala kewajiban yang dibebankan oleh persetujuan internasional, sedangkan akibat hukum internal adalah kewajiban dalam arti tidak terbatas pada usaha untuk merubah hukum nasionalnya agar sesuai dengan ketentuan TRIPs, namun juga harus disertai jaminan bahwa hukum nasional itu nantinya dapat berlaku efektif.
- c. Tidak dapat dipungkiri pembajakan produk pakaian jadi Merek terkenal, seperti Hammer, Guess, Espril, D&G, Country Fiesta, Osella, Levis, begitu bebasnya dipasarkan di Blok M, Tanah Abang Jakarta dan Pasar Baru Bandung, tanpa adanya tindakan dari aparat penegak hukum.

Diakui ada beberapa perusahaan yang telah ditindak, tetapi masih terbatas pada perusahaan kelas teri (pengusaha konveksi) yang tidak mempunyai status ekonomi politik yang kuat.

Kesimpulan :

1. Pemerintah Cq Dirjen HCPM belum memiliki pengalaman dan keseriusan dalam melakukan pembinaan Merek, hal ini masih terbukti setelah 5 tahun berlakunya UU No. 19 tahun 1992 masih melakukan pembenahan menyangkut syarat-syarat pendaftaran Merek, masih belum dibentuknya komisi banding, belum adanya PP menyangkut persyaratan dan tata cara permintaan pencatatan lisensi.
2. Secara jujur harus diakui masih berat upaya pemerintah dalam menghadapi berlakunya persetujuan TRIPs di era perdagangan bebas, khususnya menyangkut aspek struktural maupun budaya hukum yang masih cukup memprihatinkan.
3. Kejahatan Merek sebagai salah satu jenis kejahatan di bidang ekonomi, memerlukan strategi khusus dalam penegakannya, berbeda dengan penegakan hukum terhadap kejahatan lainnya. Untuk itu diperlukan pendekatan melalui politik kriminal. Terkait disini disamping masalah hukum (pidana, perdata, administrasi), juga masalah etik dan moral.

Saran-Saran:

1. Perlu adanya usaha untuk menyebarluaskan pemahaman tentang arti, fungsi dan peranan HAKI, khususnya di bidang Merek baik kepada masyarakat untuk mengetahui tentang hak dan kewajibannya selaku konsumen produk, kepada para petugas instansi terkait, juga kepada aparat penegak hukum untuk lebih meningkatkan profesionalismenya.
2. Perlunya pembenahan administrasi yang jauh dari birokrasi yang berbelit disamping adanya tenaga yang handal.
3. Perlu adanya kemauan politik dari pemerintah dan segenap pihak yang terkait untuk secara lebih sungguh-sungguh memberantas kejahatan Merek. Untuk itu peningkatan koordinasi antar lembaga (Dirjen HCPM, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Imigrasi dan aparat penegak hukum) merupakan solusi terbaik.

BAB I

PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang Masalah :

Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional pengembangan sumber daya manusia, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hal-hal yang perlu memperoleh perhatian yang semakin besar dalam menghadapi era serta arus globalisasi yang semakin deras dewasa ini dalam memasuki pembangunan jangka panjang tahap II atau PJPT II.

Hal ini tercermin dalam GBHN tahun 1993 dimana dicantumkan sebagai asas ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu dari sembilan asas pembangunan nasional, yaitu "bahwa agar pembangunan nasional dapat memberikan kesejahteraan rakyat lahir dan batin yang setinggi-tingginya, penyelenggaraannya perlu menerapkan nilai-nilai ilmu pengetahuan, teknologi, serta mendorong pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara seksama dan bertanggungjawab dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa".

Dengan ditetapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai salah satu dari sembilan asas pembangunan, maka salah satu masalah yang sangat penting untuk diperhatikan adalah ***masalah perlindungan hak***

Atas kekayaan intelektual,¹ oleh karena sangat terkait dengan kegiatan perdagangan yang menunjang pengembangan industri.

Untuk itu dalam kaitan ini, pengaturan kembali hak-hak yang timbul dari karya-karya intelektual menjadi sangat penting, bukan saja dari segi perlindungan hukum, tetapi justru karena peranannya yang penting dalam kehidupan ekonomi “.²

Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak milik dari karya-karya intelektual yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra. Karya ini baru ada bila kemampuan manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis. Pemilikannya bukan terhadap barangnya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa idea. Menurut W.R Cornish, “ Milik intelektual melindungi pemakaian idea, dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi “.³

¹ Penggunaan istilah ini secara resmi telah digunakan dalam UU No. 10 tahun 1995 tentang **KEPABEANAN**.

Lihat pula Bambang Kesowo, **Pengantar Umum Mengenai HAKI Di Indonesia**, “Ceramah Ilmiah”, Kerjasama UNDIP- Sekretariat Negara Republik Indonesia, 15-12-1994, mengatakan: penggunaan istilah Hak Milik Intelektual dirasa kurang tepat. Secara substansif sebutan tersebut belum menggambarkan unsur-unsur pokok yang membentuk pengertian IPR (*Intellectual Property Rights*). Agaknya penggunaan sebutan tersebut berlangsung dari alih bahasa apa adanya. Selain itu dari kaidah tata bahasa Indonesia, yang secara umum bertumpu pada prinsip diterangkan-menerangkan, maka padanan yang digunakan sekarang ini sebenarnya terasa kurang tepat asas. Oleh karena itu akan lebih tepat bila **Hak Atas Kekayaan Intelektual** dijadikan padanan kata dalam bahasa Indonesia untuk IPR, hal. 4.

² Penjelasan (umum) UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek.

³ W.R. Cornish, **Intellectual Property**, Edisi ke 2, London : Swett & Maxwell, 1989 : 5

Esensi yang terpenting dari setiap bagian dari hak atas kekayaan intelektual ini adalah suatu ciptaan tertentu (*creation*). Ciptaan tersebut mungkin dalam bidang kesenian (*art*), tetapi mungkin juga dalam bidang industri atau pengetahuan. Mungkin pula suatu kombinasi dari ketiga bidang tersebut, yang masing-masing mempunyai istilah tertentu.

Pada hakekatnya hak atas kekayaan intelektual dibagi dalam dua kelompok besar.⁴ **Pertama** adalah hak cipta (*copyright*). Kemudian **kedua**, adalah hak milik perindustrian (*industrial property*). Kelompok hak milik perindustrian ini masih dibagi lagi dalam tiga bagian, masing-masing paten (*patent*), merek (*trade mark*), disain produk industri (*industrial design*).

Perhatian terhadap hak atas kekayaan intelektual merupakan isu menarik sekaligus penting bila dikaitkan dengan era **globalisasi**.⁵ dan

⁴ Sesuai dengan topik penelitian ini, penulis memfokuskan pembahasan pada masalah merek sebagai bagian dari hak milik perindustrian. Hal ini didasarkan atas pertimbangan Merek merupakan salah satu sasaran pembajakan dan pemalsuan produk-produk yang terkenal (Sudargo Gautama, **Hak Milik Intelektual Indonesia Dan Perjanjian Internasional : TRIPs, GATT, Putaran Uruguay**, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1994, hal. 11), berkaitan dengan lalu lintas ekonomi dunia yang semakin menggelobal. Hal ini disebabkan merek merupakan salah satu pertimbangan konsumen. Jaminan nilai atau kualitas suatu produk melekat terutama pada merk yang bonafid. Bagi sementara orang merek bukan sekedar ukuran kualitas, tetapi seringkali menentukan gaya hidup. Merek bisa membuat orang percaya diri atau bahkan menentukan klas sosialnya. Oleh karena itu juga mempunyai nilai ekonomis tinggi.

⁵ Globalisasi mengandung arti tidak ada satupun negara yang terasing. Semua negara dimanapun letaknya di belahan dunia ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, sehingga masyarakat dunia saat ini meliputi seluruh jagad raya. M Yahya Harahap dalam " **ulasan hukum** " yang dimuat dalam majalah " **Varia Peradilan** ", tahun VIII No. 92 Mei 1993 mengutip pendapat Hoshua Meyrowitz yang mengatakan : " *Many of the thing that define sovereignty are fading* ", maksudnya segala sesuatu pengertian dan pernyataan yang menyangkut paham kedaulatan telah menjadi layu. Tidak ada lagi pengertian kedaulatan yang absolut. Dan dalam suasana kehidupan masyarakat bangsa-bangsa sekarang arus nilai-nilai globalisasi telah berada dalam suatu kehidupan yang " saling terkait " atau " *interlinked* ". **Globalisasi ekonomi** adalah salah satu dari beberapa pancaran gelombang globalisasi yang menjadikan interdependensi ekonomi

industrialisasi. Sebab pesatnya perkembangan bisnis dalam era saat ini membawa nuansa baru dalam hubungan ekonomi antar bangsa, apalagi sudah menyangkut modal atau kekayaan yang selalu bergerak mengikuti perkembangan dan tidak mengenal batas negara lagi.

Pengaruh globalisasi, John Naisbitt⁶ menggambarkan sebagai arus yang menimbulkan perubahan yang tidak terduga kecepatannya terhadap seluruh dunia, yang melahirkan "**a single economy**". Oleh karena itu beliau lebih lanjut mengatakan, arus globalisasi telah menempatkan semua belahan bumi, merupakan bagian dari suatu kesatuan ekonomi (*They all are part of one economy*) yakni "**the new global economy**".

Itulah globalisasi. Tiada satu kelompok masyarakat dunia di mana pun yang sanggup menepis terpaan proses globalisasi. Tak ada satu negara pun yang mampu mengisolasi diri dengan membendung terjangan gelombang globalisasi. Semua bangsa, semua masyarakat, sejak dini harus bersiap-siap menghadapi era perubahan itu. Sifat ekonomi Indonesia yang terbuka⁷, semakin membawa kita terseret ke dalam kancah persaingan global. Kita tidak bisa surut, tak ada pilihan lain kecuali menghadapinya.

dunia semakin kuat. Dalam pada itu merek sebagai salah satu institusi dalam hubungan ekonomi, khususnya dalam sistem pemasaran barang dan jasa tak terelakkan lagi turut dilanda oleh santemnya arus globalisasi dunia.

⁶ **Megatrends 2000**, Pan books, In Association with Sidgwick & Jacson, London, h. 9.

⁷ Soemitro Djojohadikusumo, **Indonesia Dalam Perkembangan Dunia**, Kini Dan Masa Datang, LP3ES, 1989: 8-9.

Sehubungan dengan pengaruh derasny arus globalisasi yang tidak terbandung, yang berdampak membuat keterlibatan manusia sejagad, menyebabkan tidak kurang 1,5 miliar manusia beralih dari lingkungan yang terkungkung (*autarki*) ke pergaulan pasar mondial.⁸ Gerakan ini menyebabkan persaingan di pasar global semakin ketat. Prosesnya semakin terakselerasi dengan pesatnya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana suatu barang dan jasa yang hari ini di produksi di suatu negara, disaat berikutnya telah dapat di hadirkan di negara lain, di samping itu pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi juga mampu menciptakan produk barang yang beragam dan berkualitas relatif sama sehingga gerakan ini menyebabkan persaingan di pasar global kian ketat. Batas-batas negara kian tipis, serta peran *nation state* sebagai pengendali kehidupan ekonomi memudar, didesak oleh kepentingan-kepentingan swasta atau dunia usaha terutama perusahaan transnasional.

Sejalan dengan hal tersebut I.S. Susanto mengatakan : ⁹ dengan menghilangnya blok barat dan timur, serta semakin globalnya kehidupan ekonomi dunia, telah membawa konsekuensi baru di bidang kehidupan ekonomi, antara lain yang mengarah pada makin berkembangnya mekanisme pasar bebas dalam dunia internasional. Mekanisme pasar

⁸ Faisal Basri , *Perekonomian Indonesia Menjelang abad XX1*, Erlangga, 1995, h. 216.

⁹ . I.S Susanto, *Antisipasi perkembangan kejahatan di bidang ekonomi*, Bahan Penataran "Tindak Pidana dibidang Ekonomi", FH Unpar, 1994 : 2

bebas ini mengandung implikasi diberinya kebebasan yang lebih luas kepada para pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan dan pengembangan bisnisnya. Akibatnya para pelaku bisnis memiliki posisi *“memimpin”* pembangunan ekonomi masyarakat/bangsa, berbeda dengan masa-masa sebelumnya, dimana posisi ini dipegang oleh pemerintah. Oleh karenanya fungsi pemerintah dalam ekonomi pasar bebas ini lebih bersifat menciptakan kondisi-kondisi bagi berkembangnya mekanisme pasar.

Demikianlah memang keberadaan dunia, kita hidup dalam alam realitas tersebut, dimana era pasca perang dingin¹⁰ telah mengantarkan dunia ke dalam lingkungan untuk menciptakan perdagangan dunia yang lebih bebas.¹¹ Proses marketisasi terjadi di seluruh penjuru dunia, tanpa kecuali. Di satu pihak perubahan ini merupakan peluang baru sejalan dengan munculnya tambahan miliaran konsumen yang memasuki pasar, namun sekaligus merupakan tantangan mengingat di dalam interaksi tersebut terselip juga persoalan hukum yang mungkin ditimbulkan. Persoalan hukum itu bisa macam-macam, seperti : peniruan merek, pemalsuan merek, pencurian dan peniruan teknologi dan sebagainya.

¹⁰ Kehancuran komunisme menuntun negara-negara penganutnya untuk mau tidak mau cenderung menatap pada ekstrem yang lain : dari perencanaan terpusat ke mekanisme pasar. Yang terjadi, oleh karena itu, lebih sebagai *konvergensi sepihak*.

¹¹ Komitmen masyarakat internasional untuk menciptakan perdagangan dunia yang lebih bebas ditandai dengan lahirnya ketentuan-ketentuan perdagangan dunia yang baru hasil perundingan putaran Uruguay. WTO (*World Trade Organization*).

Untuk itulah dengan adanya pengaruh globalisasi ekonomi, dan keterkaitan dengan tata ekonomi internasional baru (*a new international economic order*) ini disamping telah membawa pengaruh terhadap makin kompleksnya persoalan-persoalan hukum,¹² juga diperlukan usaha-usaha pembaharuan untuk mengoptimalkan usaha perlindungan.

Keadaan ini mendorong dikeluarkannya dokumen akhir putaran Uruguay berisi lebih dari 28 kesepakatan-kesepakatan di bidang perdagangan global yang ditandatangani oleh 117 negara, termasuk Indonesia. Kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dalam tingkat menteri para anggota GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) tersebut salah satunya adalah TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), yaitu aspek-aspek perdagangan yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual.

Diangkatnya masalah TRIPs sebagai isu dalam putaran Uruguay berkaitan dengan lemahnya perlindungan hak atas kekayaan intelektual di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Mengingat hal demikian maka pemerintah Indonesia sebagai salah satu penandatangan persetujuan ini telah mengambil langkah-langkah

¹² Cakupan hak milik intelektual, sebetulnya tidak hanya terbatas dan berkaitan dengan hukum dan ekonomi saja, melainkan lebih luas lagi (Ismail Saleh, **Hukum Dan Ekonomi**, Jakarta, PT Gramedia Pustaka, 1990 hal. 44). Permasalahan hak milik intelektual semakin terasa lebih komplek lagi, dimana bidang ekonomi dan politik sudah menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam membahas permasalahan hak milik intelektual (Muhammad Djumhana Dan Djubaedilah, **Hak Milik Intelektual**, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1993 hal. 8).

penting untuk meningkatkan perlindungan di bidang hak atas kekayaan intelektual. Dalam hubungan ini telah diundangkan peraturan perundang-undangan dalam bidang hak cipta, Paten dan Merek. Bukan itu saja, sebab dalam tahun 1988 berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 32 tahun 1988 telah dibentuk suatu Direktorat Jendral baru di lingkungan Departemen Kehakiman, yaitu Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek.

Ti adanya perlindungan hukum pada hak atas kekayaan intelektual tidak saja membuat sepiunya lalu lintas ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan distorsi ekonomi. Oleh karena itu persoalan yang timbul adalah apakah UU No. 19 tahun 1992 telah cukup layak untuk memberikan perlindungan hukum serta sampai sejauhmana keterkaitan Undang-undang tersebut dengan UU No. 7 tahun 1994 yang berkaitan dengan TRIPs, ¹³.

¹³ Dengan telah diratifikasinya persetujuan GATT (*The General Agreement on Tariffs and Trade*) Putaran Uruguay yang mengatur masalah hak milik intelektual secara global di Maroko, maka di negara kita akan berlaku persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* = Aspek-aspek perdagangan yang bertalian dengan hak atas kekayaan intelektual), karena Indonesia termasuk salah satu dari 117 negara yang ikut meratifikasi persetujuan putaran Uruguay tersebut. Kemudian disahkan menjadi **Undang-undang No, 7 tahun 1994** tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan dunia.

Persiapan pelaksanaan persetujuan TRIPs, sudah harus dimulai mengingat masa transisi lima tahun buat negara berkembang sudah dimulai **1 Januari 1995**. Dengan begitu persetujuan TRIPs bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia secara efektif pada 1 Januari tahun 2000.

Penulis memilih TRIPs sebagai pokok kajian dan bukan *The Paris Convention For The Protection of Industrial Property* (telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 24 tahun 1979) dengan pertimbangan : TRIPs relatif baru; konvensi Paris telah diresepsi oleh UU NO. 19 tahun 1992 tentang merek.

Dari 22 perjanjian multilateral di bidang hak milik intelektual, Indonesia ikut dalam 2 konvensi, yaitu **Konvensi Paris dan TRIPs** dari GATT.

Secara umum telah di sepakati secara luas bahwa perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual mutlak diperlukan. Perlindungan hukum dalam bidang hak cipta akan mendorong para pencipta menghasilkan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perlindungan hukum dalam bidang Paten akan mempergiat kegiatan di bidang alih tehnologi. Demikian juga perlindungan Merek akan menciptakan iklim usaha yang sehat untuk pengembangan bidang perdagangan.

Kenyataan menunjukkan begitu banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran di bidang hak atas kekayaan intelektual. Hal ini terlihat dari kasus pembajakan atau pemalsuan merek terkenal yang di bajak dengan seenaknya saja. Para pembajak, terutama membajak merek asing dengan leluasa memasarkan merek palsunya itu tanpa lagi merasa takut. Misalnya untuk merek terkenal pierre cardin sudah ada 16 perusahaan Indonesia yang memakainya tanpa izin resmi dari yang bersangkutan.¹⁴ Demikian juga pemalsuan merek dagang yang dilakukan para produsen liar¹⁵, negara dan produsen garmen yang tergabung dalam APGPI (Asosiasi Pemasok Garmen Pertokoan Indonesia), dirugikan sekitar Rp.300 miliar setahun, kerugian tersebut belum dihitung dengan adanya kesan buruk, hilangnya

¹⁴ . Ismail Saleh, op. cit. hal 48.

¹⁵ . Harian Kompas, tanggal 13 Februari 1995.

kesempatan produsen melakukan ekspansi, hilangnya kepercayaan investor asing dan tekanan luar negeri menjelang era perdagangan bebas.

Menjelaskan tentang dampak buruk pemalsuan merek menjelang era perdagangan bebas, Safioen mengatakan, beberapa anggotanya yang memegang lisensi merek asing, telah mendapat tekanan keras dari para prinsipalnya. Meskipun belum sampai pada taraf mengancam mencabut lisensinya, namun tekanan-tekanan prinsipal semakin keras.

Yang dikhawatirkan, lanjut Safioen, para prinsipal yang mempunyai jaringan internasional, menggunakan tekanan-tekanan pemerintahnya untuk menekan pemerintah Indonesia supaya menanggulangi pemalsuan merek. Jika sudah sampai taraf demikian, ancaman perang dagang seperti yang kini terjadi antara Amerikat Serikat dan Cina akan terjadi.

Menurut Ketua APGPI H. Safioen dalam kesimpulannya mengatakan¹⁶, pemalsuan merek benar-benar sudah sampai pada taraf mengkhawatirkan, karena tidak hanya dilakukan para produsen skala rumah tangga, tetapi juga oleh produsen-produsen bermodal kuat yang mempunyai jaringan kuat.

" kami benar-benar kesulitan menghadapi kasus pemalsuan merek ini. Padahal Undang-undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek, yang

¹⁶. Kompas, 10 Februari 1995.

mengancam denda Rp. 100 Juta plus kurungan 7 tahun bagi pelanggarnya sudah jelas. Tetapi pemalsuan terus berlangsung", tandas H. Safioen.

Dijelaskan, akibat pemalsuan merek, negara kehilangan Rp. 100 miliar setahun dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan Ppn. Sementara seratus anggota APGPI yang omzetnya rata-rata turun Rp. 2 Miliar setahun setelah pemalsuan, dirugikan Rp. 200 miliar setahun.

Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah bertekad meningkatkan razia terhadap pelanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual, serta akan memperberat hukuman bagi pelanggar. Tekad pemerintah tersebut tercetus dalam pertemuan antara Mensesneg Moerdiono selaku Ketua Tim Keppres 34 ¹⁷ dengan Jaksa Agung Singgih, Menteri Kehakiman Oetoyo Oesman, Kapolri Jenderal (POL) Banurusman dan Wasekab (Wakil Sekretaris Kabinet) Bambang Kesowo di Jakarta.¹⁸

Dalam keterangan pers, Mensesneg menjelaskan, bahwa pertemuan berkala itu dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan berbagai undang-undang menyangkut HAKI, mengidentifikasi masalah yang timbul dan membahas beberapa rencana tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya.

¹⁷ **Tim Keppres 34** tahun 1986 adalah tim kerja yang bertugas menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan perundang-undangan mengenai hak cipta dan merek perusahaan dan merek perniagaan serta menyelesaikan penyusunan perundang-undangan mengenai hak cipta dan hak paten.

¹⁸ Kompas, tanggal 26 April 1995.

Tingginya tingkat pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia, Mensesneg Moerdiono mengakui, HAKI merupakan hal baru, sehingga penanganan masalah masih sulit dilaksanakan. Selain itu, perangkat peraturan belum memadai. Untuk itu, perlu memperkuat perundang -undangan, meningkatkan kualitas aparat serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Disamping itu perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap HAKI.¹⁹

Sejalan dengan hal tersebut Bambang Kesowo, mengatakan belum efektifnya sistem hak atas kekayaan intelektual tersebut dengan kurangnya pemahaman masyarakat menjadi bertambah semakin memprihatinkan, karena kondisi serupa juga berlangsung dikalangan aparat penegak hukum dan praktisi hukum.²⁰ Kondisi demikian perlu segera diperbaiki bukan sekedar terbatas pada peraturan perundang-undangan, melainkan juga diperlukan kesiapan masyarakat dan aparat penegak hukum.

Besarnya perhatian dari pemerintah maupun dari kalangan praktisi, menunjukkan bahwa pelanggaran hak atas kekayaan intelektual (merek dagang) yang selama ini terjadi tidak hanya merugikan pengusaha pemilik merek dagang atau pengusaha yang disaingi secara tidak jujur, tetapi juga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit di pihak konsumen. Sebab

¹⁹ Kompas, tanggal 27 April 1995.

²⁰ Bambang kesowo, Op. Cit, hal 84.

ribuan konsumen harus membeli barang tiruan, palsu, dan bermutu rendah. Belum lagi mutu dan komposisinya dapat membahayakan konsumen.

Dewasa ini konsumen dapat membeli barang kebutuhannya bagaikan membeli kucing dalam karung, karena tidak lagi mengetahui siapa pembuatnya dan dimana di buat, mengingat perkembangan komoditi dagang yang begitu cepat. Berbeda dengan tempo dulu ketika hanya ada beberapa jenis barang, sehingga konsumen dapat membeli barang langsung dari produsennya, sekarang mata rantai dari distribusi dari produsen ke konsumen sudah panjang.

Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya peranan dan kekuasaan korporasi sebagai pelaku bisnis, yaitu sebagai konsekuensi dari kenyataan bahwasannya korporasi merupakan "subyek " yang paling sesuai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat industri yang mampu menangani kegiatan yang serba cepat dan dapat menghasilkan produk dalam jumlah besar.

Secara singkat kita dapat mengatakan bahwa korporasi mempunyai pengaruh yang besar bagi kehidupan setiap orang, hampir seluruh kebutuhan kita dapat dilayani oleh korporasi, mulai dalam kandungan hingga ke liang kubur, orang sangat terpengaruh dengan korporasi.²¹

Namun demikian Korporasi sebagai " organisasi ", yang tujuan

²¹ , I.S. Susanto, 1993, **Kejahatan Korporasi**, dalam Penataran " Hukum Pidana Dan Kriminologi", Semarang UNDIP, hal. 4-5.

utamanya mencari keuntungan (sebanyak-banyaknya) menjadikannya korporasi bersifat kriminogen, sebab dia bekerja dalam ketidakpastian dalam mengejar tujuannya, khususnya dengan adanya keterbatasan dalam suasana yang "mendesak". Sebagai konsekuensinya, mereka mencari cara-cara alternatif, termasuk cara-cara untuk menghindari, menyimpangi dan melanggar hukum.²² termasuk di dalamnya pelanggaran di bidang hak atas kekayaan intelektual.

Kenyataan di atas merupakan realitas kejahatan yang perlu ditanggulangi secara serius dan rasional, karena dapat mengganggu kebijakan perencanaan kesejahteraan masyarakat yang ingin dicapai, yang justru menjadi tujuan pembangunan nasional.

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Apakahkah Undang-undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek telah cukup memadai memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik?
2. Bagaimanakah keterkaitan antara undang-undang NO.19 tahun 1992 terhadap UU No. 7 tahun 1994 yang berkaitan dengan TRIPs dan tindakan-tindakan apa yang perlu dilakukan ?

²² I.S. Susanto, *ibid.* hal 3.

3. Bagaimanakah praktik penegakan hukum berkaitan dengan kejahatan merek ?

C. Tujuan Penelitian.

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka secara keseluruhan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang No. 19 tahun 1992 tentang merek.
2. Untuk mengetahui keterkaitan antara Undang-undang NO. 19 tahun 1992 tentang merek dengan UU No. 7 tahun 1994 yang berkaitan dengan TRIPs.
3. Untuk mengetahui aspek-aspek penegakan hukum berkaitan dengan kejahatan merek .

D. Manfaat hasil Penelitian.

Manfaat penelitian ini antara lain :

a. Dari segi teoritis.

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembangunan hukum di Indonesia sejalan dengan tuntutan masyarakat internasional, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan merek, sehingga akan tercipta hukum yang bukan saja mampu mengatur dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, melainkan juga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik maupun konsumen.

Disamping itu dapat juga menambah informasi yang lebih konkrit bagi usaha penanggulangan kejahatan di bidang merek.

b. Dari segi Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan suatu ketentuan yang sejalan dengan tuntutan masyarakat internasional disamping dapat memberikan petunjuk tentang upaya dan masalah-masalah yang ditemui dalam penanggulangan kejahatan merek, yang selanjutnya dapat dicarikan pemecahan yang paling tepat.

E. Kerangka Pemikiran.

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini ²³; merupakan suatu peristiwa "penyelewengan" ²⁴, yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Keberadaannya memang bersama dengan adanya kehidupan bersama manusia.

²³ . lihat juga Barda Nawawi Arief, **Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara**, 1994, hal. 11-12. mengatakan :

Kejahatan sebagai masalah sosial tampaknya tidak hanya merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu (nasional), tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, hal ini telah merupakan fenomena internasional. Selanjutnya dikatakan sebagai masalah internasional, tidak hanya karena jumlahnya yang telah meningkat tetapi juga karena kualitasnya dipandang lebih serius dibandingkan masa-masa yang lalu.

²⁴ . Soerjono Soekanto, "Kejahatan Dan Sistem Peradilan Pidana", Prisma, Mei 1982 No. 5, LP3ES, hal. 11, merumuskan : Kejahatan merupakan suatu peristiwa penyelewengan terhadap norma - norma atau perilaku teratur yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.

Pernyataan tersebut sekaligus mengisyaratkan bahwa tidak ada suatu masyarakat dimanapun berada tanpa kejahatan dan kejahatan selalu terjadi di dalam masyarakat, sepanjang ada kehidupan manusia yang bermasyarakat dan dalam " konteks sosial tertentu " ²⁵ , sehingga penjelasan tentang (fenomena) kejahatan " tertentu " juga harus dipahami dalam konteks sosial tertentu, yakni masyarakat tempat berlangsungnya kejahatan ²⁶ .

Sesuai dengan arah pembangunan (ekonomi) kita yakni industrialisasi ²⁷ , dan adanya pengaruh globalisasi ekonomi dan keterkaitan dengan tata ekonomi internasional baru (*a new internasional economic order*), maka memahami kejahatan pada era tersebut dipandang penting untuk mencari alternatif penanggulangannya. Salah satu ciri masyarakat pada era tersebut adalah meningkatnya peranan korporasi sebagai pelaku ekonomi.

Salah satu sifat yang menonjol dari " wajah " kejahatan pada

²⁵ . Dalam **Konteks Sosial tertentu** dimaksudkan bahwa wajah kejahatan dipengaruhi oleh bentuk masyarakatnya, artinya masyarakat kapitalis akan memiliki wajah kejahatan yang berbeda dengan masyarakat komunis, masyarakat industri akan memiliki wajah kejahatan yang berbeda dengan masyarakat agraris. Dengan demikian pada era industrialisasi, wajah kejahatan yang kita miliki berbeda dengan kejahatan sebelumnya.

²⁶ . I.S. Susanto, **Kajian Kriminologis Terhadap Hak Milik Intelektual**, Makalah Seminar Nasional "Kejahatan Hak Milik Intelektual", 27 April 1993, hal 3.

²⁷ . Lihat **GBHN** 1993 tentang titik berat Pembangunan Jangka Panjang kedua : " Titik berat Pembangunan jangka panjang kedua diletakkan pada bidang ekonomi dengan sasaran utama terwujudnya struktur ekonomi yang seimbang di mana terdapat kemampuan dan kekuatan industri yang maju....."

masyarakat tersebut adalah membaurnya dunia kriminal dengan dunia sipil masyarakat atau menyelinap ke dalam kehidupan normal dan sah. Dengan demikian berbeda dari keadaannya dahulu, penjahat tidak merupakan kelompok sendiri yang terpisah secara tajam dari kehidupan sipil, melainkan antara keduanya terjalin semacam *interdependensi*.

Kejadian yang amat penting dalam perkembangan kriminalitas dewasa ini setidaknya-tidaknya yang sudah berlangsung di negara-negara pasca industri, adalah penetrasi dan penyamaran (*cover up*) yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kejahatan terhadap dunia sipil. Kedua hal tersebut berkaitan satu sama lain. Penyamaran dilakukan sedemikian rupa sehingga masyarakat tidak menduga bahwa suatu organisasi atau korporasi yang beroperasi dalam masyarakat secara sah dan baik-baik itu adalah topeng yang menyembunyikan wajah kejahatan. Dengan penyamaran yang demikian itu kelompok kejahatan bisa masuk menyerbu ke dalam organisasi sipil, yaitu kedalam kehidupan ekonomi, sosial dan politik dari masyarakat hukum di suatu negara.²⁸

Permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan merek antara lain juga tidak terlepas dari kondisi dan modus operandi yang dilakukan baik pada era industrialisasi maupun dalam era pasca industri. Oleh

²⁸. Satjipto Rahardjo, *Penjahat-penjahat abad 20*, Suara Pembaharuan, 29-6-1991.

karena itu menghadapi gelagat kriminalitas yang demikian diperlukan kesiapan aparat penegak hukum, yang dilengkapi oeh sarana dan prasarana yang memadai. Dengan kekuatan ini masyarakat kita mampu menjawab berbagai tantangan yang kita hadapi.

Tetapi pada sisi lain, dalam banyak hal untuk memberantas kejahatan merek tidaklah mudah, karena disamping peran korporasi, berkaitan dengan pertumbuhan kejahatan merek, khususnya di Indonesia tidak terlepas dari kondisi psikososial masyarakat, dimana pada masyarakat kita ada kecenderungan berorientasi pada pemakaian produk-produk terkenal dari luar negeri (*label minded*). Sering kejadian itu tidak lagi memperhatikan faktor kemampuan ekonomis yang bersangkutan. Akibatnya sering terjadi seseorang yang secara ekonomis tidak mampu untuk membeli atau memakai merek tertentu, memaksakan untuk membeli dan memakainya.

Faktor gengsi memegang peranan penting dalam pola perilaku seperti ini. Dan keadaan ini dimanfaatkan oleh para pengusaha. Mereka memuaskan hasrat masyarakat melalui merek tertentu " asli tapi palsu " atau merek-merek yang mirip. Sudah pasti harga produk yang demikian sangat miring, dan kerap kali memang sengaja disesuaikan dengan kantong konsumen yang mempunyai kecenderungan demikian, kendati

ada juga yang justru menjual lebih mahal agar kelihatan lebih bergengsi.

Akhirnya terjadilah titik temu antara penawaran dan permintaan. Konsumen dipuaskan dengan merek asli tapi palsu disatu sisi produsen palsu juga mendapat keuntungan yang tidak kecil. Disisi lain pemegang merek aslinya harus gigit jari.

Bertolak dari realitas di atas, walaupun kejahatan tidak mungkin dihapuskan, bukanlah berarti manusia tidak harus berusaha mencegahnya sedapat mungkin atau menanggulangnya, apabila gejala itu telah terjadi. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan antara lain dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 19 tahun 1992 dengan harapan dapat memberikan perlindungan hukum disamping sambil terus mencari cara yang paling efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah menggunakan hukum pidana. Namun demikian usaha ini masih sering dipersoalkan dalam menghadapi kejahatan.²⁹ Penggunaan upaya

²⁹.Barda Nawawi Arief, **Batas-batas kemampuan hukum pidana Dalam Penanggulangan kejahatan**, Makalah Seminar Nasional "Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan", Semarang, 2 September 1996, mengatakan dilihat dari hakekat kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan.

Faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya. Secara fungsional, bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih banyak bervariasi, baik berupa perundang-undangan organiknya, Instansi dan aparat pelaksanaanya, sarana /prasarana maupun operasionalisasi penegakan

hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakekatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.³⁰

Dengan demikian cara yang paling efektif untuk mengatasi kejahatan ini adalah dengan menggunakan sarana penal maupun non penal. Hal ini didasari atas pertimbangan, dalam mempergunakan sanksi pidana atau penal haruslah disadari bahwa tidak setiap perilaku jahat (*criminal behavior*) dapat ditangkal dengan ancaman sanksi atau menghukum yang bersangkutan, karena ada motivasi yang mendorong perilaku kriminal, yaitu *ekspresif* dan *instrumental*.³¹ yang harus dipertimbangkan. Ini berarti “ penal “ bukanlah senjata satu-satunya, yang berarti upaya non penal merupakan pula tindakan dan kebijakan yang bisa sangat efektif untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan tertentu, misalnya dalam kejahatan bisnis (*Business Crime*) yang tidak jarang berlindung di bawah legalitas dan legalitas semua aparat

hukum pidana di lapangan, terutama dalam menghadapi kejahatan-kejahatan canggih dan bersifat transnasional.hal. 6-8.

³⁰ Sudarto, *hukum dan hukum pidana*, Alumni, Bandung, 1977, Hal. 161.

³¹ Soedjono Dirjosisworo, *Kejahatan Bisnis (Orientasi dan Konsepsi)*, Mandar Maju, 1994, hal. 10.

birokrasi. Bagaimanapun juga setiap kejahatan memerlukan kesiapan usaha penanggulangannya.

F. Metode Penelitian.

1. Obyek Penelitian.

Yang menjadi obyek penelitian ini dibatasi pada penelaahan UU No. 19 tahun 1992 tentang merek dan bagaimanakah keterkaitan Undang-undang tersebut terhadap UU No. 7 tahun 1994 yang berkaitan dengan TRIPs dan tindakan-tindakan apakah yang perlu dilakukan serta bagaimanakah penegakan hukum dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan merek, mengingat sebaik apapun suatu ketentuan undang-undang, tidak menutup peluang terjadinya kejahatan.

2. Pendekatan Masalah.

Berkaitan dengan obyek yang hendak diteliti, mencakup bidang normatif dan bidang empiris. **Bidang normatif** meliputi: ketentuan perundang-undangan di bidang merek (UU No.19 tahun 1992) dan UU No 7 tahun 1974 tentang TRIPs, **Bidang empiris** meliputi mekanisme perkembangan proses penegakan hukum dalam upaya perlindungan dan penanggulangan kejahatan merek. Kerangka teoritis yang dipergunakan berkaitan dengan penanggulangan kejahatan, dilakukan dengan **kebijakan kriminal**, melalui **jalur penal maupun non penal**.³²

³². Barda Nawawi Arief, **Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)**, tanpa penerbit dan

Adapun metode penelitian yang dipergunakan adalah mengutamakan metode penelitian **kualitatif**, yang dalam operasionalnya ditempuh dengan pendekatan **yuridis-normatif** dan pendekatan **yuridis empiris**.

33

3. Jenis Dan Sumber Data.

Jenis data dalam penelitian ini meliputi **data primer** dan **data sekunder**.

Untuk data sekunder, **sumber primer** yang digunakan terutama berpusat pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan

tahun penerbitan, mengatakan bahwa hakekat kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatis. Di samping itu kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya. Bertolak dari hal di atas, maka kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan), seyogianya ditempuh dengan pendekatan/ kebijakan integral, baik dengan menggunakan sarana " penal " maupun " non penal ".

Sejalan dengan itu G.P. Hoefnagels dalam bukunya "The Other Side of Criminologi ", mengatakan bahwa criminal policy dapat ditempuh dengan : 1. *Influencing view of society on crime and punishment*, umpunya lewat media massa (pers), 2. *Criminal Law application*, misalnya penal, 3. *Prevention without punishment*.

- ³³. Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, **Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri**, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal. 34.

Dalam studi sosial hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial lainnya.

Selanjutnya dikatakan hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat, di satu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab (*independent variabel*) yang menimbulkan akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Disamping itu hukum dapat dipelajari sebagai variabel akibat (*dependent variabel*) yang timbul sebagai hasil akhir (*resultante*) dari berbagai kekuatan dalam proses sosial.

perjanjian-perjanjian internasional yang mengikat, yang dalam hal ini, yaitu UU No. 19 tahun 1992 dan UU No. 7 tahun 1974.

Data sekunder dari **sumber sekunder** yang dipergunakan adalah berupa dokumen atau rancangan revisi UU No. 19 tahun 1992, hasil-hasil penelitian dan hasil-hasil karya ilmiah lainnya.

Juga dipergunakan data sekunder dari **sumber tersier**, seperti data statistik, baik di tingkat kepolisian maupun di tingkat pengadilan.

Adapun **data primer** yang dipergunakan diperoleh dari penelitian empiris di Departemen Kehakiman Cq Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek, Polda Metro Jaya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengusaha pemilik merek.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Bertolak dari jenis dan sumber data di atas, maka teknik pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi dokumen**, yakni penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian,³⁴ baik dalam bentuk data sekunder dari sumber primer, sumber data sekunder maupun dari sumber tersier.
- b. Wawancara**, hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada para pejabat instansi yang terkait

³⁴. Lihat Socrjono Sockanto,. Op.Cit.hal.201.

dengan permasalahan merek maupun dengan para pejabat yang terkait dalam kebijakan penanggulangan kejahatan, khususnya di bidang merek. Kegiatan wawancara tersebut dilakukan berdasarkan tipe wawancara terarah (*directive interview*) dan wawancara yang diulang-ulang (*repeated interview*).³⁵

C. Pengamatan, dilakukan untuk menunjukkan gambaran apa adanya secara netral dan dilakukan secara sistematis³⁶ dengan mengidentifikasikan semua peristiwa penting yang mempengaruhi proses perlindungan dan penegakan hukum di bidang merek.

5. Wilayah Penelitian.

Wilayah penelitian dilakukan di DKI Jakarta dan Jawa Barat.

6. Teknik Penyajian Dan Analisa Data.

a. Teknik Penyajian Data.

Teknik yang dipergunakan untuk menyajikan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah teknik **kualitatif**. Teknik kualitatif dipergunakan untuk menyajikan data berupa informasi, pendapat, konsep, doktrin dan analisa hukum yang ditemukan dalam penelitian ini.

³⁵ Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, op. cit. hal. 60-62.

³⁶ Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, Loc. Cit. hal 54-55, mengatakan : pengamatan dapat dibagi ke dalam pengamatan sistematis dan tidak sistematis serta pengamatan terlibat (*participant observation*) dan pengamatan tidak terlibat (*non-participant-observation*). Pengamatan sistematis adalah pengamatan yang terikat pada syarat-syarat pengamatan secara ilmiah, sebagai berikut :

b. Analisa Data.

Analisa data dilakukan secara **kualitatif** dengan menggunakan teknik secara **taksonomi**, yakni dengan menetapkan fokus penelitian terbatas pada domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendeskripsikan dan mengungkapkan fenomena yang menjadi obyek penelitian.³⁷ Hal ini dilandasi oleh maksud peneliti yang tidak hanya terbatas pada pengungkapan atau melukiskan data sebagaimana adanya, melainkan juga berusaha mengungkapkan realitas pelaksanaan perlindungan hukum di bidang merek.

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini secara terbatas meliputi norma hukum positif yang dapat menjadi landasan legalitas yang memadai dalam memberikan perlindungan hukum dan mekanisme serta perkembangan kegiatan proses penegakan hukum sebagai upaya perlindungan hukum di bidang merek, dengan bertumpu pada acuan teori dan praktik di lapangan.

-
1. mencakup seluruh konteks sosial, di mana tingkah laku yang diamati terjadi;
 2. mengidentifikasi semua peristiwa penting yang mempengaruhi hubungan antara orang-orang yang diamati
 3. mengidentifikasi apa yang benar merupakan kenyataan;
 4. mengidentifikasi keteraturan - keteraturan dengan cara mengadakan perbandingan dengan situasi-situasi sosial lain.

³⁷.Lihat Sanapiah Faisal, **Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi**, Cet. I, Yayasan Asih Asah Asuh, Malang (Y A3 Malang), 1990, hal. 98.

7. Sistematika Penulisan.

Kerangka penulisan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I. berisi mengenai latar belakang penulisan tesis, yang diikuti dengan Perumusan masalah, Tujuan dan Pemanfaatan penulisan dalam tesis ini. Selanjutnya untuk memperoleh gambaran ringkas mengenai pokok pikiran penulis maka pada BAB I juga disertakan Kerangka Pemikiran yang dilengkapi dengan Metode Penelitian sebagai alat untuk menentukan langkah-langkah penulisan dalam pencarian dan analisa data dalam rangka mewujudkan pokok kerangka pikiran tersebut secara konkrit.

BAB II. Merupakan bagian Tesis yang berisi kajian kepustakaan terhadap pokok permasalahan yang ada, yang selanjutnya kajian tersebut dipergunakan untuk menganalisis data dalam Tesis ini. Bab II ini terdiri atas tiga sub. bab yaitu sub. bab mengenai Perkembangan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Kebutuhan Pengaturannya Dalam Era Globalisasi, terdiri : 1. Perkembangan Hak Atas Kekayaan Intelektual. 2. Prinsip-prinsip Dasar Kebijakan Persetujuan TRIPs. 3. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Dengan pembagian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh perihal perkembangan dan perlindungan HAKI di era globalisasi. Selanjutnya diuraikan tentang Pendekatan Sistem Kebijakan Sebagai Suatu Metode Analisis, terdiri : 1 Perkembangan Kejahatan Dalam Era Globalisasi, 2. Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Kejahatan Dalam Era Globalisasi, yang mencoba menguraikan secara teoritis penanggulangan kejahatan yang modus operandinya semakin canggih.

BAB III. adalah bab yang secara khusus menguraikan hasil penulisan dan analisis data . Bab ini dapat dikatakan inti dari Tesis, karena didalamnya diuraikan dan dianalisis mengenai temuan-temuan lapangan sehubungan dengan : **A.** Perlindungan hukum dalam UU No. 19 tahun 1992 tentang merek terhadap pemilik merek. **B.** Antisipasi UU No. 19 tahun 1992 tentang merek terhadap UU No 7 tahun 1994 yang berkaitan dengan TRIPs **C.** Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Merek . Pembagian kedalam beberapa sub.bab yang ada tersebut dimaksudkan untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam bab. I .

BAB.IV yang terdiri atas dua sub bab, yaitu sub. bab kesimpulan dan sub. bab saran , dimaksudkan untuk menyimpulkan secara umum dan khusus terhadap hasil penulisan dan analisis dalam Tesis ini, yang kemudian diikuti dengan saran-saran terhadap perlindungan dan pelaksanaan penegakan hukum dibidang Hak Atas kekayaan Intelektual.

Akhirnya sebagai pertanggungjawaban ilmiah penulisan Tesis ini, pada bagian akhir disertakan Daftar Pustaka yang dipergunakan sebagai dasar acuan dalam penulisan dan penganalisaan Tesis ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkembangan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Kebutuhan Pengaturannya Dalam Era Globalisasi.

1. Perkembangan Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Perkembangan Hak Atas Kekayaan Intelektual tidak terlepas dan memiliki kaitan yang sangat erat dengan penyelenggaraan kehidupan dan upaya peningkatan kehidupan perdagangan,³⁸ khususnya dalam perdagangan antar negara.

Pada awalnya perdagangan antar negara itu dimulai sekitar abad ke-17 sampai dengan abad ke-18, dengan lahirnya filsafat ekonomi mercantilisme dan kolonialisme yang melandasi ekspansi ekonomi negara-negara Eropa. Seperti diketahui filsafat ekonomi mercantilisme dan kolonialisme didasarkan atas kepercayaan bahwa suatu negara dapat menjadi kaya raya, apabila negara ini melakukan monopoli dengan jalan melalui ekspor ke negara lain dan menghalangi impor dari negara lain.

³⁸. Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan dunia perdagangan, memiliki keterkaitan yang sangat erat, khususnya dengan produk yang diperdagangkan. Hak Atas Kekayaan Intelektual telah larut sejak awal produksi, bahkan pada tahap pemilihan atau perencanaan suatu produk. HAKI terlibat pula dalam tahap produksi. Teknologi apa yang akan digunakan dalam proses produksi telah dipilih sejak awal dan dipakai selama proses produksi. Begitu pula pada saat produk diluncurkan di pasar, HAKI terlibat dalam bentuk merek. Dengan demikian tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa HAKI sebenarnya sudah hadir sejak awal produksi hingga saat produk tersebut dipasarkan dan atau globalisasi perdagangan juga sama dengan globalisasi HAKI.

Baru kemudian pada abad ke-18, muncul konsep baru yang dikumandangkan oleh Adam Smith dengan karya besarnya "*Wealth of Nation*" (1776) dengan pandangannya bahwa dua negara bisa mengadakan perdagangan saling menguntungkan, apabila mempunyai keuntungan Absolut (*Absolute Advantage*).

Disusul kemudian lahir pandangan dari David Ricardo sebagai penyempurnaan dari pendapat Adam Smith yang mendasarkan uraiannya pada prinsip pembagian kerja secara internasional yang didasarkan pada teori keunggulan komparatif yang dimiliki tiap-tiap negara. Dalam teorinya mengatakan, sebaiknya setiap negara mengkhususkan diri pada kegiatan-kegiatan ekonomi dimana dia memiliki **keunggulan komparatif** (*Comparative Advantage*). Misalnya Portugal mengkhususkan dirinya dalam produksi anggur, karena iklim negara tersebut cocok untuk kebun anggur. Dengan demikian memproduksi anggur di Portugal lebih murah biayanya daripada misalnya di Inggris. Sedangkan Inggris mengkhususkan diri pada produksi bahan pakaian wol, karena iklim disini sangat cocok untuk padang rumput dimana domba-domba hidup berkeliaran. Bahan pakaian wol yang dibuat di Inggris lebih murah biaya produksinya ketimbang biaya produksi di Portugal. Kedua negara ini kemudian mempertukarkan hasil produksinya melalui perdagangan internasional.

Dalam sistem perdagangan internasional seperti ini, semua

pihak akan diuntungkan. Harga anggur dan pakaian wol jadi murah bagi kedua negara.³⁹ Ajaran David Ricardo (1772-1823) yang mendewakan ***persaingan tidak terbatas*** untuk mencapai kemajuan diperkuat oleh karya Carles Darwin, *The Origin of species* (1859), dimana Darwin membuktikan bahwa kemajuan adalah arah alamiah hidup manusia, dan yang terkuatlah yang hidup (*survival of the fittest*) dan tentunya yang akan maju adalah yang terkuat.

Seusai Perang Dunia II dan setelah runtuhnya kolonialisme, disadari benar oleh para negarawan dunia, bahwa liberalisme dalam kegiatan perekonomian atau ekonomi pasar yang didasarkan atas konsep Adam Smith, David Ricardo dan Carles Darwin tidak dapat dilepas berjalan sendiri tanpa adanya pengawasan tertentu. Para negarawan khawatir akan terjadi Perang dagang yang akan mengantar terjadinya perang dunia baru. Dilain pihak mereka menyadari bahwa sistem ekonomi pasar yang akan membawa dunia pada kesejahteraan yang merata. Untuk itulah mereka mengadakan kerjasama yang erat antara negara-negara produsen dalam memasarkan barangnya di pasaran dunia, dengan selalu mengupayakan terciptanya perdagangan dunia bebas⁴⁰ pada ketentuan-ketentuan yang

³⁹. Lihat Paul-Heinz Koesters, **Tokoh-Tokoh Ekonomi Mengubah Dunia**, Jakarta, PT Gramedia, 1987, hal. 38-39.

⁴⁰. Walaupun pada dasarnya globalisasi di bidang industri dan perdagangan dilandasi oleh prinsip-prinsip ekonomi bebas, ekonomi pasar dalam prakteknya saat ini sangat berlainan. Hal ini ditandai dengan munculnya gejala regionalisasi tercermin

disepakati bersama dengan berlatar belakang pada suatu konsep "**keunggulan komparati**" (*Comparative Advantage*).⁴¹

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas , maka timbul kesadaran masyarakat internasional akan perlunya suatu lembaga multilateral, disamping Bank dunia dan IMF.⁴² Kemudian berusaha mendirikan **International Trade Organisation** (ITO), melalui piagam Havana. Namun usaha ini kandas, karena Amerika Serikat menentanginya.⁴³ Untuk itu sebagai suatu dasar (atau wadah) yang

dari program Uni Eropa (*European Union, EU*) tahun 1992 NAFTA (*North American Free Trade Area*), AFTA (*Asean Free Trade Area*).

Pengaturan perdagangan regional ini, dimana suatu kelompok negara sepakat untuk menghilangkan atau mengurangi rintangan - rintangan terhadap impor dari sesama anggota. GATT dalam pasal XXI mengakui pengelompokan demikian sebagai suatu pengecualian dan aturan umum klausul MFN (*Most Favoured Nation*), dimana setiap negara anggota harus memberikan perlakuan yang sama seperti kepada warga negaranya sendiri terhadap jasa-jasa dan pemberi jasa dari negara lainnya dengan segera dan tanpa syarat. Untuk itu pengelompokan itu harus ada syaratnya, yaitu bahwa pengelompokan itu dibuat dengan maksud agar mendorong perdagangan diantara negara-negara tersebut, tanpa menimbulkan rintangan terhadap pihak ketiga. Dengan demikian integrasi regional itu harus berfungsi sebagai pelengkap bagi sistem perdagangan multilateral, dan bukan sebagai ancaman terhadapnya.

⁴¹. Keunggulan Komparatif dimaksudkan kemampuan terhadap produk apa yang bisa diproduksi oleh negara tersebut dengan sebaik - baiknya, dalam arti produk tersebut memiliki keunggulan dengan produk yang dibuat oleh negara lain, sehingga bukan saja dapat dengan mudah menembus pasar di dalam negeri, melainkan juga pasar dunia. Dengan kata lain, kebijakan perdagangan bebas yang melancarkan arus barang, jasa dan produksi mengandalkan hasil terhadap produk yang mutu dan harganya bersaing baik.

⁴². Oliver Long, **Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System**, Martinus Nijhoff Publishers, 1987, hal 1.

⁴³. Menurut Prof. John H. Jackson, salah satu keengganan Amerika Serikat meratifikasi piagam yang direncanakan untuk membentuk ITO, karena pemerintah Amerika Serikat menganggap bahwa peranannya dalam mengadakan perundingan dalam organisasi internasional dibatasi oleh Kongres. Berikut adalah cuplikan pengamatan beliau :

" earlier, the United State participation in the negotiation of the general Agreement was by virtue of the " Trade Agreement Extension Act " adopted by congress in 1945. The American delegation took the view that the Act did not give it sufficient authority to negotiate the establishment even of a provisional international organization of wich the United State would be a member."dikutip oleh

sifatnya sementara, maka lahirlah General Agreement on Tariffs and Trade yang dikenal dengan GATT, yang telah ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 1947 oleh delapan negara, ⁴⁴ yaitu Australia, Belgia, Canada, Prancis, Luxemburg, Belanda, United Kingdom dan United States. GATT menjadi forum terpenting untuk menyelesaikan masalah-masalah perdagangan yang timbul sebagai akibat dianutnya prinsip pasar bebas.⁴⁵

GATT sebagai perjanjian internasional dan memiliki ***tiga fungsi*** dalam mencapai ***tujuannya*** :

pertama, sebagai suatu perangkat ketentuan (aturan) multilateral yang mengatur tindak tanduk perdagangan yang dilakukan oleh para pemerintah dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan.

Kedua, sebagai suatu forum (wadah) perundingan perdagangan. Disini diupayakan agar praktik perdagangan dapat dibebaskan dari rintangan - rintangan yang mengganggu

Oliver Long, op. cit. 44.

⁴⁴. Sudargo Gautama, **Hak Milik Intelektual Indonesia Dan Perjanjian Internasional : TRIPs, GATT, Putaran Uruguay (1994)**, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1994, hal. 2.

⁴⁵. Dalam sistem ini, kekuatan yang menjadi andalan utama adalah daya saing, semua orang, yang lemah maupun yang kuat, harus berkopetensi bebas. Semua harus diperlakukan sama. inilah yang dianggap adil. Tidak boleh ada perlindungan bagi yang lemah. Menurut logika penganut sistem ini, kalau si lemah dilindungi, dia akan selamanya lemah. Kompetensi bebaslah yang akan membuatnya belajar, dan menjadi kuat. Perlindungan bagi yang lemah dianggap sebagai campur tangan politik terhadap ekonomi dan ini akan bertentangan dengan prinsip pasar bebas. (Martin Khor Kok Peng, **Imperialisme Ekonomi Baru**, Jakarta, Gramedia, 1993 : XIII-XIV.

(liberalisasi perdagangan). Sejak berdiri GATT telah mensponsori berbagai macam perundingan utama / pokok yang biasanya disebut dengan istilah putaran (*rounds*).

Putaran pertama pada umumnya difokuskan pada upaya penurunan tarif. Penurunan tarif ini sudah berlangsung sejak tahun 1947. Sejak tahun 1967, putaran yang telah dilaksanakan adalah putaran Jenewa (1947 diikuti 23 negara); Putaran Annecy (1947 diikuti 13 negara); Putaran Torquay (1951-38 negara); Putaran Jenewa (1956 diikuti 26 negara); Putaran Jenewa atau putaran Dillon (1960 - 1961 diikuti 26 negara yang khusus membahas tarif dan anti dumping). Putaran Kennedy (1964-1967 diikuti 62 negara); Putaran Tokyo (1973 - 1979 diikuti 102 negara yang membahas tarif, non tarif dan *favourable agreements*), dan proses liberalisasi perdagangan ini berlanjut terus, putaran Uruguay (1986-1994, diikuti oleh lebih 117 negara yang membahas 15 isu perdagangan global).

Ketiga, sebagai suatu pengadilan internasional tempat suatu pemerintahan menyelesaikan sengketa dagangnya.

Dewasa ini, hampir seluruh negara di dunia melakukan kegiatan perdagangan internasional, baik hubungan perdagangan ***bilateral***

maupun **multilateral**. Berkembangnya perdagangan internasional ini telah membawa pengaruh yang tidak kecil terhadap perkembangan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Hal ini disebabkan adanya keterkaitan yang erat antara dunia perdagangan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya dengan produk yang diperdagangkan, sehingga makin terasa kebutuhan perlindungannya. Tonggak sejarahnya dimulai dengan lahirnya **Konvensi Paris** pada tahun 1883 untuk Hak Milik Perindustrian dan tidak lama kemudian pada tahun 1886 dibentuk pula suatu konvensi untuk perlindungan hak cipta yang dikenal dengan **Intenational Convention for the Protection of Literary and Artistic Work**, yang ditandatangani di Bern.(kemudian lebih dikenal dengan konvensi Bern). Kedua konvensi ini lahir karena kebutuhan akan pentingnya perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual secara internasional. Perkembangan selanjutnya timbul keinginan agar terbentuk suatu organisasi dunia untuk Hak Atas Kekayaan Intelektual. Melalui Konperensi Stockholm tahun 1967, telah diterima suatu konvensi khusus untuk pembentukan organisasi dunia Hak atas Kekayaan Intelektual (**Convention establishing the world Intellectual Property Organization/ WIPO**).⁴⁶ WIPO sebagai organisasi Hak Atas Kekayaan

⁴⁶ WIPO merupakan " *Specialized agency* " dari PBB yang bemarkas di Geneve, bertujuan membantu negara-negara berkembang dalam mempersiapkan perangkat hukum di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Disamping itu melaksanakan pengadministrasian persetujuan-persetujuan internasional atau konvensi multilateral di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Didirikan pada tanggal 14 Juli 1967 dan

Intelektual kemudian menjadi pengelola tunggal dua puluh dua perjanjian, yang antara lain :

Di bidang Hak Cipta :

1. Konvensi Bern 1886, yang telah beberapa kali diubah, terakhir tahun 1967, dan merupakan konvensi induk bagi hak cipta.
2. Konvensi Roma tahun 1961, bagi perlindungan " *performers, producers of phonogram and broadcasting organization* ".
3. Konvensi tentang perlindungan bagi produser phonogram dari tindakan penggandaan tanpa ijin (1971).
4. Konvensi multilateral bagi penghindaran pajak berganda atas royalti hak cipta (1979).
5. Traktat Jenewa mengenai " *International Recording of Scientific Discoveries* " (1978).
6. *Convention Relating to the Distribution of Programme Carrying Signals Transmitted by Satellite* (1974)

Di Bidang Hak Milik Perindustrian.

7. Konvensi Paris 1883, yang telah beberapa kali diubah terakhir tahun 1979, yang merupakan " induk " dari hak milik perindustrian.
8. *Patent Cooperation Treaty* (1970). beserta peraturan pelaksanaannya.

mulai berlaku pada tahun 1970. Jumlah anggota WIPO saat ini 123 negara, termasuk Indonesia berdasarkan Keppres NO. 24 tahun 1979.

9. *Budapest Treaty on the Recognition of the Deposit for the purpose of Patent Procedure* (1977)
10. *International Convention on the Protection of New Varieties of Plant/ UPOV* (1961)
11. *Treaty on the Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits (Washington Treaty)* (1989)
12. *Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* (1981)
13. *Madrid Agreement for the Repression of false or Deceptive Indications of Source of Goods* (1981)
14. *Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services of the Purpose of the Registration of Marks* (1957)
15. *Trademark Registration Treaty* (1973)
16. *Lisbon Agreement for the Protection of Appellation of Origin and their International Registration* (1958)
17. *The Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Design* (1925).
18. *Vienna Agreement Establishing an International Classification of the figurative Element of Marks* (1973)
19. *Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs* (1968)

20. *Vienna Agrrement for the Protection of type Faces and their International Deposit* (1973) beserta Protokolnya.
21. *The Patent Convention* (EPC) tahun 1973.
22. *Nairobi Treaty on the Propection of the Olympic Symbol* (1981)

Kedua puluh dua perjanjian tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang berisikan standar perlindungan dan aspek prosedural lainnya.

Disamping itu runtuhnya komunisme ⁴⁷ dan berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dewasa ini, khususnya di bidang komunikasi dan transportasi, juga telah membawa pengaruh terhadap obyek dari Hak Atas Kekayaan Intelektual, misalnya dengan perkembangan bioteknologi menyebabkan pula lahir kebutuhan untuk melindunginya, misalnya perlindungan terhadap varietas tumbuhan, misalnya perkembangan teknologi pembuatan “ karya sinematografi/film/video-film, berkembang pula obyek yang harus dilindungi.

Kini era baru telah dimulai, suatu era yang disebut globalisasi telah melanda kehidupan negara dan bangsa di permukaan bumi ini. Globalisasi ekonomi adalah satu dari sekian banyak arus globalisasi

⁴⁷. Runtuhnya komunisme membawa dampak pengalihan sebagian besar modal dan teknologi dari industri militer ke industri sipil, sehingga produk industri sipil tumpah ruah di pasaran internasional. Negara-negara yang semula menjadikan industri militer menjadi tumpuan ekonomi secara nasional, kemudian menjadi sadar betapa pentingnya memberi perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual tersebut.

yang memancarkan gelombangnya. Suatu arus globalisasi yang telah menjadikan interdependensi ekonomi dunia semakin kuat.⁴⁸

Perkembangan keadaan ekonomi dunia di era globalisasi dan munculannya negara-negara industri baru, telah mendorong negara-negara di dunia untuk kembali memperhatikan terhadap perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Perhatian masyarakat internasional tercermin dari langkah-langkah yang dilakukan dalam forum *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyempurnakan konvensi-konvensi internasional yang telah ada dalam bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Forum lainnya yang menunjukkan perhatian yang besar dari masyarakat dunia terhadap perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah dengan lahirnya kesepakatan dokumen akhir putaran Uruguay mengenai kesepakatan **perdagangan global** (GATT), yang ditandatangani oleh lebih dari 117 negara, dari jumlah tersebut, lebih dari dua pertiganya adalah negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dan keseluruhan negara ini memainkan peranan sekitar 90 %

⁴⁸. Soemitro Djojohadikusumo, op.cit. 1989, hal. 5, mengatakan " tiada satu negara atau kelompok negarapun dewasa ini yang mampu memecahkan masalah-masalah pokoknya dalam suatu alam isolasi terlepas dari bagian dunia lainnya. Masalah-masalah pokok yang menghinggapi dan selalu menjerat kemajuan masyarakat di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, berkisar pada tingkat hidup yang rendah, kemiskinan dan pengangguran, kepincangan pada pemerataan pendapatan.....

dari produk dunia. Kesepakatan-kesepakatan di bidang perdagangan global diikuti dengan lahirnya **World Trade Organization**.⁴⁹

Kesepakatan-kesepakatan di bidang perdagangan global yang dihasilkan dalam sidang tingkat menteri anggota GATT tersebut, salah satu isu baru⁵⁰ yang cukup menarik, yaitu mengenai **kesepakatan TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights = Aspek-aspek Perdagangan yang bertalian dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual)**.

⁴⁹. WTO adalah organisasi perdagangan dunia merupakan bagian dari perjanjian Putaran Uruguay, dimana negara penandatangan GATT (Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan) sepakat menciptakan organisasi payung baru yang permanen untuk menggantikan GATT. WTO kemudian dibentuk yang akan mempermudah pelaksanaan dan administrasi kesepakatan Putaran Uruguay. Seperti halnya GATT, WTO akan menyediakan forum bagi perundingan perdagangan mancanegara, melakukan peninjauan atas kebijakan perdagangan negara anggota, dan bekerja sama dengan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional dalam usaha mencapai koherensi yang lebih besar dalam pembuatan kebijaksanaan ekonomi dunia. Tetapi WTO berbeda dengan GATT dalam beberapa hal yang lebih mempersempit bagi kemungkinan tindakan sepihak. **Pertama**, jangkauan masalah perdagangan yang akan digarap WTO telah sangat berkembang luas. **kedua** WTO memiliki prosedur penyelesaian perselisihan yang jauh lebih tegas. **ke tiga**, badan itu memberikan sifat permanen yang dimiliki GATT (yang memang direncanakan hanya merupakan badan sementara). Semua penandatangan WTO harus sepakat penerima secara otomatis semua kesepakatan Putaran Uruguay tanpa kecuali.

⁵⁰. Isyu ini merupakan salah satu dari 15 isyu yang dirundingkan dalam putaran URUGUAY/ GATT.

Ke-15 isyu tersebut yang pada awalnya dibagi menjadi tiga kelompok, adalah :

A. Kelompok " Market Access " :

1. Agriculture, 2. Tropical Products, 3. Natural Resources Based Products, 4. Textile and Clothing, 5. Tariff and Non Tariff Barriers.

B. Kelompok " Rules of Competition " :

6. Safeguards, 7 Anti Dumping, 8. Subsidies and Countervailing Duties, 9. Dispute Settlements, 10. Functioning of GAT Systems, 11. GATT Articles, 12. Agreements and Arrangements Under Multilateral Trade Negotiations.

C. Kelompok " New Issues " :

13. Trade Related Investment Measures (TRIMs), 14. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), Trade in Services.

Beberapa faktor yang menyebabkan diangkatnya masalah **TRIPs** sebagai *isyu* dalam perundingan Putaran URUGUAY, yakni : ⁵¹

Pertama, negara-negara maju yang dipelopori oleh Amerika Serikat menganggap bahwa perlindungan internasional terhadap hak-hak yang berkaitan dengan Paten, Merek dagang, Hak Cipta, Rahasia dagang dan Disain industri pada dewasa ini dirasakan masih lemah. Hal ini menyebabkan makin terbatasnya akses pasar bagi produk mereka di negara berkembang.

Kedua, karena masih banyak dijumpainya pelanggaran di bidang TRIPs yang dituduhkan banyak dilakukan oleh negara-negara berkembang seperti misalnya, perdagangan barang tiruan/palsu, pemalsuan merek dagang, dan perdagangan kaset bajakan. Hal ini menyebabkan digerogetinya pasaran domestik mereka oleh produk tiruan dari negara berkembang.

Disamping itu diangkatnya masalah TRIPs dalam GATT yang juga dipelopori oleh Amerika Serikat, menilai *World Intellectual Property Organization (WIPO) tidak mampu lagi* melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual warga Amerika Serikat di dunia Internasional, karena lembaga ini belum bisa mengadaptasi perubahan struktur perdagangan internasional, tingkat inovasi ekonomi dan teknologi.

⁵¹ . PAIAN NAINGGOLAN, **Pengaruh Hak Milik Intelektual Terhadap Ekspor Produk-Produk Industri Nasional**, Makalah Seminar Pengaruh Hak Milik Intelektual Terhadap industri Dan Perdagangan Internasional, Jakarta, 9 September 1993.

WIPO juga tidak dapat memberlakukan ketentuan-ketentuan internasional terhadap bukan anggotanya. *Selain itu* WIPO tidak memiliki mekanisme untuk berkonsultasi menyelesaikan sengketa yang timbul serta menghukum pelaku pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual, baik pelakunya negara anggota maupun bukan anggota.

Tidak digunakannya forum WIPO untuk memperbaiki konvensi tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual oleh negara-negara maju, karena disadari bahwa mekanisme pengambilan keputusan di badan-badan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak akan mampu mewujudkan keinginan mereka. Sistem pengambilan keputusan dengan pemungutan suara, merupakan *trauma* bagi negara-negara maju. Mereka kalah dalam jumlah dengan negara berkembang. Bagi negara maju GATT forum yang tepat, karena di forum inilah semua negara pada akhirnya akan *berbicara dan saling memberi atau meminta akses* atau kemudahan dagang agar dapat masuk ke pasar negara lainnya.

Oleh karena itu dengan memasukkan TRIPs ke dalam aturan GATT diharapkan dapat *memperkuat* perjanjian yang sudah ada saat ini yang dikelola oleh WIPO. Ketentuan yang dihasilkan dalam perundingan Uruguay dapat memperkuat *standar yang lemah*, juga mengatasi keterbatasan kelemahan *pelaksanaan* konvensi WIPO, sudah barang tentu sekaligus memberikan kemudahan dalam alih teknologi. Selain itu penyelesaian masalah-masalah yang ada dapat

dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan berdasarkan **ketentuan GATT**, yang memungkinkam **pembalasan silang**. Disini negara-negara maju terutama Amerika Serikat dan masyarakat Eropa berpendapat bahwa norma-norma perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual hendaknya didasarkan pada **Konvensi Paris** mengenai Hak Milik Industri dan **Konvensi Bern** tentang perlindungan Hak Cipta. Lemahnya perlindungan hak milik intelektual di negara berkembang ⁵² mendorong negara-negara maju semakin kuat dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya, sehingga tampak seolah-olah mereka memaksakan kehendaknya terhadap negara-negara berkembang. Keadaan ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa mereka banyak **dirugikan**, seperti akibat pencurian hak cipta, pembajakan dan perdagangan barang-barang tiruan atau yang dipalsukan. Diperkirakan kerugian yang dialami oleh Amerika Serikat saja per tahunnya berkisar antara US\$ 42-61 milyar, dikarenakan oleh adanya kecurangan terhadap hak atas kekayaan intelektual, software komputer serta produk hiburan dan farmasi.

Perundingan di bidang TRIPs dalam putaran URUGUAY mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual, memiliki **persamaan** cara pandang mengenai kebutuhan akan akses ke pasar dalam perdagangan

⁵². Beberapa negara yang dianggap tidak memberi tempat untuk pencegahan perbuatan-perbuatan tercela, seperti pembajakan dan pemalsuan, antara lain Korea, Hongkong, Thailand dan Singapura, dimana banyak memproduksi barang yang murah dan peniruan, Sudargo Gautama, Op.Cit. hal. 11.

internasional, namun dalam hal tertentu masih terjadi ***perselisihan paham***, sehingga terpecah menjadi dua kutub antara negara maju dan negara berkembang yang masing-masing pihak memiliki keinginan berbeda. ***Negara maju*** merupakan pihak yang mengupayakan perlindungan yang kokoh bagi hak atas kekayaan intelektual, sehingga memberikan daya saing kepada para pemegang hak atas kekayaan intelektual untuk lebih berpacu melakukan riset, pengembangan dan inovasi. Di lain pihak, ***negara-negara berkembang*** berpendapat bahwa perlindungan hak atas kekayaan intelektual secara ketat akan membatasi mereka untuk membujuk para pemegang hak untuk mengalihkan teknologi dalam perekonomiannya atau akan menghalangi pemanfaatan teknologi oleh masyarakat secara luas dengan biaya yang serendah mungkin.⁵³

Perbedaan tersebut muncul kepermukaan karena adanya perbedaan ***tingkat sosial ekonomi dan tingkat penguasaan dan kemampuan***⁵⁴ penggunaan HAKI di negara masing-masing, yang pada

⁵³. Bandingkan Martin Khor Kok Peng, *ibid.* hal. 34, mengatakan ketentuan mengenai hak milik intelektual yang dikemukakan dalam TRIPs akan secara efektif mencegah penyebaran teknologi ke dunia ketiga, dan akan amat meningkatkan monopoli royalti bagi perusahaan transnasional; sementara pada saat yang sama akan menghambat perkembangan teknologi lokal yang potensial di dunia ke tiga.

Sekarang ini hanya satu persen dari Paten yang ada diseluruh dunia yang dimiliki orang-orang atau perusahaan dari dunia ke tiga. Pada tahun 1970-an hanya 200.000 Paten (dari 3.500.000 yang ada di dunia) diberikan kepada negara-negara dunia ke tiga; dan 84 % dari jumlah yang dimiliki orang asing. Dan toh hanya kurang dari 5 % dari paten yang dimiliki oeh orang asing itu dimanfaatkan dalam produksi di dunia ke tiga.

⁵⁴. Yang menjadi masalah pokok pada waktu ini pada umumnya, negara berkembang ingin mencapai kemajuan ekonomi secara cepat, demi peningkatan taraf hidup

akhirnya mewarnai kepentingan nasional mereka. Kendati demikian memang tidak dapat dipungkiri bahwa di negara berkembang sering terjadi pemalsuan merek dagang, pemalsuan teknologi dibiarkan dan tidak diambil tindakan dan bahkan dilindungi, semata-mata demi meningkatkan perekonomian negaranya. (pemalsuan laser disc dan compac disc oleh RRC dilindungi oleh militer).

Oleh karena itu dengan melihat realitas yang ada dan dengan berbagai pertimbangan, terutama dengan upaya Amerika Serikat, Masyarakat Eropa dan Jepang, masalah HAKI kemudian dikaitkan erat dengan perdagangan internasional. Lebih dari itu, aspek-aspek pengaturan yang bersifat *substantif* dan bahkan *penegakannya*, didorong untuk dirundingkan dalam forum GATT, yang kemudian

rakyatnya, yang diantaranya dilakukan dengan industrialisasi. Pelaksanaan industrialisasi membutuhkan penggunaan teknologi, modal dan tenaga. Yang langka di negara berkembang adalah modal dan teknologi modern yang hanya dapat diperoleh dari negara maju.

Tidak heran apabila ada yang beranggapan dengan diterapkannya aturan hak milik secara ketat akan lebih banyak merugikan negara berkembang dibandingkan dengan keuntungannya. Sebagai contoh perlindungan hak paten hanya akan memperkuat posisi negara maju, oleh karena :

Pertama, menjamin monopoli pemasaran barang-barang yang di patenkan di negara di mana paten didaftarkan. **Ke dua**, menjamin agar barang-barang yang diproduksi dan di patenkan tidak akan diproduksi dan dipasarkan oleh pengusaha di tempat paten didaftarkan di luar negeri tanpa izin pemilik paten. **Ke tiga**, mencegah orang-orang setempat yang tanpa bantuan pemilik paten asing juga berhasil menemukan barang atau cara baru yang aman dan tidak mungkin mendapat paten atas penemuannya. Ke empat, menjamin agar pihak asing lainnya, yang memiliki paten atas barang-barang atau cara yang hampir serupa, tidak mungkin dapat memasukkan produksinya ke negara tempat paten didaftarkan. (C. Vaitson, dikutip dari tulisan Djumhana, Suara Pembaharuan, Maret 1989).

Menurut hemat penulis kerugian-kerugian penerapan perlindungan hak paten, jikapun ada hanya bersifat sementara saja. Hal ini muncul karena kita belum terbiasa dengan budaya penelitian dan penemuan yang inovatif.

dituangkan dalam suatu persetujuan tentang Aspek-aspek Perdagangan yang bertalian dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (TRIPs).

Dari seluruh paparan di atas, sebenarnya terbesit pula kenyataan, bahwa perkembangan Hak Atas Kekayaan Intelektual memiliki **keterkaitan** yang erat dengan penyelenggaraan kehidupan dan upaya peningkatan kehidupan ekonomi/ perdagangan. Perannya menunjukkan semakin penting dalam **era globalisasi**, dimana iklim persaingan usaha yang akan semakin ketat. Kecenderungan ini pula yang mendorong dunia usaha untuk lebih berhati-hati dalam melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual mereka.

2. Prinsip-Prinsip Kebijakan Persetujuan TRIPs.

Terbentuknya persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) ini dalam putaran URUGUAY (GATT), mulai berlaku efektif sejak tanggal **1 Januari 1995**, namun prinsip pelaksanaan dan penerapannya nanti telah memberikan kelonggaran waktu bagi negara-negara berkembang dan negara-negara yang belum siap, termasuk negara-negara blok Timur, sebagaimana diatur dalam **pasal 65 TRIPs** yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

1. Negara - negara anggota GATT tidak diwajibkan untuk mulai menerapkan persetujuan TRIPs dalam waktu satu tahun, setelah persetujuan berlaku efektif.

2. Negara berkembang dapat menunda penerapan persetujuan TRIPs untuk waktu 4 tahun setelah selesainya masa satu tahun berlaku umum;
3. Negara yang sedang melakukan perubahan dan penyesuaian sistem ekonominya, seperti negara-negara bekas blok timur dapat juga memanfaatkan jangka waktu penundaan tersebut.
4. Negara - negara paling terbelakang dapat menunda penerapan penerapan persetujuan TRIPs selama 10 tahun dan dapat diperpanjang.

Ketentuan peralihan tersebut setidaknya dapat dimanfaatkan oleh Indonesia hingga 31 Desember tahun 1999. Ini berarti persetujuan tersebut bagi Indonesia baru akan mulai berlaku efektif tanggal **1 Januari tahun 2000**.

Persetujuan TRIPs sebagaimana halnya perjanjian multilateral lainnya, memiliki **tujuan** dan **prinsip-prinsip dasar** bagi para anggotanya dalam melaksanakan aturannya.

Persetujuan TRIPs memiliki **tujuan** untuk melindungi dan menegakkan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial, ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban (**pasal 7 TRIPs**).

Untuk itu segala gangguan dan hambatan yang terdapat dalam perdagangan internasional tidak merupakan penghalang dalam mewujudkan terjadinya perdagangan yang sah, demi terciptanya kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Adapun **ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip dasar** dari persetujuan TRIPs yang terpenting dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Ketentuan Free to Determine.

Ketentuan ini memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk menentukan cara-cara **yang dianggap sesuai** untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam TRIPs ke dalam sistem dan praktek hukum mereka. Mereka dapat menerapkan sistem perlindungan yang lebih luas dari yang diwajibkan dalam TRIPs, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam persetujuan tersebut (**pasal 1 TRIPs**).

Dari ketentuan di atas dapat dijabarkan, bahwa pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam persetujuan TRIPs hanya mengatur masalah-masalah yang bersifat **global** saja, sedangkan pengaturan **spesifiknya** diserahkan pada para negara anggota masing-masing. Prinsip pengaturan seperti ini merupakan prinsip umum yang dikenal di dalam perjanjian internasional.

2. Ketentuan Intellectual Property Convention.

Yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya **menyesuaikan** peraturan perundang-undangnya dengan berbagai konvensi internasional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya konvensi Paris, Konvensi Bern, Konvensi Roma dan *Treaty and The Treaty on intellectual Property in respect of Integrated Circuit (Pasal 2 ayat 2)*.

Ketentuan ini berkaitan dengan ketentuan yang terdapat pada butir (1) di atas, dimana pengaturan selanjutnya disesuaikan dengan konvensi-konvensi internasional yang ada dan diakui.

3. Ketentuan National Treatment.

Menurut prinsip ini mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang sama antara warga negaranya sendiri dengan warga negara anggota lainnya (Pasal 3 ayat 1).

Prinsip ini sifatnya berlaku luas. Setiap negara anggota harus menerapkan **perlakuan sama** tidak hanya terbatas pada **warga negara**, tetapi juga meliputi **badan hukum** yang ada di masing-masing negara anggota. Prinsip ini juga berlaku terhadap semua macam pajak dan pungutan-pungutan lainnya. Ia berlaku pula terhadap perundang-undangan, pengaturan dan persyaratan hukum yang mempengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi

atau penggunaan produk-produk di pasar dalam negeri.⁵⁵ Prinsip ini juga memberikan perlindungan terhadap proteksionisme sebagai akibat upaya-upaya atau kebijakan administratif atau Legislatif.⁵⁶

4. Ketentuan *Most-Favoured-Nation-Treatment*.

Prinsip ini dimuat dalam ***pasal 4 TRIPs***, yang pada pokoknya setiap negara anggota terikat untuk memberikan kepada negara lainnya perlakuan yang sama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual. Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan segera tanpa syarat terhadap produk yang berasal atau ditujukan kepada semua anggota GATT, dalam hal bea masuk dan tarif. Untuk itu Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya perlakuan istimewa yang berbeda (*diskriminasi*) suatu negara terhadap negara lain dalam memberikan perlindungan Hak Atas kekayaan Intelektual.

Jadi pada prinsipnya semua negara harus ***diperlakukan*** atas dasar yang ***sama*** dan semua negara menikmati keuntungan secara timbal balik dan atau suatu negara anggota pada pokoknya dapat menuntut untuk diperlakukan sama terhadap produk impor dan ekspornya di negara-negara anggota lain.

Namun terhadap prinsip ini ada beberapa ***pengecualian*** :⁵⁷

⁵⁵. Oliver Long, Op. Cit. Hal. 9

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Huala Adolf & A Chandrawulan, **Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional**, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1994, Hal. 16

1. keuntungan yang diperoleh karena jarak lalu lintas (*frontier traffic advantage*), tidak boleh dikenakan terhadap anggota lainnya, pasal VI GATT.
2. perlakuan preferensi di wilayah - wilayah tertentu yang sudah ada (misalnya kerjasama ekonomi dalam *British Commonwealth, the French Union*), tetap boleh terus dilaksanakan, namun tingkat preferensinya tidak boleh dinaikkan, pasal I ayat 2-4 GATT.
3. anggota-anggota GATT yang membentuk suatu *Custom Union* atau *Free Trade Area* yang memenuhi persyaratan pasal XXIV tidak harus memberikan perlakuan yang sama kepada negara anggota lainnya. Misalnya NAFTA (*North American Free Trade Agreements*) yang membebaskan bea masuk bagi mata dagangan dari anggota organisasi), AFTA memberikan tarif prefensial (*Preferential Tariff Arrangement*) kepada produk-produk yang murni dari negara ASEAN.
4. pemberian preferensi tarif oleh negara - negara maju kepada produk impor dari negara sedang berkembang atau negara-negara yang kurang beruntung (*least developed*) melalui fasilitas *Generalised System of Preference* (GSP=Sistem Preferensi Umum).

Pengecualian lainnya adalah apa yang disebut dengan ketentuan pengamanan (*safeguard rule*). Pengecualian ini

mengakui bahwa suatu pemerintah, apabila tidak mempunyai upaya lain, dapat melindungi atau memproteksi untuk sementara waktu industri dalam negerinya. Hal ini diatur dalam ***pasal 66*** berjudul *Least-Developed Countries Member*. Pada huruf 1 dari artikel itu menyebutkan, dalam kasus khusus ada kebutuhan dan tuntutan negara anggota terbelakang sehubungan dengan kendala keuangan, ekonomi dan administratif serta kebutuhan pengembangan teknologi. Untuk itu negara anggota bisa dibebaskan dari artikel 3, 4, 5, selama jangka waktu sepuluh tahun sejak diusulkan. Huruf 2 dari artikel menyarankan kepada negara maju seharusnya memberikan insentif pada perusahaan atau lembaga yang ada di negaranya dengan tujuan mempromosikan dan menyemangati transfer teknologi kepada negara berkembang.

5. *Ketentuan Exhaustion.*

Ketentuan yang mengharuskan kepada setiap anggota, di dalam menyelesaikan perselisihan, untuk tidak menggunakan satu ketentuan pun dalam persetujuan TRIPs sebagai alasan tidak optimalnya pengaturan Hak Atas kekayaan Intelektual di dalam negeri mereka.

Ketentuan ini berkaitan erat dengan masalah sengketa yang mungkin timbul diantara para anggotanya. Dalam hal menyangkut prosedur penyelesaian sengketa, maka hal tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa secara

terpadu yang akan ditangani oleh sebuah badan penyelesaian sengketa yang berada di bawah **Multilateral Trade Organization** (MTO), organisasi yang persetujuan pembentukannya disepakati dalam paket persetujuan GATT dengan tugas sebagai **pengelola** TRIPs. Sedangkan untuk **mengawasi pelaksanaan** Persetujuan TRIPs dibentuk dewan TRIPs (*TRIPs Council*) yang secara struktural merupakan bagian dari MTO.

Untuk mencegah terjadinya sengketa, di dalam **pasal 63 TRIPs** diatur mengenai hal tersebut. Di dalam ketentuan itu antara lain ditegaskan untuk **mencegah terjadinya sengketa** antar negara, maka tiap anggota diharuskan :

1. Mengungkapkan secara transparan, hukum dan peraturan perundang- undangannya, serta keputusan-keputusan badan Peradilan maupun penetapan-penetapan administrasi yang berlaku efektif menyangkut masalah Hak Atas Kekayaan Intelektual kepada negara anggota lainnya, ataupun kepada dewan (*council*) TRIPs untuk memudahkan pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan di dalam TRIPs (**pasal 63 ayat 1 dan 2**).
2. Bersedia memberikan jawaban ataupun penjelasan terhadap tanggapan atas permohonan tertulis yang diajukan negara

anggota lainnya yang menyangkut hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan di atas butir 1 , (**pasal 63 ayat 3**).

Bila terjadi sengketa, sesuai dengan pasal 64 TRIPs penyelesaiannya akan digantungkan pada pasal XXII dan XXIII yang ada pada GATT. Penyelesaian menurut ketentuan GATT pertama-tama menekankan pentingnya **konsultasi** (perundingan)⁵⁸ di antara pihak yang bersengketa. Konsultasi tersebut bisa berupa perundingan **in formal** maupun **formal**, seperti melalui saluran diplomatik.⁵⁹

Ada dua alternatif yang dapat dilakukan oleh para pihak, yaitu :

Pertama, si termohon menerimanya. Kalau demikian halnya, ketentuan ini menegaskan bahwa para pihak harus menyelesaikan sengketanya dalam waktu 60 hari sejak permohonan konsultasi diterima oleh pihak lainnya.

Kedua, jika konsultasi tidak memberikan jalan keluar yang bisa diterima oleh pihak yang bersengketa, maka negara penggugat bisa meminta dibentuk suatu panel atau badan pekerja (*working Party*) untu menyelesaikan sengketanya.

⁵⁸. **Pasal XXII** GATT : Mewajibkan anggota GATT untuk saling berkonsultasi mengenai perselisihan yang timbul karena peraturan GATT.

Pasal XXIII : Menetapkan ketentuan dasar untuk mengatasi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui konsultasi bilateral. Pasal ini yang digunakan Jepang, ME dan Amerika Serikat guna mengadakan Indonesia ke WTO untuk penyelesaian kasus MOBNAS Indonesia.

⁵⁹. Huala Adolf & A Chandrawulan, ibid, hal. 22

Pembentukan panel ini dianggap sebagai **upaya terakhir** suatu penyelesaian sengketa dalam GATT. Namun demikian ketentuan GATT masih mengizinkan para pihak untuk bersepakat **mencari alternatif** penyelesaian lainnya, yang masih memungkinkan, yaitu jasa baik, konsiliasi dan mediasi. Kedua bentuk alternatif penyelesaian ini pada pokoknya bersifat sama, yaitu mengundang pihak ketiga yang **netral** untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Menurut Bambang Kesowo,⁶⁰ bahwa persetujuan TRIPs memiliki ciri-ciri pokok yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga hal :

Pertama, berbeda dengan isu-isu lainnya yang erat kaitannya dan pangkal tolaknya pada komoditi dan aksesnya ke pasar, TRIPs berbicara tentang **norma** dan **standar**.

Bila diamati dalam persetujuan TRIPs, nampak adanya **norma - norma baru**, misalnya dapat dilihat dari adanya ketentuan mengenai :

1. "*rental rights*" bagi pemegang hak cipta rekaman film/ video-film, dan komputer program;
2. Perlindungan bagi "*performers, producers of phonograms, (sound Recordings) and Broadcast*."
3. Pengaturan tentang indikasi geografis (*geographical*

⁶⁰. Bambang Kesowo, Op. Cit. hal 79

indications);

4. Perlindungan atas " *lay out Desisgn* " pada *integrated circuits* ".
5. Perlindungan terhadap " *Undisclosed Information* ".

Perihal **standar** yang digunakan TRIPs memiliki standar pengaturan yang lebih tinggi, seperti misalnya pengaturan tentang :

- 1 .Perlindungan hak cipta atas komputer program yang harus berlangsung setidaknya untuk 50 tahun, sementara dalam Undang-undang hak cipta hanya 25 tahun.
2. Perlindungan Paten setidaknya harus berlangsung 20 tahun dan dapat diperpanjang (Undang-undang Paten 14 tahun)
3. Isi hak yang diberikan dalam Paten dan Merk tidak sekedar terbatas pada hak untuk memakai , menyewakan, menjual atau memberi hak pada orang lain untuk memakainya (atau melarang orang lain memakai tanpa persetujuannya), tetapi juga meliputi hak untuk melarang impor produk yang diduga melanggar haknya.

kedua, persetujuan TRIPs menetapkan **kesuaian penuh** (*full compliance*) terhadap beberapa perjanjian internasional di bidang Hak Atas Kekayaan Internasional sebagai persyaratan

minimal, tetapi hal-hal tertentu mengisi kekosongan (misalnya dalam hal " *Geographical Indication* ", " *Rental Rights* ", bagi karya cipta tertentu) dan bahkan mengubah suatu ketentuan dalam perjanjian internasional yang ada (misalnya menentukan perlindungan untuk " *integrated Circuit* " minimal 10 tahun, sementara *Washington Treaty* hanya menentukan minimal 8 tahun).

ketiga, persetujuan TRIPs memuat ketentuan mengenai penegakan hukum yang ketat berikut mekanisme penyelesaian perselisihan atau sengketa, yang diikuti dengan hak bagi negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan balasan di bidang perdagangan secara silang.

Pengambilan tindakan ***secara silang*** (*cross retaliation*) akan berlangsung melalui panel. Apabila dalam panel terbukti bahwa suatu negara tidak melindungi secara efektif Hak Atas Kekayaan Intelektual, baik dalam pengaturan maupun penegakan hukumnya dan secara nyata telah mengakibatkan kerugian ekonomi/ finansial, maka akan memberikan hak kepada negara yang merasa dirugikan untuk mengambil tindakan balasan terhadap negara yang bersangkutan. Tindakan balasan dapat berupa pengurangan kuota, peniadaan *Generalised System of Preferences* (GSP atau sistem preferensi umum) pengenaan tarif yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Pemilihan bidang

balasan atau komoditi mana yang akan terkena hukuman, dengan sendirinya akan ditentukan oleh negara yang dirugikan.

Salah satu tindakan balasan yang terkenal adalah yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap mitra dagangnya yang dianggap telah merugikan perekonomian Amerika Serikat, dengan menggunakan senjata Section 301 Undang-undang perdagangan Amerika Serikat 1974 (*Section 301 of the Trade Acts of 1974* atau *super Act* atau *Special 301 Provisions*).⁶¹

Berkaitan dengan tindakan balasan dalam hubungan ekonomi, ada sengketa perdagangan penting antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat, terutama dengan adanya ancaman section 301: **pertama**, sengketa tuduhan pencurian teknologi milik sebuah perusahaan gelas Amerika Serikat, Guardien Industries, oleh sebuah perusahaan gelas nasional kita dan sengketa peredaran film Amerika Serikat di tanah air.⁶²

Kedua, apabila sengketa Mobil Nasional (Mobnas), tidak dapat diselesaikan melalui perundingan bilateral dengan Jepang, USA, MEE, maka Indonesia akan diajukan ke WTO, dimana

⁶¹. Seksi 301 dari UU perdagangan Amerika Serikat tahun 1974, yang mewajibkan Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR- *United State Trade Representative*) untuk mengidentifikasi praktek negara-negara tertentu yang bisa mengancam perluasan ekspor atau investasi Amerika Serikat di negara itu. Ayat 301 ini tadinya sudah tidak berlaku sejak tahun 1991. Namun pemerintah Bill Clinton kembali menerapkan ayat ini yang kemudian lebih dikenal dengan Super 301.

⁶². Tempo, edisi 18 April 1992, Hal. 91

Indonesia telah dituduh melanggar prinsip MFN (Most Favoured Nation) atau diskriminasi tarif bea masuk ⁶³

Realita di atas harus menjadi perhatian Pemerintah, agar tindakan - tindakan yang sekiranya akan merugikan perekonomian secara nasional dapat dihindari.

3. Prinsip - prinsip Pokok Penegakan Hukum dalam persetujuan TRIPs.

Persetujuan TRIPs juga memuat aturan-aturan mengenai **penegakan hukum nasional** untuk mencegah dan mengatasi terjadinya pelanggaran di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual di dalam suatu negara anggota. Ketentuan ini diatur dalam BAB III terdiri dari 21 pasal, yaitu pasal 41 sampai pasal 61. Secara garis besar memuat tentang Hak dan kewajiban negara anggota, kewenangan-kewenangan (hak) yang diberikan kepada Badan Peradilan, Hak dan Kewajiban pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan Badan Administratif (Pabean).

Prinsip-prinsip Pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Hak dan Kewajiban negara anggota TRIPs.

Pasal 41 TRIPs :

1. Setiap peserta harus **menjamin** bahwa prosedur pelaksanaan tertera dalam bagian ini , tersedia dalam hukum nasional

⁶³ . Kompas, 5 Oktober 1996.

masing-masing, dengan demikian akan diperoleh kemungkinan untuk mengambil tindakan yang efektif terhadap setiap perbuatan melanggar atas Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam persetujuan ini, juga harus disediakan kemungkinan untuk mengambil tindakan-tindakan secara tepat agar dapat dihindarkan pelanggaran lebih lanjut dan dalam penerapannya menimbulkan rasa takut bagi pelanggar berikutnya. Pelaksanaan dari perlindungan ini harus sedemikian rupa untuk menghindari terjadinya halangan pada arus perdagangan yang sah.

2. Prosedur berkenaan dengan pelaksanaan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual harus terbuka dan wajar. Jangan sampai ada komplikasi harus membayar mahal atau berlarut-larut dan memakan banyak waktu dengan adanya penguluran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
3. Keputusan dalam perkara yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang mengandung putusan dalam suatu pokok perkara sebaiknya secara tertulis dan dengan diberi alasan. Putusan mengenai pokok perkara harus diberitahukan pada para pihak secepat mungkin. Putusan tentang pokok perkara harus didasarkan atas bukti-bukti.
4. Para pihak yang terlibat dalam suatu proses akan diberikan kesempatan untuk meminta peninjauan kembali

(*review*) oleh suatu instansi yuridis (*judicial authority*) berkenaan putusan akhir dari pihak administrasi.

5. Ketentuan-ketentuan prosedur berperkara dalam hal Hak Atas Kekayaan Intelektual, tidak harus diadakan ***ketentuan-ketentuan yang khusus*** berkenaan dengan pelaksanaan dari peraturan yang berlaku secara umum. Hal ini tidak berarti negara anggota akan dikurangi hak mereka untuk melaksanakan putusan-putusan dalam perkara secara pada umumnya. Dengan perkataan lain, tidak akan diciptakan kewajiban yang berlainan berkenaan dengan pembagian peradilan dan pelaksanaannya dalam perkara Hak Atas Kekayaan Intelektual dan perkara-perkara pelaksanaan hukum pada umumnya. Jadi penyelesaian perkara sesuai dengan prosedur yang ada pada badan-badan peradilan yang bersangkutan.

Pasal 42 TRIPs :

Para anggota yang memilih prosedur penyelesaian melalui peradilan perdata, tidak diwajibkan para pihak untuk hadir. Cukup diurus segala sesuatunya dan diwakili para pihak ini oleh kuasa hukumnya. Para pihak dapat diwakili oleh kuasa hukum yang tidak berpihak (*independent legal Counsed*) juga tidak diwajibkan untuk mensyaratkan kehadiran dari para pihak dimuka pengadilan secara berlebihan. Para pihak berhak untuk mengajukan dalil-dalil

mereka dan semua bukti-bukti yang diperlukan. Prosedur yang disediakan harus memberi kesempatan untuk melindungi informasi yang bersifat konfidensial (rahasia). Hal ini jangan sampai melanggar persyaratan konstitusional yang memang berlaku untuk persoalan ini.

Pasal 60 TRIPs :

Para anggota TRIPs dapat menentukan dalam perundang-undangan mereka untuk tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut diatas untuk bawaan barang-barang pribadi dalam jumlah kecil yang sifatnya tidak komersial (misalnya barang bawaan yang dibawa oleh turis).

Pasal 61 TRIPs :

Para anggota TRIPs harus memasukkan dalam ***hukum pidananya***, hukuman yang memadai apabila telah terjadi suatu pemalsuan merek dagang atau hak cipta secara sengaja. Pemalsuan dan pembajakan ini harus dilakukan dalam suatu ***taraf komersial***. Agar dicantumkan kemungkinan untuk memenjarakan atau menentukan membayar denda yang cukup tinggi untuk menakutkan mereka (*deterent*). Satu dan lain hal sejalan dengan hukuman yang berlaku untuk kejahatan yang dipandang serupa. Dalam hal tertentu, maka upaya hukum yang terdapat ini akan mencakup pula

penyitaan, pemusnahan dari barang-barang palsu atau bahan-bahan yang telah dipergunakan dalam pemalsuan ini.

2. Kewenangan oleh Badan Peradilan.

Pasal 44 TRIPs :

ayat 1 : Instansi **peradilan** mempunyai wewenang untuk **Menghentikan** dan **mencegah** masuknya barang-barang yang diketahui / diduga merupakan suatu pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual pihak lain dan mencegah masuk di dalam arus perdagangan bebas di wilayahnya, dan dapat menghentikan setelah diperiksa oleh Bea cukai. Para anggota peserta persetujuan tidak wajib untuk menghormati barang-barang yang telah diperoleh atau telah dipesan oleh seseorang yang diketahui mempunyai cukup dasar untuk menduga bahwa apa yang dilakukannya itu adalah melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual pihak lain.

ayat 2 : Segala sesuatu mengenai hak dari pihak yang dikurangi Hak Atas Kekayaan intelektualnya itu tidak akan mengurangi kemampuan pihak ketiga atau pemerintah sendiri yang telah memberikan hak untuk memakai Hak Atas Kekayaan Intelektual tertentu, tanpa persetujuan dari pemilik yang sah. Dimungkinkan bahwa para anggota

membatasi supaya diberikan ganti rugi kepada si pemilik yang sah.

Pasal 45 TRIPs :

ayat 1 : Instansi peradilan berwenang berhak untuk memerintahkan pihak yang melakukan pelanggaran untuk membayar kepada pemegang hak yang sah Hak Atas Kekayaan Intelektual, uang ganti kerugian yang *wajar* untuk mengganti kerugian karena pelanggaran yang telah dilakukannya.

ayat 2: Instansi peradilan mempunyai wewenang untuk memerintahkan pihak yang kalah membayar ongkos-ongkos, termasuk biaya pengacara yang telah dikeluarkan olehnya untuk membela haknya di Pengadilan

Pasal 46 TRIPs lebih lanjut dikatakan sebagai berikut :

Instansi peradilan diberikan wewenang untuk memerintahkan, bahwa benda-benda yang telah terbukti sebagai obyek dari pelanggaran itu, tanpa *kompensasi* dimusnahkan dan dikeluarkan dari saluran perdagangan, untuk menghindarkan bertambahnya kerugian kepada pemilik yang sah dari Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Pasal 47 TRIPs :

Instansi peradilan akan diberi wewenang untuk memerintahkan kepada pihak yang melanggar supaya

memberitahukan kepada sipemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual identitas dari **pihak ketiga** yang terlibat dalam produksi dan distribusi dari benda-benda atau jasa-jasa yang palsu ini. Juga mengenai saluran distribusi mereka .

Pasal 48 Ayat 1 TRIPs :

Instansi peradilan berwenang untuk menentukan kepada pihak penggugat yang telah memohon prosedur pelaksanaan untuk mempertahankan Haknya, untuk kepada pihak yang ternyata telah digugat secara tidak pada tempatnya, sejumlah ganti kerugian yang wajar untuk penderitaan yang dialaminya, karena penderitaan disebabkan penyalahgunaan Hak oleh pihak penggugat. Pengadilan juga dapat memerintahkan bahwa sipemohon yang telah mengajukan gugatan **membayar** kepada pihak tergugat segala ongkos-ongkos dan biaya yang telah dikeluarkan untuk membela diri termasuk juga ongkos pengacaranya.

Selanjutnya **Pasal 50 ayat 1 TRIPs** mengatakan, bahwa :

ayat 1 : Instansi Peradilan berwenang untuk mengambil tindakan sementara (provisi) dengan segera dan efektif. Perintah ini dapat dilakukan pada peristiwa-peristiwa sebagai berikut :

sub. a : Untuk menghindari adanya kemungkinan pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, pihak penggugat terutama berkenaan dengan masuknya barang-barang palsu

dalam saluran perdagangan dapat bertindak. Benda-benda yang diimpor, segera setelah melampaui “ Bea Cukai “, dapat dihindarkan beredar lebih jauh.

sub.b. : Bahwa dapat diambil langkah - langkah untuk dapat mempertahankan alat - alat pembuktian berkenaan dengan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

3. Hak dan Kewajiban yang dimiliki Pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Pasal 51 TRIPs :

Para anggota TRIPs akan membuat prosedur untuk memberikan kesempatan bagi pemegang hak mempunyai alasan sah untuk menduga bahwa akan dilakukan *impor* dengan pemalsuan merek dagang atau benda-benda yang didapat dari membajak hak cipta (*Counterfeit trade mark or pirated copyright goods*) akan terjadi. Dalam hal yang demikian ia dapat mengajukan suatu permohonan secara tertulis kepada instansi yang berwenang, baik instansi administratif maupun instansi peradilan, agar dapat ditahan oleh bea cukai pengeluaran dari barang-barang ini agar tidak masuk dalam sirkulasi pasar bebas.

Pasal 52 TRIPs :

Pemegang hak yang hendak meminta supaya barang yang ditahan oleh pihak Pabean, harus memberikan pembuktian yang wajar agar dapat memenuhi persyaratan dari instansi yang berwenang , bahwa menurut hukum dari negara dimana impor akan dilakukan, terdapat kesan pertama (*prima facie*) pembuktian bahwa telah terjadi suatu pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual itu. Ia juga harus memberikan suatu **deskripsi** dari benda-benda bersangkutan secara mendetail agar dapat dilihat secara pasti oleh otoritas Pabean. Otoritas yang berwenang akan memberitahukan pihak pemohon dalam jangka waktu yang wajar, apakah mereka telah menerima permohonan ini dan apabila telah ditentukan oleh instansi yang berwenang, jangka waktu untuk mana pihak Pabean akan mengambil langkah-langkah ini.

4. Kewenangan Yang Dimiliki Oleh Pihak Pabean.

Pasal 57 TRIPs :

Dengan tidak mengurangi perlindungan dari informasi yang bersifat *confidential*, maka anggota peserta GATT dapat menunjuk instansi yang berwenang untuk memberikan kepada pemegang hak, kesempatan yang cukup untuk meninjau barang-barang bersangkutan yang telah ditahan oleh pihak Pabean. Pemilik Hak Atas Kekayaan Intelektual bersangkutan mempunyai wewenang untuk melakukan

inspeksi agar dapat menguraikan lebih lanjut tuntutan juga pihak importir diberikan kesempatan yang sama untuk menginspeksi barang bersangkutan apabila telah diambil suatu keputusan yang positif dalam pokok perkara, maka para anggota GATT ini dapat menentukan bahwa instansi yang berwenang, mempunyai otoritas untuk menyampaikan kepada sipemilik Hak Atas Kekayaan Intelektual nama-nama dan alamat dari pihak penerima barang, pihak importir dan yang telah melakukan pengiriman barang ini serta jumlah dari barang yang dipermasalahkan itu

Pasal 58 TRIPs :

Para anggota peserta TRIPs mensyaratkan bahwa instansi yang berwenang bisa bertindak atas inisiatif sendiri, tindakan menahan barang-barang ini supaya tidak masuk dalam peredaran bebas , apabila mereka mempunyai bukti secara sepintas (*prima facie*) , bahwa telah dilakukan suatu pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual maka dapat diambil tindakan-tindakan oleh instansi bersangkutan sebagai berikut :

- a. Ia dapat sewaktu - waktu mencari informasi dari pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dapat membantu instansi ini dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Pihak importir dan pemegang hak segera diberitahukan mengenai penahanan bersangkutan . Dimana pihak importir telah

lakukan banding terhadap penahanan barang ini kepada instansi yang berwenang, maka penahan ini akan juga tunduk pada ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam pasal 55 TRIPs yaitu mengenai jangka waktu selama sepuluh hari dan kemungkinan perpanjangan 10 hari lagi, maksimum 20 hari untuk adanya kemungkinan dilepaskannya barang yang bersangkutan.

- c. Para anggota peserta TRIPs hanya akan membebaskan instansi publik dan pejabat-pejabat mereka dari tanggungjawab untuk mengambil tindakan perlindungan dan proteksi Hak Atas kekayaan Intelektual ini, dimana telah dilakukan segala sesuatunya dengan itikad baik (*in good faith*).

Pasal 59 TRIPs :

Tanpa mengurangi lain-lain hak untuk mengambil langkah langkah bagi sipemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual, juga dengan adanya hak dari pihak tergugat untuk memperoleh peninjauan kembali (*review*) oleh peradilan, maka instansi yang berwenang akan mempunyai otoritas untuk memerintahkan bahwa benda-benda yang dipandang melanggar dimusnahkan. Pemusnahan ini dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam pasal 46 TRIPs, misalnya dalam hal pemalsuan merek. Berkenaan dengan merek dagang palsu maka instansi bersangkutan dilarang mengexport barang palsu ini ke negara lain atau menyimpan barang-

barang ini dan memasukan lagi dalam suatu prosedur Bea Cukai yang berbeda.

Dengan memperhatikan apa yang terurai perihal penegakan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam persetujuan TRIPs di atas, maka satu hal yang perlu kita kaji adalah sejauhmana hal tersebut bisa diadosi oleh peraturan perundang-undangan kita.

4. Perlindungan Hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Di Indonesia.

Sebagaimana diutarakan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*) merupakan isu baru dalam putaran URUGUAY (GATT), sehingga di dalam perdagangan internasional dan perjanjian-perjanjian multilateral aspek Hak Atas Kekayaan Intelektual sudah mulai dimasukkan dan dipersyaratkan, terutama disponsori oleh negara-negara yang sudah maju.

Negara-negara yang sudah maju tersebut sangat berkepentingan atas perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual mereka, sehingga cenderung mendorong berlakunya aturan-aturan yang melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual secara internasional.

Amerika Serikat misalnya, selalu aktif memantau mitra dagangnya di dalam pelaksanaan (praktek) ***perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak asasi manusia dan lingkungan hidup***

dengan mengkaitkannya dengan pemberian GSP (*Generalized System of Preference*). Berdasarkan Undang-undang Amerika Serikat sendiri tahun 1988, diatur bahwa pemerintah Amerika Serikat akan melakukan tindakan terhadap mitra dagangnya yang dianggap tidak memberikan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak asasi manusia dan lingkungan hidup.

Dengan adanya tekanan dari negara maju tersebut, maka negara-negara berkembang, termasuk Indonesia yang tidak mau kehilangan GSP yang diberikan dan asset pasarnya mulai memperhatikan aspek-aspek yang dikehendaki dalam perdagangan internasional.

Indonesia memiliki pengalaman bagaimana beberapa negara atau sekelompok negara pernah mengancam untuk ***menghentikan*** fasilitas ***GSP*** (*Generalized System of Preference*) yang diberikan terhadap beberapa komoditi ekspor Indonesia, misalnya ancaman EC (*European Community*) untuk mencabut fasilitas GSP yang diberikan kepada Indonesia, karena dituduh pengeksport kaset bajakan terbesar, dimana fasilitas GSP yang dinikmati sektor industri tekstil dari ekspor mereka ke Eropa, mencapai nilai kurang lebih US\$ 60 sampai dengan 80 juta padatahun 1982 ⁶⁴ Demikian juga Amerika Serikat pada bulan Maret 1995 akan

⁶⁴. Bambang Kesowo, Op. Cit. Hal. 34

membekukan pemberian GSP, karena Indonesia dianggap sebagai salah satu negara pelanggar hak cipta, khususnya produk perangkat lunak (*software*) komputer.⁶⁵ Bagi Indonesia dengan adanya ancaman tersebut, maka kelangsungan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat yang menggunakan fasilitas GSP sebesar 14 % atau kurang lebih US\$ 600 juta akan dikenakan biaya masuk di pelabuhan Amerika Serikat.

Atas dasar penilaian dan pertimbangan secara seksama, bahwa pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat memberikan pengaruh yang begitu luas terhadap sendi-sendi kehidupan bangsa, maka Presiden pada tanggal 30 Juli 1986 membentuk Tim Kerja yang kemudian dikenal sebagai **TIM KEPPRES 34** yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara dengan anggota wakil dari sejumlah Departemen, BPPT dan LIPI. Pada tingkat internasional tim ini bekerja sama dengan WIPO, sedangkan ditingkat nasional bekerja sama dengan sejumlah asosiasi terkait, seperti Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), Asosiasi Perekaman Nasional Indonesia (APNI), Ikatan Pemakai Komputer Indonesia (IPKIN) dan Persatuan Artis Pencipta Pemusik Rekaman Indonesia (PAPPRI)

Adapun tugas dari Tim tersebut adalah meneliti, mempelajari dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala

⁶⁵ Kompas, 15 Maret 1995.

permasalahan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Tugas tim tersebut meliputi penyelesaian segala permasalahan yang timbul dalam kaitannya dengan pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta, Undang-undang Merek Dagang dan Perniagaan serta mempercepat penyelesaian penyusunan Undang-undang Paten.

Sejak pembentukannya, prioritas penanganan diberikan kepada penyelesaian permasalahan di bidang Hak Cipta. Dari hasil pemantauan tim Keppres tersebut, kemudian dapat disimpulkan beberapa hal antara lain : ⁶⁶

pertama : Pelanggaran terhadap Hak Cipta terutama yang berupa pembajakan, dinilai telah mencapai titik yang membahayakan kreatifitas pencipta.

Ke dua : Ancaman pidana dalam Undang-undang NO. 6 tahun 1982 tentang hak cipta dinilai terlalu ringan dan penerapannya dinilai terlalu lunak. Hal ini menjadikan undang-undang tersebut tidak mampu lagi berperan sebagai penangkal tindak pidana pembajakan hak cipta.

Ke tiga : Dirasakan kurangnya koordinasi dan kesamaan pandangan, sikap, serta tindakan diantara aparat penegak hukum dalam menghadapi masalah pelanggaran hak cipta tersebut.

⁶⁶. Bambang Kesowo, Op. Cit. Hal. 20.

Ke empat : Masih kurangnya tingkat pemahaman mengenai arti dan fungsi hak cipta serta ketentuan-ketentuan Undang-undang hak cipta dikalangan masyarakat pada umumnya dan bahkan dikalangan pencipta pada khususnya.

Bertolak dari kesimpulan diatas Tim Kepres setelah meneliti , kemudian mengadakan perubahan ketentuan dalam Undang-undang hak cipta . Bersamaan dengan itu langkah-langkah koordinasi telah pula dilakukan pemerintah dan Mahkamah Agung, yang menghasilkan keluarnya Surat Edran Mahkamah Agung kepada para Ketua Pengadilan Negeri yang menginstruksikan agar terhadap pelanggaran hak cipta diterapkan pidana yang berat . Hakekatnya yang ingin diterapkan adalah prinsip yang lazim dikenal dengan intilah “ **Minimum Sentencing** ”⁶⁷

Selain itu kepala kepolisian RI telah pula memberikan intruksi kepada seluruh jajaran kepolisian untuk mengambil **tindakan tegas** terhadap pelanggaran hak cipta.

Sebagaimana diketahui, sebelum pembentukan Tim Keppres 34, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan di bidang hak milik intelektual sebagai berikut :

1. Dalam Bidang **Hak Cipta**, yaitu Undang-undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta yang diundangkan pada tanggal 12 April 1982.

⁶⁷ . Ibid.

Prinsip Minimum Sentencing misalnya kalau untuk pelanggaran hak cipta diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, maka kepada pelanggaran yang terbukti bersalah dijatuhi pidana penjara yang lamanya tidak kurang 1 tahun.

2. Dalam Bidang **Paten**, yaitu dengan dikeluarkannya pengumuman pemerintah Nomor J.S. 5/ 41/4 tanggal 12 Agustus 1953 yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pendaftaran sementara Oktroi sambil menunggu diundangkannya undang-undang tentang Oktroi.
3. Dalam Bidang **Merek**, yaitu Undang-undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961.
4. Dalam Bidang **Desain Produk Industri**, tercantum dalam pasal 17 Undang-undang NO. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, namun pelaksanaannya masih perlu diatur dengan suatu Peraturan Pemerintah.

Dengan telah dibentuknya Tim Keppres 34, maka dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan di bidang hak milik intelektual di atas, sebagai berikut :

1. Dalam Bidang **Hak Cipta**, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, pada tanggal 19 September 1987.
2. Di Bidang **Paten**, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 1989 tentang Paten pada tanggal 1 Agustus 1991.

3. Di Bidang **Merek**, telah diundangkan Undang - undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993 menggantikan Undang-undang nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Pemiagaan.
4. Dalam Bidang **Desain Produk Industri**, telah selesai disusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desain Produk Industri dan telah disampaikan pada Sekretariat Negara.

Perubahan dan penyempurnaan Undang-undang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual di atas, pada dasarnya merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan **perlindungan hukum** terhadap hak atas kekayaan intelektual baik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri maupun negara asing yang digunakan dan dioperasikan di Indonesia.

Meskipun masalah perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk masih baru, namun adanya peraturan-peraturan baru sebagai penyempurnaan Tim Keppres 34, setidaknya dapat merubah persepsi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan kemudian menerapkannya dalam praktek bisnis sehari-hari. Pemasyarakatan dan penerapan perlindungan Hak atas kekayaan intelektual harus terus dilakukan agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran baik oleh sesama pengusaha nasional maupun pengusaha nasional dan mitra dagangnya dari negara lain.

Disamping itu penyempurnaan undang-undang di bidang hak atas kekayaan intelektual di atas merupakan persiapan berlakunya persetujuan mengenai TRIPs di forum internasional atau diantara negara-negara anggota GATT.

Masalah perlindungan hak atas kekayaan intelektual merupakan suatu hal yang seharusnya diberikan kepada pemilik hak tersebut dengan pertimbangan, karena setiap penciptaan atau penemuan pada dasarnya selalu melibatkan faktor **tenaga, waktu dan biaya**. Tidak jarang, bahwa kegiatan penelitian dan pengembangannya berlangsung cukup lama, sehingga bila dinominalkan akan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Nilai ekonomi ini akan menjadi lebih tampak lagi karena adanya manfaat ekonomi di bidang tertentu yang ditemukan, misalnya karena dapat menghasilkan suatu produk.

Disamping itu perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual dapat mendorong timbulnya hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam bidang **hak cipta**, akan merangsang pencipta untuk menghasilkan karya ciptaan-ciptaan baru dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dalam bidang ilmu pengetahuan, misalnya dapat merangsang alih ilmu pengetahuan dari negara yang satu ke negara lain melalui penerbitan dan peredaran buku-buku ilmu pengetahuan. Dengan kata lain perlindungan hukum di bidang hak cipta dapat berperan dalam bidang pendidikan serta

pengadaan tenaga terampil dan tenaga ahli atau dalam pengembangan sumber daya manusia.

Disamping itu dapat pula mendorong penanaman modal dan merangsang pertumbuhan industri-industri tertentu yaitu yang lebih dikenal dengan "**Copyright based industries**", seperti industri percetakan, industri perfilman dan industri rekaman.

2. Di bidang **Paten**, akan mendorong penemu (*inventor*) untuk menghasilkan penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi, karena penemu atau pemegang paten menikmati hak khusus yang bersifat ekonomi.
3. Di bidang **merek**, secara tradisional merek dapat dilihat sebagai alat dari produsen untuk menciptakan "**good will**" dan "**brand loyalty**" diantara para konsumen. Hal ini penting bagi keberadaan dan pengembangan perusahaan industri.

Disamping itu dapat pula memberikan manfaat lain yaitu mendorong alih teknologi, menyediakan informasi produk serta perlindungan kepada konsumen.

Dengan adanya perlindungan hukum di bidang merek, maka pembajakan dapat dihindari. Hal ini akan mendorong perusahaan di negara maju untuk mengalihkan penemuannya ke negara berkembang sebab mereka mendapat jaminan bahwa produk-produk yang dipasarkan dengan merek terkenalnya akan dikenal

masyarakat konsumen. Dan pada gilirannya konsumen juga akan terlindungi, sehingga mempunyai dampak positif dalam menggiatkan ekonomi yang bermanfaat bagi perusahaan industri.

4. Dalam bidang ***Desain Produk industri***, akan dapat mendorong terciptanya penemuan-penemuan baru yang dapat meningkatkan perekonomian. Hal ini disebabkan karena desain produk industri terkait dengan kegiatan perdagangan yang menunjang pengembangan industri. Suatu desain produk industri yang berhasil menarik minat konsumen, tentu akan laris terjual, sehingga sangat terkait dengan penciptaan pasar.

Dengan melihat manfaat yang diperoleh dari adanya perlindungan hak atas kekayaan intelektual di atas, maka sebenarnya kebutuhan akan perlindungan merupakan sesuatu yang wajar. Bukankah merupakan hal yang jamak, apabila seseorang menginginkan agar hak-hak atas kekayaan yang dimiliki diakui dan dihormati dan dapat dipertahankan dari tindakan yang melawan haknya.

Perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual ini pada dasarnya berintikan pengakuan terhadap hak kekayaan tersebut dan hak untuk dalam kurun waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan tadi. Selama kurun waktu tertentu orang lain hanya

dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas izin pemilik hak.

Adanya perlindungan seperti itu dimaksudkan agar pemilik hak dapat mengeksploitasi kekayaan tadi dengan aman. Pada gilirannya, rasa aman itu kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang dapat berkarya guna menghasilkan ciptaan atau temuan-temuan berikutnya yang dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

B. Pendekatan Sistem Kebijakan Sebagai Suatu Metode Analisis.

1. Antisipasi Perkembangan Kejahatan Ekonomi Dalam Era Globalisasi.

Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan masyarakat dunia di era globalisasi disamping menghasilkan keluaran-keluaran *positip* di berbagai kehidupan, terkandung pula di dalamnya implikasi yang bersifat *negatif* sebagai akibat dari adanya perubahan dan pergeseran tata kehidupan dan tata nilai yang berkembang dalam masyarakat. Implikasi negatif ini antara lain berwujud kejahatan yang sering meresahkan dan merugikan masyarakat, termasuk peningkatan kejahatan ekonomi baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Apa yang dikenal dengan kejahatan - kejahatan di bidang ekonomi (*economic crimes*), merupakan salah satu jenis kejahatan yang menjadi isyu cukup sentral baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional. Untuk itu dalam hubungan dengan masalah yang sangat kompleks inilah lewat kongres - kongres PBB mengenai " *the prevention of crime and the treatment of offenders* ", membicarakan/ menyoroti masalah bentuk-bentuk dan dimensi

kejahatan ini dengan tema “ Kejahatan dan Pembangunan (*Crime Against Development*), Kejahatan terhadap kesejahteraan sosial (*Crime Against Social Welfare*) Dan Kejahatan terhadap kualitas lingkungan hidup (*Crimes Against the Quality of Live*). Termasuk dalam katagori kejahatan-kejahatan yang demikian adalah kejahatan ekonomi.

Perhatian yang cukup besar dari bangsa-bangsa terhadap kejahatan itu sangatlah wajar oleh karena kejahatan tersebut secara langsung berhadapan dan mengancam program pembangunan (ekonomi) negara. Secara khusus dikemukakan bahwa pengaruh atau dampak negatif dari kejahatan dimaksud sangat merintangi bahkan menggagalkan program pembangunan negara-negara yang sedang berkembang. Hal ini nampak dari pernyataan Prof. Khalig Nagwi pada kongres PBB ke lima di Geneva tahun 1975 sebagai berikut :

“ offences against the economy had increased significantly in the recent past and had become the most important componen of the national crime situation, particularly in the developing countries. Such crimes adversely affected the basic economic structure and trough their impact savings, investment, rate of interest, foreign

*exchange availability and hence levels of output and employment, had negatively stressed the distribution of national income."*⁶⁸

Pengaruh negatif dari delik-delik di bidang ekonomi terutama di negara-negara sedang berkembang telah dikemukakan dalam laporan kongres PBB ke 7, bahwa kejahatan sebagai produk sosial disebabkan oleh beraneka ragam faktor dan diantaranya faktor ekonomilah yang memegang peranan utama.⁶⁹ Selanjutnya dikemukakan pula, bahwa pengaruh atau dampak negatif dari kejahatan-kejahatan terhadap program pembangunan nasional di negara-negara sedang berkembang sangatlah jelas dan berbahaya. Di negara-negara sedang berkembang, program-program pembangunan nasional sangat dirintangi oleh semakin meningkatnya kejahatan-kejahatan ekonomi (*economic crimes*) seperti penggelapan, penipuan, penyelundupan, penghindaran pajak, penyalahgunaan bantuan (milik umum dan negara), korupsi yang merajalela, penyuapan dan penyalahgunaan kekuatan-kekuatan ekonomi oleh korporasi nasional dan transnasional.⁷⁰

⁶⁸ . Lihat Barda Nawawi Arief, **Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Ekonomi**. Makalah pada Seminar Nasional "Peranan Hukum Pidana Dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi", Semarang, 7 Desember 1990, halaman. 3.

⁶⁹ .Seventh UN Congress On the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Report, (New York, United Nations, 1986), halaman 112, No. 59.

⁷⁰ . Ibid. halaman 113 No. 61.

Sebenarnya apa yang dinamakan kejahatan ekonomi itu lebih merupakan sebuah konsep tentang kejahatan di bidang ekonomi yang meliputi bidang yang sangat luas.⁷¹ Oleh karena itu muncul berbagai istilah seperti : *Economic Crimes, economic Criminality, Business Crimes, Abuse of economic power* atau *economic Abuse*, yang pada prinsipnya hendak menggambarkan apa yang disebut kejahatan ekonomi itu. Dengan demikian hingga sekarang belum ada satu definisipun yang secara umum dianggap cukup memadai untuk menggambarkan secara lengkap tentang kejahatan tersebut.

Walaupun demikian, beberapa ahli dengan sudut pandang dan istilah tertentu telah mencoba mendefinisikan dan mengidentifikasi lingkup kejahatan dari kejahatan ekonomi itu, yang antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :

Di dalam ensiklopedi, *crime and justice*, vol. 2 (1983: 671) *economic crime* didefinisikan sebagai : " *criminal activity with significant similarity to the economic activity of normal, non criminal business* "(kegiatan kriminal yang memiliki kesamaan

⁷¹ .Apabila kita bandingkan dengan perumusan dalam UU drt no. 7 tahun 1955 bisa dikelompokkan dalam *economic crime* dalam arti sempit. Hal ini disebabkan undang-undang tersebut secara substansil hanya memuat ketentuan yang mengatur sebagian kecil dari kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Bahkan relevansi dari ketentuan tersebut masih harus dipersoalkan terutama dalam konteks kegiatan ekonomi di era globalisasi.

tertentu dengan kegiatan ekonomi pada umumnya, yaitu kegiatan usaha yang nampak non kriminil).⁷²

Sedangkan *American Bar Association* (dikutip dari Hagan, 1989 : 101) memberikan batasan mengenai *economic crime* : " *any nonviolent, illegal activity which principally involved deceit, misrepresentation, concealment, manipulation, breach of trust, subterfuge, or illegal circumvention* " (setiap tindakan illegal tanpa kekerasan, terutama menyangkut penipuan, perwakilan tidak sah, pembunuhan, manipulasi, pelanggaran kontrak, tindakan curang atau tindakan menjebak secara illegal).⁷³

Conklin telah mempergunakan istilah " *business Crimes*" dan merumuskan *business crime* sebagai berikut :

" *...an illegal act, punishable by a criminal sanction which in committed by an individual or corporation in the cause of a legitimate, occupation or pursuit in the industrial or commercial sector for the purpose of : Obtaining money or property, or obtaining business or personal adverteage* ".⁷⁴

⁷² Romli Atmasasmita, **Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi**, Bahan Penataran "Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi", Fakultas hukum UNPAR, 26-27 Agustus 1994, halaman 18.

⁷³ Ibid. 19.

⁷⁴ Secara bebas diterjemahkan oleh Barda sebagai " suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi dalam pekerjaannya yang sah atau dalam pencarian/ usahanyadi bidang industri dan perdagangan; untuk tujuan mendapatkan uang atau kekayaan, menghindari pembayaran uang atau menghindari kehilangan atau kerugian kekayaan atau memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi (Lihat Barda, Op.Cit, h.5).

Sedangkan Hoebert mengidentifikasikan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai ***business crime*** sebagai berikut :

- a. *Bankruptcy (concealment or transfer of property; false statement in proceedings; false claims of creditors; planned bankruptcies);*
- b. *Bribery;*
- c. *Computer crime;*
- d. *False Crimes against the government;*
- e. *Food, drug, and cosmetics act offences;*
- f. *Violation of securities laws;*
- g. *Monopolies and Antitrust Offences;*
- h. *Embezzlement and theft.* ⁷⁵

Dalam pada itu Sunaryati Hartono berpendapat bahwa istilah dan pengertian "*economic crimes*" lebih luas dari "*business crimes*". Dan menurutnya, dengan mengikuti pendapat Finn dan Alan R. Hoffman, akibat dari kejahatan ekonomi terhadap masyarakat sangat besar tidak hanya secara ekonomis tetapi juga secara sosial bahkan mempunyai dampak politik. ⁷⁶

⁷⁵ . Barda Nawawi Arief, Ibid. h. 6

⁷⁶ .Sunaryati Hartono, **Kemungkinan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Praktek-praktek Bisnis Internasional**, Kertas Kerja Seminar "Aspek-Aspek Pidana Dalam Kegiatan Dunia Usaha", Jakarta, 2-3 Oktober 1985, halaman 3.

Selanjutnya menurut Sunaryati Hartono disamping *Business Crimes* dikenal pula istilah *business torts* (perbuatan melawan hukum di bidang bisnis), yaitu perbuatan-perbuatan tidak terpuji dari para usahawan yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak perusahaan lain. Beberapa contoh *business torts* yang dikemukakan Sunaryati Hartono dengan bersumber dari Hoeber, antara lain : ⁷⁷

- a. Membuka usaha secara melawan hukum, misalnya membuka perusahaan semata-mata untuk tujuan mematikan usahawan lain yang menjadi musuhnya.
- b. Mencegah atau mengganggu terjadinya kontrak.
- c. Penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang atau perusahaan lain (*defamation*) atau pencemaran mutu barang perusahaan lain (*slander of quality atau trade libel*).
- d. Praktek-praktek perdagangan yang curang/ tidak jujur (*unfair trade practices*), antara lain :
 - pemasaran curang (*fraudulent marketing*);
 - pelanggaran merek dan nama dagang (*infringing a trademark or trade name*);
 - pelanggaran rahasia perdagangan (*violating trade secrets*).

⁷⁷. Ibid. halaman. 5.

Dengan berpijak pada uraian di atas berkaitan dengan bentuk-bentuk kejahatan ekonomi ada yang mengelompokkan ke dalam tiga jenis pokok kejahatan ekonomi (*three major types of economic crime*). yaitu : ⁷⁸

- a. *Property crimes*, yaitu perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan harta benda / kekayaan seseorang atau negara (*acts that threaten property held by private persons or by the state*)
- b. *Regulatory crimes*, yaitu perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan pemerintah (*actions that violate government regulations*); dan
- c. *Tax crimes*, yaitu pelanggaran mengenai pertanggungjawaban atau pelanggaran syarat-syarat yang berhubungan dengan pembuatan laporan menurut Undang-undang pajak (*violations of the liability or reporting requirements of the tax laws*).

Dengan mengamati dan memahami apa yang dikatakan lewat kutipan-kutipan di atas perihal kejahatan ekonomi, tampak bahwa ruang lingkup dari *economic crime* meliputi : korupsi, pelanggaran pajak, delik-delik lingkungan, penipuan, penggelapan, penyuapan, kejahatan di bidang perkreditan,

⁷⁸ Lihat Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Hukum Pidana** , Bandung, Alumni, 1992, halaman 156, dimana beliau mengutip pendapat dari Sanford H Kadish (ed), **Encyclopedia of crime and justice** (London : Collier Mac Millan Publishers, halaman 672-673.

kejahatan di bidang ketenagakerjaan dan penyalahgunaan oleh korporasi.

Oleh karena itu dengan mengingat luasnya ruang lingkup dari kejahatan ekonomi, maka tampak masih adanya perbedaan persepsi dan penamaan terhadap istilah *economic crime*. Namun demikian satu hal kiranya yang perlu digaris bawahi bahwa ***ciri terpenting*** dari *economic crime* ialah proses pemilikan harta benda dan kekayaan secara licik atau dengan penipuan dan beroperasi secara diam - diam (tersembunyi) dan sering dilakukan oleh perorangan yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi ⁷⁹ dengan motif dan tujuan untuk mendapatkan ***keuntungan*** yang sebesar-besarnya.

Sementara itu dalam salah satu laporan dari kongres PBB ke enam di Caracas, Venezuela 1980 dikatakan bahwa, bentuk-bentuk pelanggaran atau penyalahgunaan di bidang ekonomi (*economic abuses*) termasuk bentuk-bentuk pelanggaran yang sulit dijangkau oleh hukum. ⁸⁰

⁷⁹ .Romli Atmasasmita, Op.Cit. hal. 23.

Bandingkan dengan Muladi, definisi dan ruang lingkup kejahatan ekonomi adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum, tanpa menggunakan kekerasan, bersifat melawan hukum, yang hakekatnya mengandung unsur-unsur penipuan, memberikan gambaran salah, penggelapan, manipulasi, melanggar kepercayaan, akal-akalan atau pengelakan peraturan (Muladi, **Konsep Indonesia Tentang Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi**, Bahan Penataran "Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi", Fakultas Hukum UNPAR, 26-27 Agustus 1994.

⁸⁰ . Ibid, halaman 14. Menurut Kongres, aparat penegak hukum relatif tidak berdaya atau mempunyai kekuatan menghadapinya (*white collar crime*-pen), karena dua alasan utama yaitu, ***pertama***, kedudukan ekonomi atau politik yang kuat dari si pelaku. ***ke***

Kesulitan tersebut dapat dimengerti oleh karena ***karakteristik atau corak pokok***⁸¹ dari pelanggaran di bidang ekonomi termasuk apa yang disebut ***white collar crime***⁸² yang oleh Sutherland didefinisikan sebagai suatu pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status ekonomi sosial tinggi (*Upper Socio Economic Class*) dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaannya (*in course of his occupational activities*), atau kejahatan yang dilakukan oleh orang berkerah putih/ orang terhormat.⁸³

dua, keadaan-keadaan sekitar perbuatan yang mereka lakukan itu sedemikian rupa sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk dilaporkan atau dituntut.

⁸¹ Edmund W Kitch (di dalam Ency.of Cr & J ; 1983-671) mengemukakan ada tiga karakteristik dari *economic crime* yaitu sebagai berikut : ***pertama***, pelaku menggunakan modus operandi yang sulit dibedakan dengan modus operandi kegiatan ekonomi pada umumnya; ***ke dua***, tindak pidana ini biasanya melibatkan pengusaha-pengusaha yang sukses dalam bidangnya dan ***ke tiga***, tindak pidana ini memerlukan penanganan atau pengendalian secara khusus dari aparaturnya penegak hukum pada umumnya. (dikutip dari Romli Atmasasmita, Op. Cit. halaman. 24.

⁸² Sebenarnya ada dua corak pokok dari kejahatan ekonomi (*two major styles of economic crime*), yaitu sebagai *white collar crime* dan sebagai *organized crime*). Walaupun sebenarnya kedua istilah atau label ini saling berhubungan erat dan oleh karena itu sering disebut bersama-sama. Bila dilihat dari perbandingan dari karir kriminal pelakunya, nampak pada ***corporate crime***, memiliki status sosial tinggi di dalam masyarakat. *Corporate crime* identik dengan konsepsi *white collar crime* dan *business crimes*. *Corporate crime* bukan suatu organisasi kejahatan melainkan suatu kelompok dunia usaha dan dapat dilakukan oleh perorangan (direktur-direktumnya) atau oleh perusahaan itu sendiri. ***Organized crime***, kejahatan sebagai mata pencaharian kriminal terasing dari masyarakat. Konsep diri sebagai penjahat berkembang pesat. Tipe *Organized crime* selalu berkelompok dan memiliki pimpinan serta memang merupakan suatu organisasi kejahatan. (lihat Romli Atmasasmita. Op.Cit. halaman 22.

⁸³ Sutherland hendak menunjukkan bahwa kejahatan merupakan fenomena yang juga dapat ditemukan dalam kelas-kelas masyarakat yang lebih tinggi, yang penyebabnya tidak dapat dijelaskan secara tradisional, seperti kemiskinan atau faktor-faktor patologik yang bersifat individual (Lihat Muladi, Politik Kriminil Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan Dalam Kerangka Tindak Pidana Ekonomi, makalah pada seminar "Tindak Pidana di Bidang Perbankan", diselenggarakan atas kerjasama Undip dan Kejagung RI, Semarang, 11-12 Juni 1990, halaman 2.

Salah satu bagian dari *White Collar Crime* yang perlu diantisipasi di era globalisasi perdagangan adalah peran korporasi⁸⁴. Hal ini didasari oleh beberapa pertimbangan :

1. korporasi memiliki peranan dan kekuasaan yang penting dalam berbagai segi kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi atau yang berkaitan dengan dunia bisnis (*business related activities*).

Dewasa ini bagian terbesar dari korporasi adalah konglomerat, yang memimpin berbagai industri raksasa, guna memenuhi segala macam kebutuhan hidup. Kekuasaan korporasi dalam bahasa ekonomi dijalankan melalui keputusan-keputusan dalam investasi, penentuan harga, lokasi, penelitian dan desain terhadap produk, sehingga kekuasaan tersebut mempunyai akibat di bidang sosial dan politik seperti di bidang ketenagakerjaan, persoalan-persoalan yang menyangkut kehidupan masyarakat serta kualitas hidup manusia pada umumnya. Oleh karenanya tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kekuasaan korporasi yang luar biasa ini di dalam pelaksanaannya mempunyai pengaruh

⁸⁴ Menurut pendapat kami tindak pidana korporasi adalah sebagian dari *white collar crime* (WCC). Hal ini untuk membedakannya dari pelanggaran hukum pidana atau ketentuan pidana yang dilakukan oleh perusahaan atau usaha dagang yang berlingkup kegiatan ekonomi atau bisnis dengan skala kecil atau terbatas. (Lihat Mardjono Reksodiputro, "**Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan** ", Jakarta, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994, halaman. 103-105.

besar bagi kehidupan setiap orang sejak dalam kandungan hingga ke liang kubur.⁸⁵ Hal ini menunjukkan bahwa hidup dan segala kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang keselamatan, kesehatan dan kenyamanan maupun harga yang harus dibayar sepenuhnya dikontrol oleh korporasi.

2. peran korporasi sebagai organisasi yang tujuan utamanya mencari keuntungan sebesar- besarnya menjadikan korporasi bersifat kriminogen. Hal ini ditunjukkan dengan untuk selalu hidup dan berprestasi, sehingga akan membawa korporasi untuk berusaha mengurangi ketidakpastian, yaitu menghilangkan hal-hal yang dianggap dapat menghalangi tercapainya tujuan utama korporasi, yakni memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk itulah dalam menghadapi hambatan-hambatan, seperti persaingan dengan sesama produsen, peraturan-peraturan dan penegakan hukumnya, korporasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang berupa mematuhi peraturan yang ada atau melanggarnya maupun melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan konsumen dan masyarakat luas.

3. kejahatan korporasi yang semakin canggih baik bentuk

⁸⁵. I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Op.Cit. halaman 21.

ataupun jenisnya maupun modus operandinya yang sering melampaui batas-batas negara (*transborder crime*), seperti penipuan terhadap konsumen berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang dikemas indah dan diijakan lewat advertensi secara besar-besaran dan berbagai pola kejahatan korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran. Penyamaran dilakukan sedemikian rupa, sehingga masyarakat tidak menduga bahwa suatu korporasi yang beroperasi dalam masyarakat secara sah dan baik-baik itu adalah topeng yang menyembunyikan wajah kejahatan. Secara garis besar kejahatan yang dapat dilakukan oleh korporasi dapat dibagi menjadi tiga kelompok, antara lain :

1. Perusahaan kedok, yaitu yang didirikan memang untuk menutupi kegiatan kejahatan, apabila terbongkar, maka perusahaan segera bubar.
2. Perusahaan yang sah, yaitu yang melakukan kegiatan kejahatan sebagai bisnis sampingan, sebagian kegiatan bisnisnya adalah sah, secara teratur perusahaan ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan.
3. Perusahaan sah, dan pemilik serta pengurusnya selalu

bergerak dalam bidang kegiatan-kegiatan bisnis yang sah, namun mereka membiarkan dan memanfaatkan adanya kegiatan kejahatan yang berada disekitar mereka.

Keadaan ini secara internasional telah mendapat perhatian melalui upaya-upaya PBB dan karena itu lahirlah beberapa konvensi internasional yang mengatur prinsip-prinsip dan kerjasama di dalam pencegahan atau penanggulangan kejahatan tersebut. Sebagai contoh : *Organized crime* (dokumen A / CONF. 144 / L.G / rev.1) ditetapkan perlunya dibentuk kerjasama ilmiah dan teknis untuk menanggulangi berbagai macam kejahatan. Kejahatan-kejahatan *organized crime* telah semakin berbahaya karena telah menggunakan peralatan canggih disamping diorganisasi dengan rapi, sehingga harus pula dihadapi dengan peralatan canggih serta metoda-metoda pencegahan dan pemberantasannya yang *up to date*.

4. Kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi adalah sangat luar biasa besarnya, khususnya bila diperbandingkan dengan kejahatan konvensional atau warungan, seperti perampokan, pencurian dan penipuan. Misalnya perkiraan yang dilakukan oleh *Subcommittee on Antitrust and Monopoly of the U.S. Senate Judiciary Committee* yang diketuai oleh

Senator Philip Hart memperkirakan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi antara 174-231 miliar dolar per tahun jauh bila dibandingkan dengan kejahatan konvensional yang berkisar sekitar 3-4 miliar.⁸⁶

Berkaitan dengan peranan dan kekuasaan korporasi dalam menjalankan perannya, kiranya yang perlu diantisipasi di era globalisasi adalah munculnya masalah-masalah kejahatan-kejahatan bentuk-bentuk baru yang dilakukan oleh korporasi yang digerakkan oleh pengusaha terhormat yang membawa dampak sangat negatif pada perekonomian negara.

Adapun sumber-sumber masalah serta bentuk-bentuk kejahatan-kejahatan yang dihasilkannya adalah :⁸⁷

1. Persaingan.

Ekonomi pasar bebas menghasilkan persaingan yang cukup keras, sehingga mendorong untuk selalu menghasilkan penemuan - penemuan (baru) di bidang teknologi, struktur harga, teknik pemasaran , merger dan perluasan pasar.

Di sisi lain, dalam menghadapi persaingan itu korporasi juga melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghasilkan

⁸⁶ . Lihat R.C. Kramer, " **Corporate Criminality, The Development of an Idea** ", dalam Hochstedler ed halaman 13-38, Dikutip dar I.S. Susanto, **Kejahatan Korporasi**, hal. 23.

⁸⁷ . I.S. Susanto, **Antisipasi Perkembangan Kejahatan Di Bidang Ekonomi**, Penataran "Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi", Fakultas Hukum UNPAR, 26-27 Agustus 1994, halaman. 4

kejahatan di bidang bisnis seperti memata-matai produsen lain yang melanggar hak atas kekayaan intelektual, kompetisi yang tidak sehat, membajak/memalsukan hak paten, merek, melakukan penyuapan dan korupsi kepada pejabat dalam rangka memperluas dan memperoleh pemasaran baru. Bentuk kejahatan lainnya dalam menghadapi persaingan itu adalah "pencaplokan" oleh perusahaan besar (biasa berupa merger atau akuisisi).

2. Pemerintah.

Industrialisasi memerlukan campur tangan pemerintah baik berupa peraturan-peraturan baru maupun berupa dijalankannya peraturan-peraturan yang sudah ada dengan lebih " **keras** ".

Dalam menghadapi keadaan yang demikian, kejahatan yang dilakukan oleh korporasi atau kalangan bisnis dapat berupa memberikan dana kampanye yang bersifat ilegal kepada politisi dengan imbalan janji-janji yang menguntungkan korporasi, menyuap pejabat untuk tidak melaksanakan peraturan yang merugikannya, mengekspor perbuatan yang ilegal (sebagai hasil dari pemalsuan atau pembajakan Hak Atas Kekayaan Intelektual) ke negara lain.

3. Buruh.

Sumber masalah yang cukup besar lainnya yang dihadapi korporasi atau kalangan bisnis dewasa ini dan dimasa mendatang adalah masalah perburuhan, seperti tuntutan terhadap kenaikan upah, perbaikan kondisi kesehatan dan keselamatan kerja, khususnya yang dilakukan oleh buruh/organisasi buruh yang militan maupun karena ada peraturan tentang itu.

Di sisi lain, masalah perburuhan ini dapat menghasilkan kejahatan di bidang bisnis, seperti membayar upah di bawah ketentuan upah minimal, menolak untuk memperbaiki kondisi kesehatan dan keselamatan kerja, PHK yang melanggar hukum. Melalui optik lain, masalah perburuhan ini juga dapat dipandang sebagai kejahatan terhadap HAM.

4. Konsumen.

Kenyataan menunjukkan bahwa industrialisasi menawarkan aneka ragam produk serta " perubahan " produk yang sangat cepat, sehingga mempengaruhi dan mendorong timbulnya " kebutuhan " akan produk yang selalu berubah-ubah.

Dalam kondisi demikian, maka kejahatan di bidang ini dapat berupa iklan yang menyesatkan, pembajakan merek yang diminati konsumen, menjual produk yang tidak melalui pengujian,

sehingga dapat membahayakan konsumen, menjual produk yang kadaluarsa atau menjual harga yang berlebihan (karena monopolistik).

5. Publik.

Meningkatnya tuntutan untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas hidup dan lingkungan, seperti udara bersih, air bersih serta perlindungan terhadap sumber-sumber alam yang langka, di sisi lain dapat menampakkan tindakan korporasi yang merusak lingkungan, sehingga dapat menghasilkan kejahatan yang dilakukan korporasi di bidang lingkungan hidup, seperti pencemaran, pengurasan sumber alam yang langka. Disamping itu dalam menghadapi publik, korporasi dapat melakukan kolusi dengan pejabat untuk menekan demokrasi.

Dengan melihat kenyataan yang ada mengenai berbagai aspek yang menyangkut kejahatan di bidang ekonomi, khususnya yang dilakukan oleh korporasi, nampaknya kejahatan itu masih akan mewarnai, bahkan semakin meningkat di masa yang akan datang. Untuk itu upaya atau bentuk kontrol yang bagaimanakah yang diperlukan untuk menghadapi kejahatan tersebut. Memang tidak mudah untuk dijawab. Kesulitan

penegakan hukum atau pengendalian kejahatan korporasi antara lain disebabkan oleh:

pertama, korporasi (sebagai pelaku kejahatan yang potensial) pada umumnya mempunyai “ lobby” yang efektif dalam usaha perumusan delik maupun cara-cara menanggulangi kejahatan korporasi.⁸⁸

Ke dua, menentukan kesalahan korporasi tidak mudah, oleh karena selalu dilakukan secara rahasia dan seringkali korban tidak mengetahui kerugian yang telah dialaminya.

Namun demikian apakah ini berarti kejahatan yang dilakukan oleh korporasi yang cukup merugikan dan mengacaukan tata perekonomian negara akan dibiarkan berlangsung terus. Kiranya, meskipun tidak terlalu berharap

⁸⁸. Lihat I.S. Susanto, **Kejahatan Korporasi**, Op.Cit. hal. 33, mengatakan secara umum kekuasaan korporasi dipakai untuk mencapai **tiga tujuan** yang saling berkaitan :

1. Dipakai untuk menahan atau menjaga agar tindakan korporasi yang illegal berada di luar peradilan pidana. Dalam hubungan ini korporasi akan berusaha agar tindakan-tindakan yang illegal tidak diperiksa atau diselesaikan lewat peradilan pidana, akan tetapi diselesaikan lewat badan administratif. Sebab mempengaruhi atau campur tangan terhadap badan administratif relatif lebih mudah dilakukan untuk disesuaikan dengan kepentingannya daripada terhadap peradilan pidana.
2. Keputusan bekerjanya badan administratif itupun merupakan subyek dari campur tangan kekuasaan korporasi. Atas tindakan korporasi yang melanggar hukum , maka korporasi akan berusaha agar tindakan atau keputusan badan administratif yang dikenakan kepadanya tidak atau seminimal mungkin merugikan kepentingannya.
3. Kekuasaan korporasi dipakai mencegah tindakan-tindakan tertentu dari korporasi yang merugikan masyarakat dijadikan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana. Dengan cara ini menghasilkan langkanya tindakan-tindakan korporasi yang merugikan masyarakat dijadikan tindak pidana, akibatnya tindakan-tindakan korporasi yang merugikan masyarakat menjadi sah atau legal.

banyak perlu kiranya dicarikan solusi terbaik dalam penanggulangannya. Masalahnya sekali lagi upaya-upaya apa yang perlu dilakukan untuk merealisasikan harapan tersebut.

2. Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Kejahatan Ekonomi di era globalisasi.

Kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁸⁹ Definisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai " *the rational organization of the control of crime by society* " ⁹⁰, sedangkan G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa " *Criminal Policy is the rational organization of the social reactions to crime* " ⁹¹. Definisi lain yang dikemukakan G. Peter Hoefnagels antara lain : ⁹²

- a. *Criminal policy is the science of responses* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan);
- b. *Criminal policy is the science of crime prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
- c. *Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime* (kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan);
- d. *Criminal policy is a rational total of the responses to crime* (kebijakan kriminal adalah suatu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).

⁸⁹. Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, halaman 38.

⁹⁰. Lihat Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, 1995, halaman. 7.

⁹¹. G. Peter Hoefnagels, *the Other Side of Criminology* (Holland Kluwer, Deventer, 1973, halaman. 57.

⁹². *ibid*

Sudarto memberikan rumusan-rumusan yang lebih rinci sebagai berikut : ⁹³.

- a. dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang - undangan dan badan - badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Kebijakan kriminal atau penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.

Sebagai usaha untuk menanggulangi kejahatan, kebijakan kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain :

⁹³. Sudarto, **Kapita Selecta Hukum Pidana**, 1981, halaman. 113-114

pertama, bersifat represif yang menggunakan sarana penal atau sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

ke dua, berupa usaha-usaha dengan menggunakan sarana non penal.

ke tiga, mendayagunakan usaha - usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas. (ini dapat dimasukkan kedalam upaya nono penal).

Dengan demikian kebijakan kriminal disamping dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana (pendekatan penal), dapat pula dilakukan melalui sarana non penal melalui berbagai usaha pencegahan tanpa harus menggunakan sistem peradilan pidana, (*prevention without punishment*), misalnya usaha penyehatan mental masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya , penyuluhan hukum, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya, mempengaruhi pandangan masyarakat lewat mass media dan sebagainya.

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *represive* (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik

beratkan pada sifat *preventive* (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dilihat sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁹⁴ Lebih lanjut dikemukakan oleh Sudarto penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala (*kurien am symptom*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.⁹⁵

Salah satu upaya penanggulangan kejahatan (khususnya kejahatan di bidang ekonomi) melalui jalur penal dinilai bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini terungkap dari keprihatinan yang diungkapkan dalam Kongres PBB ke 6 mengenai *The Prevention of crime and the Treatment of Offenders* pada tahun 1980 di Caracas Venezuela. Dinyatakan dalam satu laporan komisi II, bahwa bentuk - bentuk pelanggaran atau penyalahgunaan di bidang ekonomi (*economic abuses*) termasuk bentuk-bentuk pelanggaran yang sulit dijangkau oleh hukum. Bentuk-bentuk penyalahgunaan yang diidentifikasi dalam laporan itu antara lain : pelanggaran/ penghindaran pajak (*tax evasion*), penipuan/ kecurangan di bidang perkreditan dan bea cukai (*credit and customs fraud*), penggelapan

⁹⁴ Sudarto, Ibid. halaman 118.

⁹⁵ Sudarto , *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, 1983, halaman 35.

dana-dana masyarakat (*embezzlement of public funds*), penyelewengan / penyalahgunaan dana - dana masyarakat (*misappropriation of public funds*), pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan (*violations of currency regulations*), spekulasi dan penipuan dalam transaksi tanah (*speculation and swindling in land transactions*), penyelundupan (*smuggling*), delik - delik lingkungan (*environmental offences*), menaikkan harga (*over-pricing*), melebihi faktur (*over-invoicing*), eksploitasi tenaga kerja (*labour exploitation*), penipuan konsumen (*consumer fraud*), mengekspor dan mengimpor barang-barang di bawah standar dan bahkan hasil-hasil produksi yang membahayakan (*export and import of substandard and even dangerously unsafe products*)⁹⁶

Keterbatasan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal terungkap pula dari pendapat beberapa sarjana antara lain :

- a. Rubin menyatakan bahwa pemidanaan (apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki), sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.⁹⁷
- b. Schultz menyatakan, bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-

⁹⁶ . Sixth United Congress, Report, 1981, halaman 67.

⁹⁷ . H.D. (ed) , **Punishment : For and Against**, New York, 1971, halaman 21, dikutip dari Barda Nawawi Arief, **Batas-batas Kemampuan hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan**, Op. Cit. halaman 3.

putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.⁹⁸

- c. Karl O. Christiansen pada waktu membicarakan beberapa pertimbangan mengenai kemungkinan suatu politik kriminal yang rasional, mengemukakan antara lain :⁹⁹

“ Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh itu (maksudnya pengaruh dalam arti “ *general Prevention* “,pen) terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya pencegahan (*deterrence*), pecegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*strengthening the collective colidarity*), menegaskan kembali / memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of secrity*), mengurangi atau meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan - ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.

- d. Donald R. Taft dan Ralph W. England pernah menyatakan,

⁹⁸ . Ibid.

⁹⁹ . Karl O Christiansen, **Some Consideration on the Posibility of Rational Griminal Policy**, Resource Material Series No. 7 UNAFEI 1974, halaman 58 dikutip dari Barda, Op Cit. hal. 4.

bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok *interest* dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi hukum.¹⁰⁰

- e. Barda Nawawi Arief, menyatakan hukum pidana memiliki keterbatasan kemampuan dalam penanggulangan kejahatan, hal ini dapat dilihat sebagai berikut :¹⁰¹

1. *Sifat/ hakekat dan fungsi hukum pidana.*

Dilihat dari hakekat kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangat kompleks dan berada diluar jangkauan hukum pidana. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan dalam menanggulangnya. Sanksi (hukum) pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab - sebab (sumber) penyakit. Dengan kata

¹⁰⁰ . Donald R Taft and Ralph W. England, *Criminology*, 1964. hal. 315. Lihat Barda Nawawi arief. Op. Cit. halaman 4.

¹⁰¹ . Barda Nawawi Arief, *Batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Op. Cit. halaman 6.

lain sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan pengobatan *kausatif*, tetapi hanya sekedar pengobatan *simptomatik*.

2. Sifat/ fungsi pemidanaan.

Pendekatan hukum pidana selama ini sangat terbatas dan *fragmentair*, yaitu terfokus dipidananya si pembuat. Dengan demikian efek preventif dan upaya perawatan/ penyembuhan (*treatment atau kurieren*) lewat sanksi pidana lebih diarahkan pada tujuan agar orang tidak melakukan tindak pidana (prevensi spesial maupun prevensi general) dan bukan untuk mencegah agar kejahatan itu (secara struktural) tidak terjadi.

3. Dilihat dari jenis sanksi.

Hukum pidana sangat kaku dan sangat terbatas jenis pidana (sebagai obat/ remedium) yang dapat dipilih. Tidak sedikit dalam perundang-undangan selama ini digunakan sistem perumusan sanksi pidana yang sangat kaku dan bersifat imperatif, seperti halnya perumusan sanksi pidana secara tunggal dan kumulatif. Sistem demikian tentunya kurang memberi peluang atau kelonggaran bagi hakim untuk memilih pidana (obat) mana yang dianggap paling tepat bagi si terpidana. Terlebih pidana (obat) itu sendiri mengandung juga sifat-sifat kontradiktif / paradoksal dan unsur-unsur negatif

yang membahayakan atau setidaknya-tidaknya dapat menimbulkan efek sampingan yang negatif.

Dari beberapa pendapat di atas dapatlah kiranya diidentifikasi sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan sebagai berikut :

- a. sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana;
- b. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks.
- c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan " *kurieren am symptom* " oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif.
- d. Sanksi hukum pidana merupakan remedium yang mengandung sifat kontradiktif/ paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif.
- e. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif.

Namun demikian persoalan yang timbul adalah apakah hal ini berarti bahwa hukum pidana dengan sanksi pidananya sudah

tidak diperlukan lagi dalam upaya menanggulangi timbulnya kejahatan.

Ada sementara pendapat bahwa terhadap pelaku kejahatan atau para pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat ini pidana merupakan peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu yang seharusnya dihindari.

Sejalan dengan pendapat tersebut paham determinisme menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis dan faktor lingkungan kemasyarakatannya. Dengan demikian kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana. Karena seorang penjahat merupakan jenis manusia khusus yang memiliki ketidaknormalan organik dan mental, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya, tetapi yang diperlukan adalah tindakan - tindakan perawatan yang memperbaiki.¹⁰²

¹⁰². Barda Nawawi Arif, **Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara**, 1994, halaman. 19.

Persoalan anti pidana ini masih terdengar di abad XX ini dengan slogan barunya yang terkenal “ *the struggle against punishment atau abolition of punishment* “, misalnya yang dikemukakan oleh Filippo Gramatica, menurutnya hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial. Jadi pada prinsipnya ajaran Gramatica menolak konsepsi-konsepsi mengenai tindak pidana, penjahat dan pidana.¹⁰³

Pandangan atau alam pikiran untuk menghapuskan pidana seperti dikemukakan di atas menurut Roeslan Saleh adalah keliru. Beliau mengemukakan tiga alasan mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana. Adapun inti alasannya sebagai berikut :¹⁰⁴

¹⁰³ . Barda Nawawi Arief, *ibid.*

¹⁰⁴ .Roelan Saleh, *Mencari asas-asas Umum Yang sesuai Untuk Hukum Pidana Nasional*, Kumpulan upgrading hukum pidana, jilid 2, 1971, halaman 15-16. Lihat pula Barda Nawawi arief, *Pemidanaan , Masalah-masalah Hukum* NO. 16, 1974, halaman 14-16.

1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan -tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. Persoalannya bukan pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
2. Ada usaha - usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

Sejalan dengan pendapat di atas Muladi mengatakan :

“ ambivalensi sikap dalam penegakan hukum ekonomi seringkali juga didasarkan atas skala prioritas pembangunan. Dalam sistem ekonomi yang berimbang dimana faktor ekonomi merupakan primadona karena *leverage effect* yang diharapkan terhadap bidang-bidang pembangunan yang lain, seringkali pendekatan non penal dikedepankan dari penggunaan sarana

penal. Sebagai contoh dapat dikemukakan beberapa kejanggalan dalam penegakan UU No. 4 tahun 1982. Saat ini bila terjadi *total enforcement* dari pasal 22 UU No. 4 tahun 1982, jelas akan menimbulkan kehancuran sebagian besar industri di Indonesia. Demikian pula penyelesaian tindak pidana perpajakan yang lebih senang menggunakan pendekatan administratif. Apalagi perlindungan konsumen yang lemah mengingat aspek-aspek politik yang melekat padanya.

Dalam kasus-kasus yang serius secara teoritik pertimbangan pemidanaan justru penting yakni untuk tujuan *moral and deterrent effects*. Selanjutnya dikatakan dalam kejahatan korporasi alasan untuk sekali-kali menggunakan hukum pidana lebih beralasan mengingat viktimologisnya yang sangat luas. Kerugian dapat timbul terhadap negara (tindak pidana pajak), masyarakat (tindak pidana lingkungan), perusahaan saingan (kompetisi tidak jujur), karyawan (tindak pidana perburuhan), dan konsumen (tindak pidana penipuan melalui adpertensi).¹⁰⁵

Namun demikian dalam menggunakan sarana penal, Nigel Walker pernah mengingatkan adanya " prinsip-prinsip

¹⁰⁵. Muladi, *Konsep Indonesia Tentang Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi*, Penataran "Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi", Fakultas Hukum UNPAR, 26-27 Agustus 1994.

pembatas " (*the limiting principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian, antara lain : ¹⁰⁶

1. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
2. Jangan menggunakan Hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/ membahayakan;
3. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai sesuatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;
4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/ bahaya yang timbul dari pidana lebih besar dari kerugian/ bahaya dari perbuatan/ tindak pidana itu sendiri.
5. Larangan - larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih bahaya dari perbuatan yang akan dicegah;
6. Hukum pidana memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan dari publik.

Demikian pula Herbert L. Packer pernah mengingatkan bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/ tidak pandang bulu/ menyamaratakan (*indiscriminately*) dan digunakan

¹⁰⁶. Nigel Walker, *Sentencing in a rational Society*, 1972, halaman 43, Dikutip dari Barda Nawawi Arief, *Batas-batas kemampuan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Makalah seminar nasional "Pendekatan non penal dalam penanggulangan kejahatan", 1996, halaman. 9.

secara paksa (*coercively*) akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu " pengancam yang utama " (*prime threatener*).¹⁰⁷

Demikian juga tidak ketinggalan Sudarto mengingatkan berkaitan dengan kriminalisasi perbuatan harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :¹⁰⁸

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan-tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan sprituil) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).

¹⁰⁷. Herbert L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, 1968, halaman 366. Dikutip dari Barda Nawawi Arief, Op. Cit. halaman 10.

¹⁰⁸. Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*. Op.Cit. halaman. 44-48.

4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overvelasting*).

Memperhatikan alasan-alasan di atas, nampaknya penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) masih diperlukan keberadaannya, meskipun dalam penerapannya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, cermat , selektif dan limitatif.

Untuk itulah dalam penanggulangan kejahatan disamping perlunya digunakan kebijakan integral baik melalui upaya penal juga melalui upaya non penal. Usaha -usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial.

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Dengan demikian penggunaan upaya non penal dilihat dari sudut politik kriminal secara global memiliki posisi kunci dan strategi dari keseluruhan upaya politik kriminal. Dilihat dari sudut politik kriminal, masalah strategis yang justru harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Oleh karena itu adalah wajar apabila kongres PBB ke 6 tahun 1980 sangat memperhatikan masalah ini. Dalam resolusinya mengenai " *Crime trends and crime prevention strategies*, antara lain menyatakan : ¹⁰⁹

- bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang;

(*the crime problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people*) ;

- bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan;

(*crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*);

- bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standard hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan terbesar penduduk;

(*the main causes of crime in many countries are social inequality, racial and national discrimination, low standard of living, unemployment and illiteracy among broad sections of the population*).

¹⁰⁹ . Sixth United Nation Congress, Report, 1981, halaman. 5.

Kebijakan integral dengan penekanan pada pengurangan atau penghapusan kondisi-kondisi yang memberikan kesempatan untuk timbulnya kejahatan juga mendapat perhatian dari kongres PBB ke 7 tahun 1985. Ditegaskan di dalam dokumen kongres mengenai "*Crime prevention in the context of development*" (dokumen A/CONF.121/L.9), bahwa upaya-upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan "strategi pencegahan yang mendasar (*the basic crime prevention strategies*). Sikap dan strategi yang demikian juga dilanjutkan dalam kongres ke 8 tahun 1990 di Havana, Cuba. Dalam dokumen kongres No. A/CONF. 144/L/17 tentang "*Social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development*" antara lain dinyatakan :

- bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan strategi penanggulangan kejahatan dan harus diberikan prioritas utama;
- bahwa tujuan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kerjasama internasional hendaknya ditujukan untuk menjamin hak-hak asasi manusia untuk suatu kehidupan yang bebas dari kelaparan, kemiskinan, kebutuhurufan, kebodohan, penyakit dan ketakutan akan perang serta memberikan kemungkinan bagi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat.

Dalam kongres ke 8 ini diidentifikasi faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan yang lebih luas dan terperinci (khususnya dalam “ *Urban Crime* ”), antara lain : ¹¹⁰

- a. kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (kebodohan), ketiadaan/ kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta sistem latihan yang tidak cocok/ serasi;
- b. meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;
- c. mengendurnya ikatan sosial dan keluarga;
- d. keadaan - keadaan/ kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang berintegrasi ke kota - kota atau ke negara-negara lain;
- e. rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya racisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian / kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan dalam bidang/ lingkungan pekerjaan;
- f. menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat - tempat fasilitas lingkungan/ bertetangga;

¹¹⁰. Eighth United Nation Congress, Dokumen A/CONF.144/L.3, halaman. 3.

- g. kesulitan - kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga/ familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya;
- h. penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas;
- i. meluasnya aktifitas kejahatan terorganisir , khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
- J. dorongan - dorongan (khususnya oleh mass media) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksetaraan (hak) atau sikap-sikap tidak toleransi.

Seberapa jauh faktor-faktor kondusif yang diidentifikasi oleh kongres PBB ke 8 di atas sesuai dengan keadaan di Indonesia, kiranya masih perlu didukung oleh penelitian-penelitian. Disamping itu perlunya dilakukan perencanaan yang rasional untuk mencegah dan menanggulangi semakin suburnya kejahatan. Sehubungan dengan itu " *guiding Principles* " yang dihasilkan oleh kongres PBB ke 7 tahun 1985, antara lain menyatakan : ¹¹¹

¹¹¹ . Seven United Nation Congress, Dokumen A/CONF.121/L.15, halaman 10.

" Proyek - proyek dan program - program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan kenyataan-kenyataan lokal, regional dan nasional, hendaknya didasarkan pada penelitian yang dapat diandalkan dan perkiraan ramalan akan perkembangan atau kecenderungan kejahatan, pada saat ini maupun di masa yang akan datang, dan juga hendaknya didasarkan pada studi/ penelitian mengenai pengaruh dan akibat-akibat sosial dari keputusan-keputusan serta investasi-investasi kebijakan. Studi kelayakan juga harus meliputi faktor-faktor sosial dan dilengkapi dengan penelitian mengenai kemungkinan timbulnya akibat-akibat kriminogen serta strategi alternatif untuk menghindarinya ".

Untuk itu dalam kaitan ini terlihat perlunya melakukan studi dan evaluasi terhadap perkembangan/ kecenderungan kejahatan *crime trend*. Beberapa dimensi perkembangan kejahatan yang mendapat perhatian kongres PBB mengenai *the prevention of crime and the treatment of offenders*, antara lain sebagai berikut :

a. Kongres ke 5 tahun 1975 di jенева meminta perhatian berikut :

1." *Crime as business*" yaitu kejahatan yang bertujuan mendapat keuntungan materiil melalui kegiatan dalam

bisnis atau industri, yang pada umumnya dilakukan secara terorganisir dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan kejahatan ini a.l. yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen dan dalam bidang perbankan, di samping kejahatan-kejahatan lainnya yang biasa dikenal dengan "*organized crime*" "*white collar crime*" dan korupsi ;

2. Tindak pidana yang berhubungan dengan hasil pekerjaan seni dan kekayaan budaya, obyek - obyek budaya atau warisan budaya ;
3. Kejahatan yang berhubungan dengan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan ;
4. Perbuatan kekerasan antar perorangan (*interpersonal violence*) , khususnya di kalangan remaja ;
5. Perbuatan kekerasan yang bersifat transnasional dan internasional, yang biasa disebut dengan perbuatan-perbuatan "*terrorisme*" (catatan : ada pendapat dari peserta kongres bahwa istilah "*terrorisme*" dan "*transnasional violence*" jangan digunakan sebagai suatu sinonim);
6. Kejahatan yang berhubungan dengan lalu lintas kendaraan bermotor.

7. Kejahatan yang berhubungan dengan perpindahan tempat (migrasi) dan peralihan pengungsi akibat bencana alam dan peperangan; masalah-masalah yang berhubungan dengan perpindahan tempat misalnya mengenai pelanggaran paspor dan visa, pemalsuan dokumen, mengeksploitir tenaga kerja, pelacur dan sebagainya. Masalah-masalah yang berhubungan dengan pengungsi antara lain masalah pengalihan bantuan dan masalah spionase;

b. Di dalam Kongres ke 6 tahun 1980 di Caracas, masalah "*Crime trend*" dibicarakan dalam komisi I. Dengan masih tetap memperhatikan hasil kongres ke 5, dalam laporan komisi I Kongres ke 6 ditegaskan, bahwa kejahatan-kejahatan yang sangat membahayakan dan merugikan tidak hanya kejahatan-kejahatan terhadap nyawa, orang dan harta benda, tetapi juga "penyalahgunaan kekuasaan" (*abuse of power*). Ditegaskan pula bahwa *white collar crime* dan *economic-crime* cenderung menjadi terorganisir dan bersifat transnasional.

c. Di dalam Kongres PBB ke 7 tahun 1985, antara lain dimintakan perhatian terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang dipandang membahayakan seperti : *economic crime* , *environmental offences*, *illegal trafficking in drugs*, *terrorism*, *apartheid*. sehubungan dengan peranan dari pertumbuhan industri serta kemajuan ilmu dan

teknologi, Kongres juga meminta perhatian khusus terhadap masalah *industrial crime*, khususnya yang berhubungan dengan masalah :

- kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (*public health*);
- kondisi para pekerja/ buruh/ karyawan (*labour conditions*);
- eksploitasi sumber-sumber alam dan lingkungan (*the exploitation of natural resources and the environment*);
- pelanggaran terhadap ketentuan / persyaratan barang dan jasa bagi para konsumen (*offences against the provision of goods and services to consumers*).

Keseluruhan uraian di atas pada intinya ingin menekankan bahwa upaya non penal merupakan sarana strategis untuk membentuk lingkungan masyarakat yang bersih dan sehat, baik materiil maupun immateriil) dari faktor-faktor kriminogen. Ini berarti masyarakat dengan segala potensi yang dimilikinya perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan dalam upaya penanggulangan kejahatan atau faktor kriminogen yang merupakan bagian integral dari politik kriminal.

Bertolak dari uraian di atas, maka kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan) seyogjanya ditempuh dengan pendekatan/ kebijakan yang integral, baik dengan menggunakan

sarana penal maupun dengan sarana non penal dalam mencapai tujuan politik kriminal.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

A. *Perlindungan Hukum Menurut UU No. 19 tahun 1992 Tentang Merek.*

Pengalaman Indonesia dalam pengelolaan Merek sebenarnya berlangsung sejak tahun 1961 yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 21 tahun 1961, paling lama bilamana dibandingkan dengan jenis-jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya (HAKI). Sebagaimana diketahui di bidang hak cipta pengalaman tersebut bermula sejak diundangkannya UU No. 6 tahun 1982.

Begitu pula di bidang Paten. Secara nasional pengelolaan sistem Paten mulai efektif sejak tahun 1991 setelah diundangkannya UU No. 6 tahun 1989 tentang Paten, pada tanggal 1 Nopember 1989

Jenis HAKI lainnya, yaitu Desain Produk Industri (*Industrial Designs*), dimana ketentuan dasar untuk itu sebenarnya telah ada. Hal ini nampak dalam UU No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian yang menentukan dalam pasal 17, bahwa Desain Produk Industri mendapat perlindungan hukum, dan ketentuan-ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, meskipun untuk ini belum juga diselesaikan rancangannya.

Berbekal pengalaman yang cukup lama, ternyata tidak menjamin sepenuhnya bahwa pelaksanaan penanganan masalah yang

terkait dengan Merek berjalan mulus. Banyaknya sengketa atau perkara yang diperiksa di lembaga peradilan kita di bidang Merek,¹¹² setidaknya memberi petunjuk adanya sesuatu yang kurang beres dengan sistem Merek itu sendiri.

Dalam pengamatan Tim Keppres 34, sebagian besar sengketa Merek berlangsung disekitar gugatan terhadap pendaftaran dan pemakaian Merek. Pihak yang satu selalu menyatakan lebih berhak atas Merek yang bersangkutan dan pihak yang lain dianggapnya menggunakan secara melawan hukum.

Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan dua kasus dari beberapa kasus yang ada dan sangat penting untuk dicatat dalam rangka menyelami perkembangan hukum Merek di Indonesia, antara lain :

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 677 K/ Sip/ 1972, tanggal 13 Desember 1972.

Kasus Posisi : PT. Tancho Indonesia Co Ltd telah menggugat Wong A Kiong (Ong Sutrisno) sebagai Direksi Firma Tokyo Osaka Company atas fakta bahwa Tancho Kabushiki Kaisha selaku pemilik dan pemakai pertama dari nama dagang Merek Tancho. Sejak tahun

¹¹² . Dari data yang dikumpulkan oleh Gunawan Suryomurcito pada waktu berlakunya UU No. 21 tahun 1961 ternyata bahwa jumlah perkara merek yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (pasal 10 ayat 1 UU No. 21 tahun 1961 yang kompeten mengadili pembatalan Merek adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) selama tahun 1987 berjumlah 208 perkara, sedangkan selama tahun 1988 berjumlah 240 perkara. Lebih dari 75 % diantaranya merupakan perkara yang diajukan oleh pihak asing. (Gunawan Suryomurcito, **Sengketa Merek dalam Angka dan Fakta**, Makalah seminar "Pemahaman dan kesadaran Bidang Hukum Merek Dalam Praktek", BPHN, Jakarta, Maret 1990.

1961 barang-barang tersebut telah dikenal di Indonesia, karena beberapa pengusaha Indonesia mengimpornya. Kemudian untuk memperlancar usahanya, *Tancho Kabushiki Kaisha* mengadakan *joint venture* dengan *NV the City Factory* di Jakarta, sehingga terbentuk *PT Tancho Indonesia Co. Ltd* dan barang produksinya diberi pula nama *Tancho*. Kemudian hal tersebut didaftarkan kepada Ditjen Paten, Merek dan Hak cipta, tetapi ditolak karena telah ada pihak lain yang mendaftarkan lebih dahulu, yaitu *Fa. Tokyo Osaka Company*. Kemudian *PT Tancho Co Ltd* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Putusan : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan *PT Tancho Co Ltd* dan memenangkan *Fa. Tokyo Osaka Company*, karena ia yang pertama kali menggunakan serta mendaftarkan Mereknya pertama kali di Indonesia, sesuai dengan pasal 2 UU Merek NO. 21 tahun 1961. Di tingkat Kasasi *PT Tancho Co Ltd* berbalik menjadi pemenang. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung mengatakan : kepatuhan dalam lalu lintas perdagangan yang hendak ditertibkan oleh undang-undang Merek. Hakim, demikian Mahkamah Agung, hendaknya selalu berpedoman pada tujuan undang-undang, yakni khalayak ramai harus dilindungi terhadap barang-barang tiruan yang memakai Merek yang sudah dikenalnya sebagai Merek barang-barang yang bermutu baik, serta adanya

kecenderungan secara tradisional dalam masyarakat Indonesia untuk menganggap barang buatan luar negeri mutunya lebih baik dan adanya usaha-usaha yang ingin mempergunakan kesempatan yang timbul dari keadaan ini untuk meniru merek dagang luar negeri yang tidak terdaftar di Indonesia.

2. Putusan Mahkamah Agung No. 2854K/Sip/ 1981.

Kasus Posisi : *Yamaha Matsudoki Kabushiki* tampil sebagai penggugat melawan Budiono sebagai tergugat I. Penggugat yang memproduksi sepeda motor Merek Yamaha yang sudah terkenal itu ternyata mereknya dipakai tergugat I untuk barang " bola bulu tangkis ".

Putusan : Mahkamah Agung memenangkan penggugat Yamaha Matsudoki dengan dasar pertimbangan : bahwa Yamaha adalah etiket merek atas nama *Yamaha Matsudoki Kabushiki Kaisha*, jadi pada pokoknya merupakan juga nama atau nama perniagaan (*handelsnaam*), hal ini berarti Yamaha merupakan juga nama yang dipakai perusahaan tersebut dalam lalu lintas perdagangan; perbedaannya dengan merek perniagaan/ dagang (*trade mark*) yang mempunyai tujuan untuk membedakan dari barang orang lain ialah bahwa nama perniagaan tidak secara langsung bertujuan untuk membedakan barang dari barang orang lain, melainkan bertujuan untuk memberi penjelasan tentang perusahaannya,

sehingga terutama peniruan nama perniagaan orang lain atau pemakaian nama perniagaan lain sudah bertentangan dengan makna UU No. 21 tahun 1961. Karena itu pemakaian etiket merek Yamaha menimbulkan kesan berasal dari perusahaan dengan nama Yamaha, terlepas dari hal apakah barang-barang yang memakai sifat etiket merek tersebut sejenis atau tidak.

Apabila kita telusuri kasus Merek di atas yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*in kracht van gewijsde*) di era UU No. 21 tahun 1961 terdapat tiga masalah pokok :

- pertama,** Merek (terkenal) asing telah didaftarkan terlebih dahulu, tanpa ijin dari pemilik sebenarnya, untuk produk yang sama oleh pihak pengusaha lokal.
- Ke dua,** Merek (terkenal) asing didaftarkan terlebih dahulu oleh pengusaha lokal untuk barang sejenis.
- Ke tiga,** Merek serupa atau yang memiliki persamaan dengan Merek (terkenal) asing didaftarkan pengusaha lokal untuk barang sejenis atau berbeda.

Hal ini ternyata berpangkal tolak pada prinsip dasar yang melandasi alur pemikiran dalam UU No. 21 tahun 1961, yaitu sistem deklaratif. Oleh karena itu tidak keliru bila ada yang berpendapat, bahwa UU No. 21 tahun 1961 (LN 1961 No. 290) tentang Merek

Perusahaan Dan Merek Perniagaan memiliki beberapa kekurangan.¹¹³ Sistem Pendaftaran yang dianut UU tersebut, yaitu *sistem first to invent system*¹¹⁴, yaitu sistem deklaratif, yang menyatakan, bahwa hak khusus atas Merek dagang diberikan kepada penemu atau pemakai Merek pertama di Indonesia (pasal 2 ayat 1 UU NO. 21 tahun 1961).

Dalam sistem deklaratif titik berat diletakkan atas pemakaian pertama. Siapa yang memakai pertama sesuatu Merek dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas Merek yang bersangkutan. Jadi ***pemakaian pertama*** yang menciptakan hak atas Merek, bukan ***pendaftaran***. Pendaftaran dipandang hanya memberikan suatu hak prasangka menurut hukum, dugaan hukum bahwa orang yang mendaftar adalah si pemakai pertama, yaitu adalah orang yang berhak atas Merek yang bersangkutan. Tetapi apabila lain orang dapat membuktikan bahwa dialah yang memakai pertama hak tersebut, maka pendaftarannya bisa dibatalkan oleh pengadilan dan hal ini sering terjadi.

Sistem ini teramat sulit untuk membuktikan, siapakah sebenarnya pemilik atau pemegang hak atas Merek dagang, apabila pada saat yang hampir bersamaan muncul beberapa Merek dagang. Selain itu sistem ini tidak dapat lagi mengikuti irama perkembangan

¹¹³ . Insan Budi Maulana, **Beberapa Pandangan terhadap UU Merek Baru**, Newsletter, No. 10 tahun III September 1992, halaman 14.

¹¹⁴ . Ibid. Istilah ini atau istilah *first to life principle* lebih sering digunakan dalam berbagai literatur di bidang Hak Milik Industri, khususnya paten, merek dan desain.

industri manufaktur dan jasa yang berkembang dengan pesat. Perkembangan pesat ini menumbuhkan kembangkan Merek-Merek dagang¹¹⁵ dan Merek-Merek jasa baru, yang mau tidak mau harus segera diajukan pendaftaran Mereknya. Pendaftaran Merek tersebut untuk memperoleh perlindungan hukum, dan sekaligus sikap preventif terhadap pihak-pihak pesaing yang mungkin akan melakukan persaingan curang dengan cara meniru atau memalsu.

Juga secara keseluruhan UU No. 21 tahun 1961 ini memang tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada pemilik atau pemegang lisensi Merek yang sah, dan perlindungan hukum terhadap konsumen, walaupun untuk menutupi kekurangan Undang-undang ini telah ditetapkan beberapa Keputusan Menteri Kehakiman¹¹⁶ dan Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung.¹¹⁷

Ditinjau dari segi ekonomipun, UU Merek tersebut, agaknya tidak dapat mengikuti perkembangan kemajuan ekonomi nasional, maupun kemajuan ekonomi dunia. Perkembangan ekonomi selama ini tidak hanya tampak pada industri manufaktur dan produksi saja, tetapi

¹¹⁵ . Permohonan pendaftaran Merek diajukan sebanyak 150 buah setiap harinya. Setiap tahunnya sekitar 10.000 buah.

¹¹⁶ . Lihat Keputusan Menteri Kehakiman No.M. 01-HC.01.01 tahun 1987 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Yang Mempunyai Persamaan Dengan Merek terkenal Orang Lain, Dan Keputusan Menteri Kehakiman No. 03-HC.02.01 tahun 1991 Tentang Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain Atau Milik Badan Lain.

¹¹⁷ . Lihat Keputusan Mahkamah Agung No. 677 K/Sip/ 1972 tentang Merek Tancho atau Putusan Mahkamah Agung No. 284K/Sip/1981 tentang kasus Yamaha.

juga industri jasa, seperti periklanan, keuangan, transportasi, komunikasi. pendidikan dan sebagainya.

Akibat perkembangan dalam industri jasa, maka diperlukan pula perlindungan hukum terhadap pemilik atau pemakai Merek-Merek jasa tersebut. Merek dagang memberikan identitas dan membedakan sumber dan kualitas suatu produk berwujud, sedangkan fungsi Merek jasa adalah untuk mengidentifikasi sumber dan kualitas suatu jasa yang tidak berwujud.

Untuk itulah kemudian dengan mengantisipasi keadaan tersebut, Pemerintah mencabut UU No. 21 tahun 1961, kemudian mengeluarkan Undang-undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek, yang dalam bagian menimbang butir b, berbunyi :

" bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya, Merek salah satu wujud dari karya intelektual, memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa ".

Jika diperhatikan, inti Undang-undang No 19 tahun 1992 tentang Merek yang mengubah Undang-undang Merek yang lama adalah :

1. Ruang Lingkup Pengaturannya;
2. Dianutnya Sistem Konstitutif;
3. Diakomodasikan kemungkinan permintaan pendaftaran Merek

dengan menggunakan hak prioritas;

4. Diintroduksinya Lembaga Pengumuman;
5. Lisensi Merek;
6. Upaya-upaya hukum dan sanksi hukum;

ad. 1. Lingkup pengaturan Undang - undang NO. 19 tahun 1992 tentang Merek ini mencakup dua jenis Merek, yaitu Merek dagang dan Merek jasa.¹¹⁸ Istilah Merek jasa ini belum banyak diketahui dan dipahami oleh masyarakat.

Pengertian Merek dagang yaitu Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.¹¹⁹ Hampir sama dengan Merek dagang, perbedaan Merek jasa hanya terletak pada obyek yang dilekatinya, yaitu jasa¹²⁰.

Dalam masalah lingkup ini, Undang-undang Merek 1992 juga mengatur Merek kolektif.¹²¹ Pada dasarnya Merek ini juga Merek Dagang atau Merek jasa. Yang menjadikannya

¹¹⁸ . Lihat pasal 2 UU No. 19 tahun 1992.

Pasal 1 ayat 1 UU No. 19 tahun 1992 : Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

¹¹⁹ . Ibid Pasal 1 ayat 2

¹²⁰ . Ibid Pasal 1 ayat 3

¹²¹ . Merek kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama - sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya (pasal 1 ayat 4).

sebagai Merek kolektif hanyalah sifat penggunaannya sejak awal terikat pada pengaturan yang dibuat untuk itu. Untuk itu karena karakterisiknya, penjabaran dalam UU No. 19 tahun 1992 dituangkan dalam Bab tersendiri (Bab VII, pasal 61-71).¹²²

Dengan lingkup ini sudah barang tentu UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek dapat mengikuti perkembangan industri manufaktur dan jasa yang semakin pesat, yang mau tidak mau harus segera diajukan pendaftaran Mereknya sebagai langkah preventif terhadap kompetitor lain. Satu hal

¹²²

Secara garis besar untuk permintaan pendaftaran Merek kolektif, dalam permohonannya harus disebut secara tegas bahwa Merek yang bersangkutan akan digunakan sebagai Merek kolektif (pasal 61 ayat 1). Untuk itu harus pula dilengkapi dengan **peraturan penggunaannya** secara tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemilik Merek (pasal 61 ayat 2). Peraturan penggunaannya harus berisikan antara lain : a. sifat, ciri-ciri umum, atau mutu dari barang atau jasa yang produksi dan perdagangannya akan menggunakan Merek kolektif tersebut; b. ketentuan bagi pemilik Merek kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan Merek tersebut sesuai dengan peraturan; c. sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan Merek kolektif (pasal 61 ayat 3). Untuk permintaan pendaftaran Merek kolektif dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan seperti permintaan pada merek pada umumnya. (pasal 62). Sedangkan untuk pendaftarannya pada Kantor Merek juga sama dengan sama dengan pendaftaran Merek pada umumnya, tetapi pencantuman dalam daftar umum Merek harus disertai dengan lampiran salinan peraturan penggunaan Merek. Demikian juga untuk pengumuman dalam Berita Resmi Merek harus disertai peraturan penggunaannya (pasal 63). Untuk perubahan peraturan penggunaannya harus dicatatkan pada Kantor Merek dalam daftar umum merek dan perubahan itu berlaku untuk pihak ketiga. (pasal 64). Pemilik Merek kolektif hanya dapat menggunakan Merek kolektif secara bersama-sama (pasal 65). Pengalihan Merek kolektif hanya dapat dilakukan pada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan aktif dan untuk itu pula perlu dimintakan pencatatannya pada Kantor Merek. (pasal 66). Satu hal yang perlu diperhatikan Merek kolektif tidak dapat dilisensikan kepada orang atau badan lain. (pasal 67). Penghapusan Merek kolektif dapat dilakukan oleh Kantor Merek bila: a. permintaan pemilik, b. tidak digunakan berturut-turut selama 3 tahun, c. digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan penggunaan Merek (pasal 67). Penghapusan ini bisa dilakukan pihak ketiga dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Negeri (pasal 69). Seluruh ketentuan ini berlaku terhadap Merek kolektif, selama tidak ditentukan lain (pasal 71).

kiranya yang perlu diingat, demi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, maka hak atas Merek jasa terdaftar yang cara pemberian jasa dan hasilnya sangat erat dengan kemampuan atau keterampilan pribadi yang bersangkutan tidak dapat dialihkan dalam bentuk dan cara apapun.¹²³ Kiranya hal ini perlu diwaspadai, karena hal ini bisa saja terjadi dalam masyarakat, seperti jasa pengobatan tradisional yang menggunakan jasa Merek yang sudah dikenal, Jasa penjahit pakaian, fotografi dan lain-lain. Hal ini seharusnya mendapat perhatian dari pihak terkait untuk melindungi kepentingan konsumen. Sayangnya terhadap pelanggaran ketentuan ini tidak dikategorikan sebagai perbuatan pidana menurut undang-undang ini, padahal dampak kerugiannya juga sangat besar.

ad. 2. Hal lain dalam Undang - undang ini yang cukup menarik yaitu telah meninggalkan sistem deklaratif dan menganut sistem konstitutif yang berarti bahwa perlindungan hukum atas Merek hanya akan berlangsung apabila hal tersebut dimintakan pendaftaran.¹²⁴ Jadi pendaftaran adalah

¹²³ Pasal 43 UU No. 19 tahun 1992, mengatakan hak atas Merek jasa terdaftar yang cara pemberian jasa dan hasilnya sangat erat berkaitan dengan kemampuan atau ketrampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan, tidak dapat dialihkan dalam bentuk dan dengan cara apapun.

¹²⁴ Undang-undang ini memberikan aturan yang tegas perihal Merek yang tidak dapat didaftarkan, antara lain, Pasal 5 : a. bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban

mutlak untuk terjadinya hak atas merek. Tanpa pendaftaran tidak ada hak atas merek, juga tidak ada perlindungan.¹²⁵

Dengan sistem ini maka kepastian hukum akan lebih terjamin, oleh karena orang yang Mereknya sudah didaftar tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Dengan perkataan lain orang yang Mereknya sudah terdaftar tidak merasa was-was lagi terhadap tuntutan dari orang lain, sebab dengan pendaftaran melahirkan perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh tahun.¹²⁶

Oleh karena itu dengan adanya perlindungan hukum, pemilik Merek terdaftar atau penerima lisensi terdaftar¹²⁷

umum, b. tidak memiliki daya pembeda, c. telah menjadi milik umum, d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran. Hal ini lebih dipertegas lagi dalam pasal 6 : (1) Permintaan pendaftaran Merek ditolak oleh Kantor merek, apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek milik orang lain (2). Permintaan Pendaftaran Merek ditolak oleh Kantor Merek, apabila, a. Merupakan, menyerupai nama orang terkenal, foto, Merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal.....b. merupakan peniruan atau menyerupai nama, bendera, lambang.....c. dari negara atau lembaga nasional maupun internasional.....c. merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, d. merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi oleh hak cipta, kecuali atas persetujuan tertulis....."

¹²⁵ . Konsekuensi dianutnya sistem konstitutif dalam Undang-undang ini nampak pada perumusan dalam pasal 3 dan pasal 56 ayat 2 UU No. 19 tahun 1992 yang berbunyi : gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak dapat diajukan oleh pemilik Merek yang tidak terdaftar. Ratio dari ketentuan ini adalah mendorong pemilik Merek terkenal untuk mendaftarkan Mereknya di Indonesia.

¹²⁶ . Pasal 3 dan 7 UU No. 19 tahun 1992. **Pasal 3** : Hak atas Merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberi ijin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. **Pasal 7** : Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran Merek yang bersangkutan.

¹²⁷ . Ibid pasal 73.

memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan negeri kepada siapapun yang menggunakan Mereknya secara tanpa hak, baik dalam bentuk adanya persamaan baik sebagian atau keseluruhan.¹²⁸

Selain ganti rugi, gugatan pemilik Merek atau pemegang/ penerima lisensi dapat pula berupa penghentian produksi dari perdagangan barang atau jasa yang memakai Merek secara tanpa hak (*provisional injunction*).¹²⁹

Disamping itu sistem ini lebih menjamin perlindungan hukum pada pemilik Merek yang sebenarnya, terutama Merek-Merek terkenal yang lalai hingga tidak didaftarkan atau terlambat didaftarkan.

Namun demikian meskipun menganut sistem konstitutif, tetapi asasnya tetap melindungi pemilik yang beriktikad baik. Hanya permintaan yang diajukan oleh pemilik yang beriktikad baik saja yang dapat diterima untuk didaftarkan. Dengan

¹²⁸ . Ibid pasal 72 ayat 1 : Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang menggunakan Mereknya....., secara tanpa hak, berupa permintaan ganti rugi dan penghentian pemakaian Merek. (garis bawah pen).

¹²⁹ . Ibid 74 : (1) Atas permintaan pemilik Merek atau Penerima lisensi Merek terdaftar selaku penggugat, selama dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek secara tanpa hak. (garis bawah pen). Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan, bahwa isi gugatan mencakup dua hal : pertama, berupa permintaan ganti rugi, ke dua, penghentian pemakaian. Satu hal yang perlu diingat bahwa putusan pengadilan atas gugatan tersebut tidak dapat diajukan banding (75) dan hak untuk mengajukan gugatan tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan tindak pidana di bidang Merek (pasal 76).

demikian aspek perlindungan hukum tetap diberikan kepada pemilik yang beriktikad baik.¹³⁰

Dengan adanya syarat tambahan (beriktikad baik) ini, maka pemilik Merek atau pemegang Merek yang didahului pendaftarannya oleh pemilik Merek yang sama atau serupa tetapi tidak beriktikad baik, masih memiliki kesempatan untuk mengajukan pembatalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri Lainnya yang akan ditetapkan dengan Kepres.¹³¹ (pasal 52 UU No. 19 tahun 1992)

ad.3. Dalam Undang-undang ini diakomodasikan kemungkinan permintaan pendaftaran Merek dengan menggunakan Hak Prioritas, yang mana hal ini tidak disinggung oleh UU No. 21 tahun 1961. Hak ini diperlukan karena tentunya bagi pemilik Merek sulit apabila secara simultan harus mendaftarkan Mereknya diseluruh dunia. Hak ini sebenarnya berkaitan dengan siapa yang lebih dahulu mengajukan pendaftaran. Untuk itu penentuannya dilakukan dalam waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan pendaftaran

¹³⁰. Ibid Pasal 4 ayat 1 : Merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik Merek yang beriktikad baik.

¹³¹. Yang dimaksud dengan Pengadilan lain adalah pengadilan negeri yang berkedudukan di Kotamadia atau ibukota kabupaten yang merupakan ibu kota Propinsi atau pengadilan negeri lain yang berkedudukan di Kotamadia atau ibukota Kabupaten yang bukan merupakan ibu kota Propinsi.

Merek yang pertama kali di negara asing lainnya, yang juga menjadi anggota konvensi Paris.¹³²

Persoalan ini lebih jauh sebenarnya terkait dengan apa yang telah diatur dalam Undang-undang ini yaitu mengenai perlindungan terhadap Merek terkenal.¹³³

ad.4. Diintroduksinya lembaga pengumuman¹³⁴ ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang seluas-luasnya dan memberi kesempatan kepada yang berkepentingan untuk mengajukan pandangan atau keberatan. Melalui cara ini, pemeriksaan terhadap suatu permintaan pendaftaran Merek tidak berlangsung semata - mata berdasarkan kelengkapan formal. Dengan adanya lembaga pengumuman yang memungkinkan diajukannya pandangan atau keberatan terhadap permintaan pendaftaran Merek, pemeriksaan berlangsung setelah selesainya masa pengumuman.¹³⁵

Dengan mekanisme ini pula pemeriksaan akan berlangsung

¹³² Ibid Pasal 12

¹³³ Ibid pasal 6 ayat 2 sub a : Permintaan pendaftaran Merek juga ditolak oleh Kantor Merek apabila merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, Merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

¹³⁴ Ibid Pasal 19, 20 dan 21

¹³⁵ Ibid Pasal 25

secara substantif. Ini berarti ditumbuhkannya keikutsertaan masyarakat secara aktif. Dalam hal ini, dipertegas adanya kemungkinan penghapusan atau pembatalan Merek yang telah terdaftar, atas dasar dan alasan tertentu.

Tentang penghapusan dan pembatalan Merek ini diatur dalam pasal 51 sampai dengan pasal 60 UU No. 19 tahun 1992.

Ada dua cara untuk penghapusan pendaftaran Merek tersebut, yaitu :

1. atas prakarsa sendiri yaitu berdasarkan permintaan pemilik Merek yang bersangkutan;
2. atas prakarsa Kantor Merek.

Untuk penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa sendiri undang-undang tidak menentukan persyaratannya. Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Kantor Merek, dapat pula diajukan oleh pihak ketiga. Gugatan terhadap pembatalan Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek , kecuali apabila Merek yang bersangkutan seharusnya tidak dapat didaftarkan, karena bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (pasal 57). Permintaan tersebut dilakukan dengan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau

Pengadilan lainnya yang akan ditetapkan dengan Kepres. Dan terhadap putusan Pengadilan negeri tersebut tidak dapat diajukan banding, melainkan langsung Kasasi atau Peninjauan Kembali.¹³⁶

Apabila gugatan Penghapusan pendaftaran Merek tersebut diterima dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Kantor Merek akan melaksanakan penghapusan Merek dari daftar umum Merek dan diumumkan dalam Berita resmi Merek. Dengan penghapusan itu berahirlah perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan.

ad. 5. Kemungkinan penggunaan Merek berdasarkan perjanjian lisensi,¹³⁷ dimana hal ini tidak disinggung oleh UU No. 21 tahun 1961.

Perjanjian lisensi berarti pemberian ijin kepada pihak lain untuk menggunakan suatu hak tertentu yang dimungkinkan oleh hak itu. Jadi lisensi merupakan ijin yang diberikan oleh pemilik hak kepada pihak penerima untuk memakai Merek itu. Dalam hal ini tidak terjadi pemindahan hak, melainkan hanya pemberian ijin sementara untuk memakai hak atas Merek tersebut. Perjanjian lisensi ini wajib

¹³⁶ .Bambang Kesowo, **Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Op. Cit. Halaman 72.

¹³⁷ . Ibid pasal 44

didaftarkan ke Kantor Merek. Kantor Merek wajib menolak, apabila perjanjian lisensi memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia.¹³⁸ Selanjutnya dalam pemberian lisensi undang-undang memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang beriktikad baik.¹³⁹ Dalam Undang-undang ini juga dimungkinkan untuk mengalihkan hak tas Merek.¹⁴⁰

ad. 6. Diintroduksinya ancaman pidana dalam Undang-undang ini¹⁴¹ pada dasarnya dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan dan persaingan curang. Selain itu juga diberikan ancaman pidana terhadap kegiatan penyebarluasan barang-barang hasil tindak pidana di bidang Merek, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat sebagai konsumen. Ketentuan ini tidak terdapat dalam UU No. 21 tahun 1961.

Satu hal kiranya yang perlu diperhatikan bahwa ancaman pidana itu bersifat kumulatif bukan alternatif. Jadi disamping terhadap pelaku dikenakan ancaman penjara juga ancaman denda.

Untuk penyidik dalam Undang-undang ini disebut selain Penyidik Polisi, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di

¹³⁸ . Ibid pasal 48

¹³⁹ . Ibid pasal 49

¹⁴⁰ . Ibid Pasal 41 ayat 1

¹⁴¹ . Ibid pasal 81 s/d 84

lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Merek.¹⁴² Dengan demikian ketentuan KUHAP tetap berlaku dalam hal penyidikan, penuntutan dan segala proses yang berkenaan dengan perbuatan pidana.

Dengan mencermati uraian di atas, yaitu dengan adanya perubahan-perubahan yang sangat fundamental pada UU No. 19 tahun 1992, sudah barang tentu akan membawa perubahan pula dalam tatanan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia, khususnya di bidang Merek.

Dengan adanya perubahan ini pula diharapkan dapat lebih merangsang investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, karena jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang diberikan dalam pendaftaran Mereknya. Hal ini nampak dari adanya ancaman pidana yang berat dan terbukanya gugatan ganti rugi dan atau adanya *provisional injunction* yang memungkinkan penggugat memohon kepada hakim, agar tergugat

¹⁴² Ibid pasal 80. Undang-undang ini tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai Pejabat Pegawai Negeri sipil yang juga diberi wewenang melakukan penyidikan. Menurut hemat penulis dengan berpijak pada penjelasan yang diberikan oleh pasal 7 ayat 2 KUHAP Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang memiliki lingkup tugas pembinaan di bidang Merek adalah pejabat Bea Cukai, Pejabat Imigrasi. Menurut Nico Kansil, PPNS sekarang adalah Departemen Kehakiman, **Perlindungan Hukum Dalam Bidang Hak Milik Intelektual, Terutama di bidang Merek**, Makalah disampaikan pada diskusi "Tentang Merek" yang diselenggarakan oleh Satria Law Firm & Management, Medan, 17 Juli 1993, halaman. 21.

menghentikan produksi dari perdagangan barang atau jasa yang memakai merek secara tanpa hak, setidaknya merupakan *deterent effects* terhadap semakin semaraknya kejahatan di bidang Merek.

Namun demikian meskipun Undang-undang No. 19 tahun 1992 sudah memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum, dari hasil wawancara dan pengamatan di Kantor Ditjen HCPM di bilangan jalan Daan Mogot, Tangerang, masih nampak adanya kendala-kendala yang menghadang dalam penerapannya.

Urusan di Kantor Ditjen HCPM berdasarkan prosedur yang ada memang sederhana,¹⁴³ tetapi kenyataan di lapangan berbicara lain. Loker pendaftaran untuk masing-masing bidang sudah tersedia dan dilayani pegawai yang cekatan. Tetapi warna kelambanan dan birokrasi dalam pemeriksaan persyaratan pendaftaran memerlukan waktu yang cukup lama. Menurut salah seorang pegawai dari Konsultan Hukum di Jakarta, yang sedang mengurus pendaftaran Merek kliennya dan sekaligus mencari data di pusat data Ditjen HCPM untuk keperluan kantornya mengatakan proses pendaftaran di Kantor Merek lebih sering mengalami kelambanan ketimbang kewajaran proses yang dijanjikan Peraturan perundang-undangannya. Bahkan untuk mengadakan riset

¹⁴³ . Lihat tabel Prosedur Pengajuan Permohonan Merek pada Tesis halaman 150.

mengenai jenis-jenis Merek yang sudah terdaftar saja dipersulit. Kami terpaksa menggaji ekstra para pegawai disini.

Sebagai bagian dari Hak Atas kekayaan Intelektual, Merek diakui memang lebih tinggi permintaannya dibandingkan dengan Paten dan Hak Cipta. Dari hasil penelitian Kantor Merek rata-rata menerima permohonan pendaftaran Merek sebanyak 150 buah setiap hari. Dibandingkan permintaan Paten maupun Hak Cipta yang hanya berkisar antara 30 sampai dengan 40 buah per hari.

Terjadinya penumpukan dan lambatnya proses penyelesaian permohonan Merek selama ini diakui oleh Dirjen HCPM S. Kayatmo, bukan semata-mata kesalahan konsultan Merek atau pemohon Merek semata, melainkan karena kondisi petugas di Kantor Merek yang perlu ditingkatkan. Bahkan ia menandakan Kantor Merek saat ini sedang sakit. Disini tidak ada proses, Jadi bagai makan nasi keluar nasi. Sebuah permohonan Merek yang salah dapat begitu saja diterima. Tidak ada koreksi, padahal melewati eselon IV sampai II. Bahkan dua Merek yang sama , hanya berbeda logo, bisa dikeluarkan sertifikatnya hanya selisih sehari. Ini kan sakit tegasnya.

Selain itu katanya, permohonan Merek yang "aman", diterima Kantor Merek setiap harinya kurang dari 5 Persen. Berarti

95 persen permohonan Merek itu mesti dicermati, sebab terdapat salah disana sini.¹⁴⁴

Dari data statistik yang dikeluarkan oleh Ditjen HCPM, permintaan Merek yang diajukan setiap tahunnya di Indonesia sekitar 10.000. Dari 30.000 pemohon hak Merek dagang saat ini baru ditangani kurang lebih 10.000.

Kenyataan di atas menunjukkan pengalaman Ditjen HCPM dalam menangani permohonan perlindungan Merek kurang didukung oleh tenaga pelaksana yang harus bertanggungjawab untuk memproses permohonan ini.

Tetapi diluar itu paling tidak ada kendala yang tak kalah rumitnya dan perlu mendapat perhatian yaitu berkaitan dengan penolakan suatu permohonan Merek dan pihak pemohon mengajukan banding. Dari hasil wawancara dan pengamatan, nampak bahwa prosedur pengajuannya agak tersendat, karena belum dibentuknya anggota komisi banding sebagaimana diamanatkan UU No. 19 tahun 1992 dan PP No. 32 tahun 1995. Jadi semua kasus mengenai penolakan pendaftaran Merek yang ditolak dan berada dalam kasus banding, statusnya menjadi tergantung atau ditunda. Kalau hal ini dibiarkan terjadi, makna

¹⁴⁴ . Kompas 26 Februari 1997.

kepastian hukum akan mengambang. Kiranya kesiapan Indonesia memasuki keterbukaan pasar bebas masih perlu diuji.

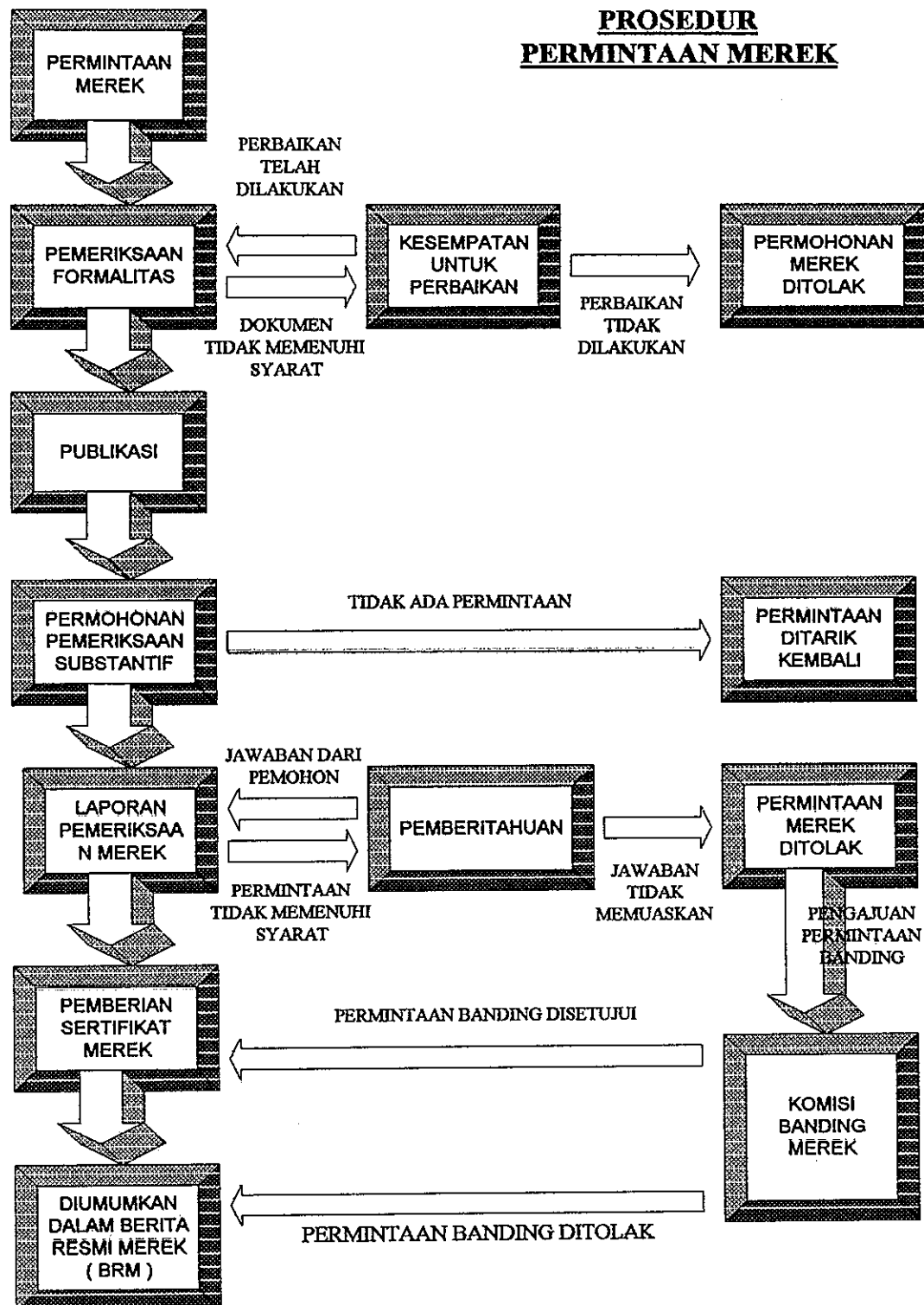
Selain itu masalah syarat dan tata cara permintaan pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dijanjikan akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) belum ada. Padahal soal bisnis dan usaha pemegang lisensi ini sudah marak dan berjalan hampir bersamaan dengan berlakunya Undang-undang Merek itu sendiri. Karena belum diaturnya masalah itu, maka setiap pendaftaran lisensi pasti ditolak. Kenyataan ini sudah barang tentu bertentangan dengan jiwa dan kehendak undang-undang ini untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam lalu lintas perdagangan yang semakin mengglobal.

Kiranya jika kendala-kendala yang ada tidak segera diatasi, sekali lagi kepastian hukum di Indonesia yang jadi pegangan pelaku ekonomi baik domestik maupun mancanegara dalam berusaha, dapat menjadi titik lemah yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Untuk itulah diperlukan pembangunan aspek administrasi yang mendukungnya, terutama peningkatan tata kerja dan kualitas pelayanan oleh Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten Dan Merek, secara terus menerus dan bahkan mempercepat untuk membenahi

segala kekurangan-kekurangan yang ada, agar mampu mendukung cita-cita yang hendak dituju oleh Undang-undang Merek itu sendiri, khususnya di era perdagangan bebas yang akan segera kita hadapi bersama.

PROSEDUR PERMINTAAN MEREK



SUMBER : DITJEN HAK CIPTA, PATEN
DAN MEREK, DEPKEM

B. Keterkaitan Antara Undang-undang No. 19 tahun 1992 Terhadap Undang-undang no. 7 tahun 1994 Yang Berkaitan Dengan TRIPs.

Pemerintah Indonesia sejak tanggal 2 Nopember 1994 secara resmi menjadi anggota *the World Trade Organization* (WTO) setelah RUU NO. 7 tahun 1994 tentang Ratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, disetujui Oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-undang.

Berdasarkan kaedah hukum kebiasaan internasional, yang kemudian dirumuskan dalam " konvensi Wina, 1969 ",¹⁴⁵ ratifikasi adalah tahapan ke 3 yang harus dilalui oleh suatu persetujuan internasional, seperti halnya " *Final Act-Uruguay Round* ", agar dapat mempunyai kekuatan mengikat. Dua tahapan sebelumnya adalah : (1) penanda-tanganan naskah persetujuan dan (2) persetujuan oleh lembaga sesuai dengan ketentuan konstitusional masing-masing negara , bagi Republik Indonesia, misalnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dilampauinya ketiga tahapan tersebut memiliki akibat hukum eksternal maupun internal bagi negara yang melakukannya.¹⁴⁶

¹⁴⁵ . Meskipun Indonesia belum meratifikasi " Konvensi Wina " 1969 ini, namun kaedah-kaedah yang ada dapat dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional, karena hakekat " konvensi Wina, 1969 itu sendiri sebenarnya adalah kodifikasi hukum kebiasaan internasional yang berlaku pada saat itu ".

¹⁴⁶ . Agus Brotosusilo, *Dampak Yuridis, Pertimbangan Ekonomis Dan Cakrawala Sosiologis, Ratifikasi " Agreement Establishing The World Trade Organization/ WTO " Oleh Indonesia, Hukum Dan Pembangunan, Nomor 2 Tahun XXVI, April 1996.*

Untuk itulah dengan telah diratifikasinya Persetujuan Pembentukan WTO di Marrakech oleh Indonesia, yang didalamnya juga memuat 28 kesepakatan perdagangan global yang dihasilkan dari sidang tingkat Menteri para anggota GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*), dan diantara 28 kesepakatan itu salah satunya adalah TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), maka akan menimbulkan akibat hukum, baik eksternal maupun internal dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan.

Akibat hukum **eksternal** yang timbul adalah bahwa melalui tindakan tersebut berarti negara yang bersangkutan (indonesia, pen) telah menerima segala kewajiban yang dibebankan oleh persetujuan internasional yang dimaksud. Sedangkan akibat hukum **internal** adalah kewajiban bagi negara yang bersangkutan (Indonesia, pen), untuk merubah hukum nasionalnya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan internasional yang bersangkutan.¹⁴⁷

Akibat hukum internal ini tidak terbatas pada usaha untuk merubah hukum nasionalnya agar sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan internasional yang bersangkutan, namun juga harus disertai dengan jaminan bahwa hukum nasional tersebut diterapkan dengan konsisten dan atau hukum nasional tersebut harus berlaku efektif.

¹⁴⁷. Ibid.

Hal ini sejalan dengan apa yang telah ditentukan dalam persetujuan TRIPs itu sendiri, antara lain :

Pasal 2 ayat 2 TRIPs :

- " Setiap negara anggota harus menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan berbagai konvensi internasional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya konvensi Paris, konvensi Bern, Konvensi Roma dan *Treaty and The Intellectual Property in respect of integrated Circuit* ".

Pasal 41 ayat 1 TRIPs :

- " Setiap negara anggota harus menjamin bahwa prosedur pelaksanaan dalam bagian ini, tersedia dalam hukum nasional masing - masing, dengan demikian akan diperoleh kemungkinan untuk mengambil tindakan yang efektif terhadap setiap perbuatan melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam persetujuan ini, juga harus disediakan kemungkinan untuk mengambil tindakan-tindakan secara tepat agar dapat dihindarkan pelanggaran lebih lanjut dan dalam penerapannya menimbulkan rasa takut bagi pelanggar berikutnya. Pelaksanaan dari perlindungan ini harus sedemikian rupa untuk menghindari terjadinya halangan pada arus perdagangan yang sah.

Adapun mengenai pengaturan lebih lanjut dalam hukum nasional masing-masing negara anggota, persetujuan TRIPs ini memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk menentukan cara-cara yang dianggap sesuai dalam menerapkan ketentuan-ketentuan TRIPs ke dalam sistem dan praktek hukum mereka. Bahkan setiap negara anggota dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih luas dari yang diwajibkan TRIPs, sepanjang tidak

bertentangan dengan apa yang telah digariskan TRIPs. (pasal 1 ayat 1 TRIPs).

Dengan demikian pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam TRIPs hanya mengatur masalah-masalah yang bersifat global saja, sedangkan pengaturan spesifiknya diserahkan pada setiap negara anggota.

Dari gambaran di atas nampak sudah, bahwa dengan telah diratifikasinya suatu persetujuan, khususnya persetujuan yang berkaitan dengan TRIPs, maka sudah tidak dapat ditawarkan lagi, bahwa Indonesia harus menyesuaikan dan melaksanakan secara efektif hukum nasionalnya di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektualnya sejalan dengan segala apa yang telah diatur dalam persetujuan TRIPs.

Salah satu yang akan menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini, yaitu Undang-undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek, dalam arti sampai sejauhmana ketentuan TRIPs menghendaki peraturan perundang-undangan di bidang Merek ini untuk para anggotanya dan atau sampai sejauhmana UU No. 19 tahun 1992 memiliki persamaan dan perbedaan dengan persetujuan TRIPs serta langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan.

Namun sebelum masuk ke dalam pokok pembahasan secara umum perlu juga diutarakan, bahwa apa yang termasuk dalam

lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual pada persetujuan TRIPs ini ternyata lebih luas pengaturannya di bandingkan dengan peraturan perundang-undangan nasional.

Di dalam persetujuan ini obyek yang menjadi lingkup Hak Atas kekayaan Intelektual tidak hanya terbatas pada Hak Cipta, Paten, Merek dan Desain Produk Industri saja, tetapi lebih dari itu.

Secara keseluruhan obyek yang diaturinya antara lain :

1. Hak Cipta;
2. Merek Dagang;
3. Paten;
4. Desain Produk Industri;
5. Indikasi Geografis (*Geographical Indication*);
6. Lay out Desain dari Integrated Circuit (*Design Lay out of Integrated Circuit/ Topography Right*);
7. Rahasia Dagang (*Indisclosed Information atau Trade Secret*).

Dari ke tujuh bidang Hak Atas kekayaan Intelektual di atas, tiga yang terakhir merupakan hal baru yang belum begitu dikenal dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Pertama, Indikasi Geografis(*Geographical Indication*).

Menurut pasal 22 TRIPs adalah indikasi yang memberi ciri pengenal bahwa suatu barang berasal dari wilayah suatu negara anggota, suatu bagian region atau lokasi di dalam wilayah tersebut,

dimana sudah dikenal reputasi, kualitas dan lain-lain dari barang yang bersangkutan.

Indikasi Geografis ini mengatur sarana hukum bagi pihak yang berkepentingan untuk mencegah :

- a. Penggunaan cara penandaan atau penyajian suatu barang yang menyatakan atau memberi kesan bahwa, barang itu berasal dari suatu daerah geografis lain dari pada tempat asal aslinya yang menyesatkan masyarakat mengenai asal usul geografis itu;
- b. penggunaan yang merupakan tindakan persaingan tidak jujur di dalam pengertian pasal 10 bis konvensi Paris (1967).¹⁴⁸

Atas permintaan pihak yang berkepentingan, negara anggota akan menolak pendaftaran apabila terdapat indikasi dari suatu Merek

¹⁴⁸ . Pasal 10 bis Konvensi Paris (1967), mengatur masalah konkurensi curang (*Unfair Competition*) yang menentukan bahwa :

- (1). Negara anggota Konvensi terikat untuk menjamin warganya atas perlindungan hukum yang efektif terhadap konkurensi curang;
- (2). Setiap tindakan persaingan yang bertentangan dengan ketidakjujuran dalam industri atau barang dagangan ditetapkan di dalam Undang-undang persaingan konkurensi curang.
- (3). Yang dianggap sebagai konkurensi curang, khususnya adalah perbuatan sebagai berikut :
 1. semua tindakan yang karena sifatnya sedemikian rupa hendak menciptakan kekacauan mengenai perusahaan barang-barang atau usaha industri dan dagang dari seorang konkuren;
 2. kenyataan palsu berkenaan dengan perdagangan yang sifatnya sedemikian rupa untuk mendiskreditkan usaha pengusaha atau barang industri yang merupakan pesaing;
 3. petunjuk atas kenyataan - kenyataan tentang pemakaian dalam rangka perdagangan yang dapat mengelabui publik berkenaan dengan sifat, proses pembuatan, sifat-sifat karakteristik dan cocoknya untuk tujuan tersebut untuk kegunaan mereka atau kualitas barang.

dagang untuk mengelabui mata publik berkenaan dengan tempat asal barang-barang sebenarnya. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi indikasi geografis yang meskipun secara harfiah adalah benar sebagai suatu wilayah, daerah atau tempat asal barang itu, memberikan kesan salah kepada masyarakat bahwa barang itu berasal dari daerah lain. Sebagai contoh : di Indonesia ada kota bernama USA, kemudian kota tersebut memproduksi barang dan memberi label Made in USA.

Beberapa ketentuan penting mengenai indikasi geografis ini dalam persetujuan TRIPs adalah :

1. Pengaturan indikasi geografis pada dasarnya berkaitan erat dengan pengaturan Merek dagang. Pendaftaran Merek dagang dapat dibatalkan bila memuat indikasi Geografis yang menyesatkan (pasal 22 ayat 3 jo 23 ayat 2);
2. Pengaturan indikasi geografis untuk minuman anggur atau minuman keras mendapat perlakuan khusus (23 ayat1)
3. Perlindungan indikasi geografis yang dikecualikan dalam suatu negara adalah indikasi geografis yang identik dengan istilah umum yang dipakai dalam suatu negara (pasal 24 ayat 6).

Dalam UU No. 19 tahun 1992 belum ada penegasan yang serupa bahwa dapat diminta pembatalan dari suatu pendaftaran

Merek apabila memakai indikasi geografis yang berlainan dari sebenarnya barang itu berasal.

Ke dua, LayOut Desain dari Integrated Circuit (*Design Lay out of Integrated Circuit/ Topography Right*).

Mengenai Desain LayOut dalam pasal 35 TRIPs dinyatakan bahwa peserta dari persetujuan TRIPs akan menyediakan perlindungan kepada design layout (*Topographies*) dari integrated Circuit sesuai dengan ketentuan - ketentuan dalam *Treaty on intellectual property respect of integrated circuits*.

Selanjutnya dalam Pasal 36 TRIPs mengatakan Anggota peserta TRIPs akan menganggap sebagai tidak sah , apabila perbuatan-perbuatan mengimpor, menjual atau dengan cara lain mendistribusikan untuk tujuan komersial, satu *layout design* yang dilindungi. Juga dianggap sebagai tidak sah suatu aktikel yang mengandung *integrated circuit* ini sepanjang mengandung suatu reproduksi dari layout design yang tidak sah.

Layout design ini mulai dikenal setelah dikeluarkannya peraturan mengenai perlindungan semi konduktor di Amerika yang dikenal semi *Conductor Chip Protection Act* 1984. Undang-undang ini bukan melindungi chip atau semi konduktornya, melainkan untuk melindungi pola (*pattern*) dalam bentuk tiga dimensi yang dipetakan dalam lempengan yang kemudian disebut chip.

Berkaitan dengan masalah ini untuk kondisi saat ini di Indonesia tidak demikian penting, oleh karena perkembangan ekonomi Indonesia saat ini masih dalam taraf permulaan perkembangan. Untuk itu belum begitu urgent untuk keadaan Indonesia.¹⁴⁹

Ketiga, Rahasia dagang (*Indisclosed Information* atau *Trade Secret*)

Hal ini diatur dalam pasal 39 TRIPs menyatakan :

- (1) untuk menjamin adanya perlindungan secara efektif terhadap konkurensi yang tidak wajar, seperti tercantum dalam pasal 10 bis dari Konvensi Paris (1967), maka anggota TRIPs akan memberikan perlindungan terhadap rahasia perusahaan yang dikenal sebagai “ *undisclosed information* ” sesuai dengan apa yang ditentukan di dalam persetujuan TRIPs.
- (2). Perseorangan atau badan hukum mempunyai kemungkinan untuk menghindari bahwa informasi yang ada padanya secara sah tetap berlaku di bawah pengawasan mereka dan tidak dapat diberitahukan, diperoleh atau dipakai oleh pihak ke tiga tanpa pengetahuannya dalam suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan praktik perdagangan yang fair, sepanjang informasi itu :
 - a. bersifat rahasia dalam arti bahwa informasi itu sebagai suatu benda atau dalam bentuk konfigurasi dan rakitan yang tepat komponen-komponennya dan umumnya tidak diketahui diantara orang, atau mudah diakses oleh orang-orang di dalam lingkungan yang biasanya berurusan dengan jenis informasi itu;
 - b. memiliki nilai komersial karena kerahasiannya;
 - c. menimbulkan alasan kepada orang yang secara hukum menguasai informasi untuk merahasiakannya.

¹⁴⁹ . Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual Indonesia Dan Perjanjian Internasional : Trips, GATT, Putaran Uruguay (1994)*, Op. Cit. Halaman 50.

Dengan demikian hal-hal penting mengenai *trade secret* ini dalam TRIPs, antara lain :

- a. Perlindungan Rahasia dagang pada dasarnya berkaitan erat untuk menjamin perlindungan yang efektif dalam mengatasi persaingan yang tidak jujur
- b. Yang menjadi obyek (materi pokok) mengenai Rahasia Dagang ini adalah informasi maupun data;

Informasi yang dilindungi, yaitu : informasi yang merupakan rahasia yang tidak diketahui umum; sedangkan data yang dilindungi adalah data yang diserahkan kepada pemerintah sebagai syarat pemberian ijin memasarkan produk farmasi atau produk kimia pertanian yang memanfaatkan bahan kimia baru.

Pada dasarnya yang akan diberikan perlindungan sebagai *Rahasia Dagang* adalah informasi yang mempunyai nilai komersial. Untuk itu diadakan tindakan-tindakan pengawasan oleh orang yang secara sah mengawasi, agar tetap dipertahankannya kerahasiaannya.

Melihat pokok persoalan yang dikandung dalam Rahasia Dagang tersebut memang beralasan bila pengelompokannya dimasukkan dalam masalah Hak Atas Kekayaan Intelektual, karena didasarkan pertimbangan bahwa yang dirahasiakan tersebut

kebanyakan lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia berupa gagasan-gagasan atau ide khas yang telah berwujud.

Selanjutnya perlu juga dikemukakan mengenai Desain Produk Industri, meskipun bukan hal baru di Indonesia, karena sudah ada pengaturannya dalam pasal 17 Undang-undang No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, namun sampai saat ini pelaksanaan Peraturan Pemerintahnya belum juga ada.

TRIPs sendiri sudah mengatur masalah ini dalam pasal 25 TRIPs yang menyatakan peserta persetujuan TRIPs akan memberikan perlindungan terhadap desain produk industri yang diciptakan secara bebas, baru atau asli. Desain adalah tidak baru atau tidak asli jika desain itu tidak secara nyata-nyata berbeda dari desain yang sudah dikenal atau gabungan dari ciri desain yang sudah dikenal. Perlindungan itu tidak meliputi desain yang pada dasarnya diilhami oleh pertimbangan teknis atau fungsional.

Kembali pada pokok bahasan, bagaimana ketentuan TRIPs ini menghendaki pengaturan di bidang Merek dalam perundang-undangan para negara anggotanya.

Pengaturan mengenai Merek dagang dalam UU no. 19 tahun 1992, sebenarnya sudah dijiwai oleh Konvensi Paris (1967) mengenai perlindungan Hak Milik Perindustrian (*Convention For*

Protection of Industrial Property) dimana Indonesia ikut meratifikasinya dengan Keppres No. 24 tahun 1979.

Namun demikian sejauhmana hal tersebut sejalan dengan apa yang dikehendaki persetujuan TRIPs diperlukan penelusuran. Untuk itu penelusuran masalah dibahas sebagai berikut :

- a. Lingkup Merek.
- b. Merek Yang Dapat Dilindungi.
- c. Cara memperoleh dan Dipertahankannya Hak Atas Kekayaan Intelektual
- d. Hak Yang Diberikan Kepada Pemilik Merek;
- e. Permintaan Banding.
- f. Jangka Waktu Perlindungan Hukum Hak Atas Merek.
- g. Tata cara Pidana.
- h. Gugatan Ganti Rugi.

a. Lingkup Merek.

Seperti halnya UU NO. 19 tahun 1992, di dalam persetujuan TRIPs ini perlindungan terhadap Merek meliputi dua jenis yaitu Merek Dagang dan Merek Jasa.¹⁵⁰ Pengaturan ke dua

¹⁵⁰ Pasal 16 ayat 2 TRIPs menyatakan bahwa ketentuan dalam pasal 6 bis Konvensi Paris secara mutlak mutatis mutandis juga akan dipakai bagi jasa-jasa. Jadi bukan saja untuk barang-barang tapi juga untuk jasa-jasa di Merek bersangkutan sudah terkenal, akan diperhatikan apa yang sudah dikenal oleh khalayak ramai dalam lapisan masyarakat bersangkutan. Juga apabila pengetahuan dari masyarakat bersangkutan itu telah dibina melalui hasil promosi dari Merek bersangkutan. Bandingkan hal ini dengan Pasal 2 UU No. 19 tahun 1992 : Merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa.

jenis merek ini diatur bersamaan, karena tidak dibedakan dalam perlindungannya. Oleh karena itu pendaftaran Merek jasa dapat ditolak berdasarkan persamaan pada pokoknya dengan suatu Merek dagang, begitu pula sebaliknya.

b. Merek Yang Dapat Dilindungi.

Menurut ketentuan Pasal 15 TRIPs, maka setiap tanda atau gabungan tanda yang dapat membedakan barang atau jasa dari perusahaan satu dengan perusahaan lainnya dapat dianggap sebagai Merek dagang.

Tanda semacam itu, khususnya kata-kata yang meliputi nama pribadi, huruf, angka, unsur kiasan dan gabungan warna serta setiap gabungan tanda semacam itu, dapat didaftarkan sebagai Merek Dagang.¹⁵¹ Jika suatu tanda tidak secara nyata membedakan barang atau jasa yang bersangkutan, anggota dapat mengatur bahwa pendaftaran dipersyaratkan pada adanya kekhasan yang diperoleh karena penggunaan. Anggota dapat mempersyaratkan pendaftaran, bahwa tanda harus secara visual dapat dipahami. Ketentuan ini tidak menghalangi suatu anggota untuk menolak pendaftaran suatu Merek dagang karena alasan

¹⁵¹ . Bandingkan dengan pasal 1 ayat 1 UU NO. 19 tahun 1992 tentang Merek. Pasal 1 ayat 1 tersebut menentukan bahwa, Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

lain, sepanjang alasan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Paris (1967).¹⁵²

Syarat pendaftaran Merek tidak mutlak dikaitkan pada penggunaannya.¹⁵³ Pendaftaran tidak dapat ditolak hanya berdasarkan alasan bahwa Merek dagang tidak digunakan dalam waktu tiga tahun terhitung sejak permintaan diajukan.¹⁵⁴ Setiap Merek baik sebelum ~~Merek~~ itu didaftarkan maupun segera

¹⁵² Dalam Konvensi Paris (versi Stockholm), masalah ini diatur dalam pasal 6 bis yang mengatur tentang Merek terkenal. Anggota dari konvensi Paris harus menolak atau membatalkan pendaftaran dan melarang pemakaian dari Merek yang merupakan reproduksi, imitasi atau penerjemahan yang dapat menciptakan kekeliruan (kekacauan) dari suatu Merek yang dipandang di negara, dimana Merek terdaftar atau dipakai sebagai suatu merek yang terkenal. Dan sudah merupakan Merek orang lain untuk barang-barang yang sama atau serupa .

Bandingkan hal ini lebih lanjut dengan pasal 6 UU No. 19 tahun 1992.

Pasal 6 (1). Permintaan pendaftaran Merek ditolak oleh Kantor Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis yang termasuk dalam satu kelas.

Pasal 6 (2). Permintaan pendaftaran Merek juga ditolak oleh Kantor Merek apabila:

- a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, Merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem, dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- c. merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- d. merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi Hak cipta, kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang hak ciptaan tersebut.

¹⁵³ Bandingkan dengan pasal 8 ayat 1 UU No.19 tahun 1992 : satu permintaan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang atau jasa.

¹⁵⁴ Bandingkan dengan pasal 51 ayat 2 , Penghapusan pendaftaran atas prakarsa Kantor Merek dapat dilakukan apabila diperoleh bukti yang cukup bahwa :

- a. Merek tidak digunakan berturut-turut selama tiga tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir atau
- b. Merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

sesudah Merek didaftarkan dipublikasikan.¹⁵⁵ Mengenai kesempatan yang cukup bagi permintaan untuk membatalkan pendaftaran perlu diatur.¹⁵⁶

¹⁵⁵ . Bandingkan dengan pasal 19, 20 dan 28 UU No. 19 tahun 1992.

Pasal 19 menentukan bahwa Kantor Merek dalam waktu selambat-lambatnya empat belas hari sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek, mengumumkan permintaan pendaftaran merek yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 10 dan dalam hal diajukan dengan menggunakan hak prioritas, harus telah dipenuhi pula ketentuan pasal 12 dan pasal 13.

Pasal 20 menentukan bahwa :

- (1) Pengumuman berlangsung selama enam bulan dan dilakukan dengan :
 - a. menempatkan pada papan pengumuman yang khusus disediakan untuk itu dan dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat; dan
 - b. menempatkan dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Kantor Merek.
- (2) Tanggal mulai diumumkannya permintaan pendaftaran merek dicatat oleh Kantor Merek

Pasal 28 menentukan bahwa :

- (1) Dalam hal pemeriksaan merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) berkesimpulan bahwa permintaan pendaftaran merek dapat disetujui, maka Kantor Merek :
 - a. mendaftarkan merek tersebut dalam Daftar Umum Merek
 - b. memberitahukan pendaftaran merek tersebut kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek.
 - c. memberikan sertifikat Merek; dan
 - d. mengumumkan pendaftaran tersebut dalam Berita resmi Merek.

¹⁵⁶ . Bandingkan dengan pasal 51, 56 dan 57 UU No. 19 tahun 1992.

Pasal 51 :

- (1) Penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dilakukan Kantor Merek baik atas prakarsa sendiri maupun berdasarkan permintaan pemilik merek yang bersangkutan
- (2) Penghapusan pendaftaran atas prakarsa Kantor Merek dapat dilakukan apabila diperoleh bukti yang cukup bahwa :
 - a. merek tidak digunakan berturut - turut selama tiga tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir atau
 - b. merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.
- (3) Permintaan penghapusan pendaftaran merek oleh pemilik merek baik untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas, diajukan kepada Kantor Merek.
- (4) Penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dicatat dalam Daftar Umum Merek, dan diumumkan dalam berita Resmi Merek.
- (5) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) masih terikat perjanjian lisensi, maka penghapusan hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi.
- (6) Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) hanya

Selain itu, anggota dapat mengatur mengenai kesempatan untuk melawan pendaftaran suatu Merek dagang.¹⁵⁷

dimungkinkan apabila penerima lisensi dengan tegas setuju untuk menyampingkan adanya persetujuan tersebut dalam perjanjian lisensi.

- (7) Pencatatan penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 56 :

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diajukan oleh pemilik merek yang tidak terdaftar.
- (3) Pemilik merek terkenal yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mengajukan permintaan pendaftaran merek kepada Kantor Merek.
- (4) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pemilik merek dan Kantor Merek melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (5) Dalam hal pemilik merek yang digugat pembatalannya bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia gugatan diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 57

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan seharusnya tidak dapat didaftarkan karena mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

¹⁵⁷. Bandingkan dengan ketentuan pasal 22 dan 23 UU No. 19 tahun 1992 mengenai Keberatan dan Sanggahan.

Pasal 22 :

- (1) Selama jangka waktu pengumuman, setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kantor merek atas permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah merek yang berdasarkan Undang-undang ini tidak dapat didaftar atau harus ditolak
- (3). Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Kantor Merek dalam waktu selambat-lambatnya empat belas hari sejak tanggal penerimaan keberatan mengirim salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran Merek.

Pasal 23 :

- (1) Orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 kepada Kantor merek.

Disamping itu dalam pasal 21 TRIPs dinyatakan bahwa untuk mengalihkan Merek, boleh dengan atau tanpa peralihan dari usaha dari Merek dagang bersangkutan.¹⁵⁸

Jadi dalam Undang-undang NO. 19 tahun 1992 sudah sejalan dengan apa yang dikehendaki dalam persetujuan TRIPs yaitu tidak adanya keharusan untuk juga mengalihkan nama baik atau reputasi dan lain-lainnya yang terkait dengan Merek yang bersangkutan.

C. Cara Memperoleh dan dipertahankannya Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Pengaturan ini bersifat umum tidak hanya pada Merek, tetapi juga meliputi lingkup hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya. Hal ini tepatnya diatur dalam pasal 62 sub 1 dan sub 2 TRIPs, yang menyatakan negara anggota dapat mengadakan persyaratan mengenai tata cara dan formalitas yang harus dipenuhi untuk dapat memanfaatkan perlindungan dan memperoleh hak atas kekayaan intelektual. Tetapi prosedur dan formalitas ini harus

(2) Sanggahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya dua bulan sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Kantor Merek.

¹⁵⁸ . Bandingkan dengan Pasal 42 UU No. 19 tahun 1992 mengenai Pengalihan Hak Merek terdaftar.

Pasal 42 :

(1). Pengalihan hak atas Merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik atau reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan merek tersebut;
(2). Pengalihan hak atas merek terdaftar hanya dicatat oleh Kantor Merek apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima bahwa merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang atau jasa.

konsisten dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah tertera dalam persetujuan ini (62 sub 1).

Apabila disyaratkan bahwa untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual harus dilakukan suatu pendaftaran, maka anggota persetujuan ini menyetujui bahwa prosedur untuk memberikan izin atau pendaftaran bersangkutan, disamping harus dipenuhi syarat-syarat substantif juga harus menentukan bahwa pemberian hak atas registrasi ini akan dilakukan dalam jangka waktu yang wajar. Satu dan lain hal untuk menghindarkan adanya pengurangan waktu yang diberikan untuk perlindungan yang bersangkutan.

Dalam hubungan ini dalam Undang-undang No. 19 tahun 1992, dinyatakan bahwa prosedur pendaftaran ini akan melalui fase pengumuman yang tidak melampaui 6 bulan (pasal 20)¹⁵⁹ dan setelah itu akan diadakan pemeriksaan substantif. Hasilnya mengenai pendaftaran akan dilaksanakan dalam jangka waktu 9 bulan (pasal 26).¹⁶⁰ Untuk itu dirasa sudah sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh persetujuan TRIPs.

¹⁵⁹ . Lihat Catatan Kaki No. 153.halaman 165

¹⁶⁰ . Pasal 26 :

Pemeriksaan diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya sembilan bulan sejak :
 a. tanggal berakhirnya pengumuman; atau
 b. tanggal berakhirnya jangka waktu untuk menyampaikan sanggahan.

d. Hak Yang Diberikan Kepada Pemilik Merek.

Menurut Ketentuan dalam pasal 16 TRIPs dinyatakan pemilik dari Merek terdaftar akan mempunyai hak *eksklusif* untuk melarang pihak ke tiga yang tidak mempunyai persetujuan darinya, untuk memakai Merek yang sama atau serupa untuk barang-barang atau jasa-jasa yang adalah sama atau menyerupai dengan barang-barang atau jasa-jasa untuk mana Merek dagang bersangkutan didaftarkan. Pemakaian bersangkutan itu tidak boleh menimbulkan kekacauan. Dalam hal telah dipakainya suatu tanda yang sama untuk barang atau jasa yang sama maka kemungkinan kekacauan ini selalu dianggap ada.

Hak yang disebut di atas tidak boleh merugikan hak yang telah ada sebelumnya, atau tidak menutup kemungkinan bagi anggota untuk mengatur agar hak itu dipersyaratkan pada adanya penggunaan. Untuk menentukan apakah suatu Merek dagang telah diketahui umum, perlu diperhatikan pengetahuan akan Merek dagang itu di dalam bidang yang bersangkutan, termasuk pengetahuan di negara anggota itu yang diperoleh sebagai akibat promosi Merek dagang yang bersangkutan.¹⁶¹

¹⁶¹. Lihat Catatan Kaki no. 152. halaman 165

Disini dapat kita lihat perumusan dalam pasal 16 TRIPs bahwa ditekankan atas dipakainya Merek bersangkutan secara sama atau serupa dengan pihak lain. Jadi disini dibatasi pada Merek yang sama dan barang yang sama. Hal ini bila kita bandingkan dengan Undang-undang No. 19 tahun 1992 sudah dipenuhi sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam pasal 6 ayat 1.¹⁶²

e. Permintaan peninjauan kembali.

Persoalan ini secara tegas telah pula diatur dalam TRIPs, antara lain pada pasal 41 ayat 4 dan pasal 62 ayat 5.

Pasal 41 ayat 4 mengatakan para pihak yang terlibat dalam proses akan diberi kesempatan untuk meminta peninjauan kembali oleh Instansi yuridis berkenaan putusan akhir administrasi, dan Pasal 62 ayat 5 TRIPs menyatakan bahwa putusan administrasi yang final di dalam tata cara Hak Atas kekayaan Intelektual ini dapat ditinjau kembali oleh instansi peradilan atau quasi peradilan.

Apabila dibandingkan dengan UU No. 19 tahun 1992 sebagaimana diatur dalam pasal 31,¹⁶³ bahwa penolakan

¹⁶² Ibid.

¹⁶³ Pasal 31 :

- (1) Permintaan banding dapat diajukan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Permintaan banding diajukan secara tertulis kepada komisi Banding Merek oleh

pendaftaran Merek karena alasan-alasan yang substantif harus diajukan kepada Komisi Banding Merek. Disini tidak dibukanya kemungkinan turutanya pihak peradilan untuk memeriksa apakah dalam pelaksanaan oleh instansi administratif dalam hal penolakan Merek, telah benar-benar didasarkan atas interpretasi yang tepat terhadap UU No. 19 tahun 1992. Persoalan ini kiranya perlu dipertimbangkan dalam revisi UU Merek yang akan datang.

f. Jangka Waktu Perlindungan Hukum Atas Merek.

Pasal 18 TRIPs mengatakan bahwa pendaftaran pertama serta setiap perpanjangan pendaftaran suatu Merek dagang berlaku untuk jangka waktu tidak lebih tujuh tahun. Pendaftaran Merek dagang dapat diperpanjang tanpa batas.

Dalam Undang-undang No. 19 tahun 1992 dalam pasal 7 ditentukan bahwa Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran Merek yang bersangkutan. Hal ini melampaui jangka waktu 7 tahun yang ditentukan dalam pasal 18

orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan tembusan kepada Kantor Merek.

- (3) Komisi Banding Merek adalah badan khusus yang diketuai secara tetap oleh seorang ketua merangkap anggota dan berada dilingkungan departemen yang dipimpin Menteri
- (4) Anggota Komisi Banding Merek berjumlah ganjil sekurang kurangnya tiga orang yang terdiri dari ahli yang diperlukan dan atau Pemeriksa Merek senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan
- (5) Ketua dan anggota Komisi Banding Merek diangkat dan diberhentikan oleh Menteri

TRIPs. Mengenai pembaharuan/ perpanjangan jangka waktu perlindungan juga ditentukan dapat diminta dalam jangka waktu yang sama 10 tahun (pasal 36). Cara permintaan perpanjangan ini harus diajukan dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan dan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek terdaftar itu (pasal 36 ayat 2).

Sehubungan dengan permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar disetujui, sebagaimana diatur dalam pasal 37 UU No. 19 tahun 1992, apabila :

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Merek tersebut; dan
- b. barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan.

Berkaitan dengan adanya persyaratan di atas, telah pula disinggung oleh pasal 19 TRIPs, kalau diisyaratkan pemakaian ini untuk pendaftaran, maka pendaftarannya dapat dibatalkan sedikitnya setahun terus menerus tidak dipakai (19 ayat 1).

Selanjutnya dikatakan apabila terdapat penghalang yang sah untuk tidak dapat dipakai Merek itu, seperti misalnya pembatasan impor oleh pemerintah untuk barang atau jasa bersangkutan, maka dianggap alasan yang sah untuk tidak

dipakainya merek yang bersangkutan itu.¹⁶⁴ Pemakaian dari Merek ini oleh orang lain yang disetujui oleh pemilik Merek dianggap sebagai pemakaian dari Merek ini untuk mempertahankan pendaftarannya (19 ayat 2). Yang terakhir ini merupakan wujud pengakuan sistem lisensi yang juga diatur dalam pasal 44 UU no. 19 tahun 1992.

g. Tata Cara Pidana.

Pasal 61 TRIPs menguraikan antara lain :

Para anggota TRIPs harus menyediakan sanksi pidana yang memadai, apabila telah terjadi pemalsuan merek dagang atau hak cipta yang dilakukan secara sengaja. Perbuatan ini harus dilakukan dalam taraf komersial. Agar dicantumkan kemungkinan untuk memenjarakan atau menentukan denda membayar uang yang jumlahnya cukup tinggi, untuk menakutkan mereka. Hal ini juga berlaku untuk kejahatan yang dipandang serupa. Dalam hal tertentu, maka upaya hukum yang terdapat ini akan mencakup pula penyitaan, pemusnahan barang-barang palsu atau bahan -bahan yang telah dipergunakan dalam pemalsuan.

Mengenai hal ini kiranya UU NO. 19 tahun 1992 sudah cukup memadai. Karena telah cukup tinggi baik sanksi pidana maupun denda yang akan dijatuhkan.¹⁶⁵ Disamping itu telah pula

¹⁶⁴ . Persoalan ini belum diatur dalam UU NO,19 tahun 1992. Jadi persoalan ini juga harus dipertimbangkan sebagai hal tidak dipakainya Merek, sehingga harus pula dipertimbangkan untuk tidak mengabulkannya perpanjangan perlindungan.

¹⁶⁵ . Lihat Pasal 81, 82, 83 dan 84 UU No. 19 tahun 1992.

Pasal 81 : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lamatujuh tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

dianutnya sistem komulatif bukan alternatif. Jadi disamping si pelaku bisa dijatuhi pidana penjara sekaligus denda.

h. Gugatan Ganti Rugi.

Berkaitan dengan masalah ganti rugi ini TRIPs memberikan pengaturannya dalam pasal 45 ayat 1, 50 ayat 1.

Pasal 45 ayat 1 mengatakan Instansi peradilan berwenang untuk memerintahkan pihak yang melakukan pelanggaran untuk membayar kepada pemegang hak yang sah Hak atas kekayaan Intelektual, uang ganti kerugian yang wajar untuk mengganti kerugian, karena pelanggaran yang dilakukannya.

Pasal 50 ayat 1 mengatakan :

instansi Peradilan berwenang untuk mengambil tindakan sementara (provisi) dengan segera dan efektif. Perintah ini dapat dilakukan pada peristiwa-peristiwa sebagai berikut :

sub. a. untuk menghindarkan adanya kemungkinan pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual, pihak penggugat terutama berkenaan dengan masuknya barang-barang palsu dalam saluran perdagangan dapat bertindak. Benda benda yang diimpor, segera setelah melampui " Bea Cukai " , dapat dihindarkan beredar lebih jauh.

Pasal 82 : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek, terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain, untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 83 : Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 dan 82 adalah kejahatan.

Pasal 84 : (1). Setiap orang yang memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang atau jasa tersebut menggunakan Merek terdaftar milik orang lain secara tanpa hak, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

(2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

- sub. b. Bahwa dapat diambil langkah-langkah untuk dapat mempertahankan alat-alat pembuktian berkenaan dengan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Dalam UU No. 19 tahun 1992 permasalahan ini diatur

dalam pasal 72, 73 dan 74.

Pasal 72 ayat 1 : pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang menggunakan mereknya, yang mempunyai persamaan baik pada pokoknya atau pada keseluruhannya secara tanpa hak, berupa permintaan ganti rugi dan penghentian pemakaian merek tersebut.

ayat 2 : Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Pasal 73 :

Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat pula dilakukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri atau bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan

Pasal 74 :

- (1) Atas permintaan pemilik merek atau penerima lisensi merek terdaftar selaku penggugat, selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut
- (2) Dalam hal tergugat dituntut pula menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan setelah penggugat membayar harganya kepada tergugat.

Dari gambaran di atas permasalahan gugatan ganti rugi pun sudah terpenuhi dalam pengaturan UU No. 19 tahun 1992.

Berdasarkan seluruh uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa secara substantif, apa yang diatur di dalam UU No. 19 tahun 1992 ***tidak jauh berbeda*** dengan apa yang telah diatur dalam persetujuan TRIPS. Namun demikian ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Akibat hukum internal dari diratifikasinya persetujuan WTO dalam praktek pelaksanaannya bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Hal ini tidak terlepas karena berbagai kendala. Salah satu diantaranya adalah bahwa akibat kebijakan pemerintah RI yang selama beberapa dekade lebih mengutamakan pembangunan ekonomi dibandingkan kehidupan sosial dan budaya lainnya, termasuk bidang hukum.

Namun setelah RI melalui UU No. 7 tahun 1994 meratifikasi hasil Persetujuan akhir putaran Uruguay, peran hukum di negara ini tidak dapat ditawar-tawar lagi. Pilihan yang ada adalah transaksi bisnis harus mempertimbangkan aspek hukum atau sistem perekonomian negara ini akan

porak poranda akibat pembalasan silang yang dilakukan oleh negara-negara mitra dagang sesama anggota WTO.

Dalam lingkup nasional, tugas pemerintah di bidang hukum sekarang adalah melakukan tindak lanjut sebagai konsekuensi ratifikasi terhadap Persetujuan akhir putaran Uruguay. Tindak lanjut tersebut meliputi seluruh komponen sistem hukum, baik komponen substansi ¹⁶⁸, komponen struktural ¹⁶⁹ maupun komponen budaya hukum ¹⁷⁰.

Pembenahan komponen substansi sistem hukum meliputi pembentukan hukum nasional yang sejiwa dengan isi kesepakatan yang tertuang dalam Persetujuan akhir putaran Uruguay. Kegiatan ini dapat berupa penyempurnaan perundang-undangan nasional yang telah ada tetapi belum memenuhi kesepakatan multilateral yang tertuang dalam " *Final Act* " tersebut atau bahkan merumuskan perundang-undangan yang baru sepanjang ketentuan semacam itu ada dalam " Persetujuan akhir putaran Uruguay, namun belum ada pengaturannya dalam perundang-undangan nasional.

¹⁶⁸. Komponen substansi dari sistem hukum adalah hasil nyata yang diterbitkan sistem hukum, yaitu berupa aturan-aturan, baik tertulis (misalnya Undang-undang) maupun yang tidak tertulis (misalnya kaedah-kaedah dalam hukum kebiasaan).

¹⁶⁹. Komponen struktural dari sistem hukum adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, yang intinya adalah lembaga-lembaga yang berkaitan erat dengan sistem hukum, misalnya : lembaga pembuat Undang-undang, Pengadilan, Kepolisian dan lembaga-lembaga lainnya.

¹⁷⁰. Budaya hukum adalah sikap-sikap warga masyarakat yang intinya adalah nilai-nilai yang dianutnya.

Berkaitan dengan masalah tersebut hal yang perlu diperhatikan menyangkut Indikasi Geographis, oleh karena pengaturannya tidak dapat dilepaskan dengan pengaturan Merek dagang. Di dalam peraturan perundang-undangan nasional, masalah ini belum dikenal. Untuk itu perlu diantisipasi dalam penyusunan revisi UU Merek.

Dari hasil penelitian di lapangan banyak sekali beredar barang-barang, seperti mainan anak-anak (mobil, robot dan boneka) yang dipasarkan dengan menggunakan label Made in Japan dan Made in RRC, yang sebenarnya menurut salah seorang pedagang di daerah glodok Jakarta dan Pasar Baru, Cikapundung, Bandung, dibuat oleh sebuah pabrik di daerah Tangerang maupun oleh industri rumah tangga. Hal ini sudah barang tentu telah mengelabui konsumen dan untuk itu patut diancam dengan hukuman.

Pembenahan komponen struktural meliputi penyempurnaan lembaga-lembaga hukum yang ada sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Dalam beberapa hal bahkan perlu dibentuk lembaga pendukung yang baru. Dalam rangka penyempurnaan ini yang terpenting sebenarnya adalah peningkatan koordinasi antara Dirjen HCPM, Bea Cukai, Imigrasi, Kepolisian, Kejaksaan dan Departemen Kehakiman,

disamping perlunya meningkatkan keahlian personalia yang bertanggungjawab untuk mengelola lembaga-lembaga tersebut.

Budaya hukum tercermin dari sikap warga masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Respon masyarakat Indonesia terhadap penerapan persetujuan-persetujuan di bawah WTO akan sangat dipengaruhi oleh sistem yang dianutnya.

Sebagaimana diketahui bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam persetujuan -putaran akhir Uruguay dilandasi pandangan bahwa keberadaan nilai materialisme dalam ketentuan tersebut lebih menonjol dari nilai spritulisme. Demikian pula keberadaan nilai individualisme lebih menonjol dari komunalisme. Apabila produk hukum yang mengacu pada sistem nilai semacam ini dihadapkan pada masyarakat yang menganut sistem nilai dan memiliki budaya hukum yang berbeda, bukan hal yang aneh bila penerapan produk hukum tersebut akan mengalami kesulitan.

Falsafah guyub atau rasa kebersamaan yang dianut masyarakat Indonesia sebagai masyarakat agraris, kiranya perlu dipertimbangkan sebagai faktor yang dapat

menghambat dalam memasyarakatkan Hak Atas kekayaan Intelektual.

Berdasarkan kenyataan ini mudah dipahami, bahwa masalah pelaksanaan produk hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia masih akan menghadapi hambatan yang tidak mudah untuk diatasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa memang masih sangat berat upaya yang harus dilakukan agar perundang-undangan nasional yang merupakan implementasi dari persetujuan akhir putaran Uruguay dapat berlaku secara efektif. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa informasi dan pemahaman tentang hal tersebut dari instansi resmipun dirasakan masih kurang sekali.

Disamping itu sebagaimana telah diutarakan dalam pembahasan sebelumnya bahwa Direktorat Jenderal Hak Cipta Paten dan Merek Departemen Kehakiman RI selama ini dalam menangani permohonan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual menunjukkan kurangnya pengalaman dan keseriusan dalam penanganannya.

Sebagai gambaran baru-baru ini dikeluarkannya kembali Surat Edaran Dirjen HCPM Nomor H-U.M. 06.10-01,

tanggal 29 Januari 1997 yang berisi tentang Penertiban kembali Administrasi Pendaftaran Merek. Surat Edaran ini dikeluarkan untuk mengatasi kesalahan terutama yang menyangkut pendaftaran Merek disamping untuk membuktikan bahwa perusahaan yang akan memperpanjang pendaftaran Merek masih beroperasi. Untuk itu permohonan perpanjangan perlindungan Merek harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari Instansi pembina usaha.

Surat Edaran ini telah mendapat tanggapan dari beberapa praktisi hukum, yang pada intinya mengeluh karena disamping akan menambah jalur birokrasi juga akan mengancam ratusan pemilik Merek akan kehilangan haknya di Indonesia.

Praktisi hukum JB Lumenta menilai kebijakan Dirjen ini sulit dimengerti dan diterima karena tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Kebijakan yang mengharuskan adanya pernyataan dari instansi yang membina usaha itu bertentangan dengan UU No. 19 tahun 1992 dan PP No. 23 tahun 1992. Dalam Pasal 9 PP No. 23 tahun 1993 disebutkan surat pernyataan itu diberikan oleh pemilik Merek atau dapat pula berupa surat keterangan dari instansi pembina usaha. Jadi itu kan alternatif dan boleh dipilih

pemohon Merek. Akibat dari perubahan itu, banyak permohonan perpanjangan Merek yang diajukan dikembalikan, sedangkan batas waktu perlindungan diberikan 6 bulan sebelum jangka waktu perlindungan berakhir, sulit untuk dipenuhi, sehingga kemungkinan mereka akan kehilangan haknya.¹⁷²

George Widjojo dan Rizawanto Winata mengatakan surat Dirjen HCPM sebaiknya direvisi untuk disesuaikan dengan UU No. 19 tahun 1992 maupun dengan TRIPs. Disamping itu Surat Dirjen itu terkesan mendadak dan tanpa tenggang waktu, yakni dikeluarkan tanggal 29 Januari 1997 dan berlaku 1 Februari 1997. Selanjutnya dikatakan Dirjen seharusnya tidak membuat kebijakan sendiri dengan mencantumkan persyaratan pendaftaran perpanjangan Merek yang tidak sesuai dengan UU Merek dan PP No. 23 tahun 1993.¹⁷³

Disamping itu hal lain yang dikeluhkan adalah keharusan Merek asing diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan untuk Merek ciptaan wajib dilampiri surat pendaftaran hak

¹⁷² Kompas 6 Februari 1997

¹⁷³ Kompas 7 Februari 1997.

ciptanya. Hal ini dinilai rancu antara Merek ciptaan dan hak cipta.

Kenyataan di atas setidaknya memberikan gambaran belum profesionalnya Dirjen HCPM dalam menangani masalah Merek.

Kelemahan-kelemahan yang ada pada sebagian sistem hukum ini mendesak untuk segera diperbaiki. Upaya untuk mewujudkan perundang-undangan nasional yang merupakan implementasi persetujuan akhir putaran Uruguay memerlukan perencanaan yang cermat, ditindak lanjuti pelaksanaan yang sungguh-sungguh dalam mencapai tujuan tersebut. Sejalan dengan tindakan tersebut, usaha untuk memasyarakatkan harus digalakkan sehingga warga masyarakat yang merupakan konsumen produk tidak melakukan sikap tindak yang bertentangan dengan jiwa dan semangat persetujuan tersebut. Karena kesalahan sebagai akibat ketidaktahuan dapat dijadikan sebagai alasan bagi mitra dagang dari negara lain sesama anggota WTO untuk menimbulkan kerugian pada sistem perekonomian Indonesia.

2. Berkaitan dengan Undang - undang Merek itu sendiri disamping belum memberikan penegasan Indikasi

geographis sebagaimana telah diutarakan di muka ada beberapa hal yang perlu disempurnakan, antara lain :

- a. Syarat permohonan pendaftaran Merek tidak mutlak dikaitkan pada penggunaannya. Pendaftaran tidak dapat ditolak hanya berdasarkan alasan bahwa merek dagang tidak digunakan dalam waktu tiga tahun terhitung sejak permintaan diajukan (pasal 15 ayat 3 TRIPs)..
- b. Permasalahan peninjauan kembali terhadap penolakan pendaftaran Merek karena alasan substantif oleh kantor Merek, persetujuan TRIPs membuka kemungkinan untuk ikut sertannya lembaga pengadilan memeriksa kebenaran alasan penolakannya.
- c . Pemegang Merek tidak diwajibkan menggunakan Merek meskipun terdaftar, apabila terdapat larangan impor atau pembatasan-pembatasan lain yang ditetapkan pemerintah.
- d. Berkaitan dengan perumusan pasal 74 ayat (2) UU No. 19 tahun 1992, dimana dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut,.....dan

setelah penggugat ***membayar*** harganya kepada tergugat.

Kiranya perumusan ini perlu dipertimbangkan, mengingat hal tersebut bertentangan dengan apa yang telah digariskan dalam perjanjian TRIPs. Dalam perjanjian TRIPs secara tegas merumuskan, bahwa Hakim disamping berwenang menghentikan atau mencegah barang bajakan dari peredaran, memerintahkan pihak yang melakukan pelanggaran memberikan ganti rugi juga berwenang memerintahkan agar barang dan alat-alatnya yang digunakan melakukan kejahatan dikeluarkan dari arus perdagangan atau dimusnahkan.

C. Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Di Bidang MEREK.

Kejahatan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) dewasa ini khususnya di Benua Asia dirasa semakin memprihatinkan. Hal ini terungkap dari hasil pertemuan *Intellectual Property Rights* yang diadakan oleh *United States Information Agency* dan Hongkong-America Center di Hongkong.

Berdasarkan data IIPA (*internasional Intelektual Property Alliance*), Asia mencatat rekor tertinggi dalam soal pembajakan Hak Atas Kekayaan Intelektual. IIPA mencatat Amerika Serikat kehilangan pemasukan devisa lebih dari 6 milyar dollar AS per tahunnya dari pembajakan di kawasan ini untuk tahun 1995. Negara-negara di Eropa Barat menduduki ke dua yang mencuri 3,6 milyar dollar AS per tahun untuk tahun 1995.¹⁷⁴

Menurut Wakil Presiden IIPA Dr. Steven J Metelitz, pembajakan terhadap program kinerja komputer aplikasi bisnis mencapai tingkat tertinggi untuk kawasan ini. Hampir 64 % dari pasaran program aplikasi bisnis di Asia adalah program hasil bajakan. Untuk ini saja Amerika Serikat dirugikan lebih dari 2,7 milyar dollar AS per tahunnya.

Indonesia tercatat juga sebagai negara yang masuk katagori negara pembajak Hak Atas Kekayaan Intelektual. Hal ini terlihat dari

¹⁷⁴. Lihat tabel pada halaman 187 dan 188.

PERKIRAAN KERUGIAN NERACA PERDAGANGAN AS AKIBAT PEMBAJAKAN 1995

	FILM		REKAMAN MUSIK		BISNIS APLIKASI		HIBURAN		BUKU		TOTAL RUGI
	RUGI	TINGKAT PERBAJAKAN	RUGI	TINGKAT PERBAJAKAN	RUGI	TINGKAT PERBAJAKAN	RUGI	TINGKAT PERBAJAKAN	RUGI	TINGKAT PERBAJAKAN	
ASIA											
AUSTRALIA	27.0	4%	3.8	4%	134.0	35%	n/a	n/a	1.2	n/a	188.0
CINA	124.0	100%	300.0	54%	489.0	96%	1,286.0	99%	125.0	n/a	2,323.0
HONGKONG	10.0	4%	5.0	13%	86.7	62%	112.2	74%	2.0	n/a	217.9
INDIA	58.0	99%	10.0	30%	114.6	78%	25.8	76%	25.0	n/a	233.4
INDONESIA	15.0	98%	2.0	9%	117.3	98%	82.6	80%	45.0	n/a	261.9
JEPANG	108.0	10%	n/a	n/a	1,009.9	55%	n/a	n/a	1.5	n/a	1,118.4
MALAYSIA	42.0	85%	1.9	15%	64.0	77%	48.0	71%	6.0	n/a	161.9
SELANDIA BARU	2.0	4%	n/a	n/a	15.6	40%	n/a	n/a	n/a	n/a	21.6
PAKISTAN	10.0	100%	5.0	94%	10.5	92%	8.0	80%	30.0	n/a	63.5
FILIPINA	26.0	90%	3.0	22%	33.2	91%	28.0	90%	70.0	n/a	160.2
SINGAPURA	1.3	2%	2.4	9%	115.2	53%	44.0	42%	1.0	n/a	164.4
KOREA SELATAN	17.0	15%	6.0	18%	294.0	76%	173.6	86%	25.0	n/a	515.6
SRI LANKA	10.0	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10.0
TAIWAN	29.0	15%	5.0	13%	115.2	70%	105.4	89%	6.0	n/a	260.6
THAILAND	29.0	65%	5.0	13%	80.2	82%	73.3	80%	32.0	n/a	219.5
VIETNAM	5.0	100%	n/a	n/a	25.8	99%	15.0	99%	7.0	n/a	52.8
ASIA LAINNYA	n/a	n/a	n/a	n/a	66.3	95%	n/a	n/a	n/a	n/a	66.3
KERUGIAN REGIONAL	613.8	30%	349.1	36%	2,776.5	64%	2,001.9	n/a	376.7	n/a	6,017.0

	FILM		REKAMAN MUSIK		BISNIS APLIKASI		HIBURAN		BUKU		TOTAL RUPI
	RUPI	TINGKAT PENGALAMAN	RUPI	TINGKAT PENGALAMAN	RUPI	TINGKAT PENGALAMAN	RUPI	TINGKAT PENGALAMAN	RUPI	TINGKAT PENGALAMAN	
TOTAL											
ASIA	513.8	30%	349.1	36%	2,775.5	64%	2,001.9	n/a	376.7	n/a	6,017.0
TIMUR TENGAH DAN MEDITERRANIA	247.8	75%	53.9	40%	180.3	83%	100.1	n/a	103.9	n/a	686.0
AMERIKA LATIN DAN KARABIA	289.0	55%	225.7	46%	835.5	n/a	368.5	n/a	128.5	n/a	1,847.2
KANADA	22.0	n/a	17.5	3%	270.0	44%	n/a	n/a	n/a	n/a	309.5
AFRIKA	11.0	99%	25.4	60%	170.6	73%	n/a	n/a	60.0	n/a	267.0
EROPA TIMUR DAN REPUBLIK CIS	453.9	85%	362.6	70%	533.9	83%	396.3	n/a	72.9	n/a	1,829.6
EROPA BARAT	709.6	20%	245.3	5%	2,451.1	46%	235.8	n/a	41.0	n/a	3,682.8
TOTAL	2,257.1		1,279.5		7,216.9		3,092.6		783.0	n/a	14,639.1

tingkat pembajakan atas program aplikasi bisnis dan film (laser, video konvensional dan VCD). Sekitar 98 % barang-barang yang dijual di Indonesia termasuk hasil pembajakan. Sementara untuk *software entertainment* tercatat 80 % barang yang beredar di Indonesia adalah bajakan.¹⁷⁵

Realitas di atas cukup memprihatinkan, karena ulah sekelompok orang, nama bangsa dan negara Indonesia dipertaruhkan di dunia internasional.

Sifat pelanggaran terhadap Hak Atas kekayaan Intelektual sebagaimana penulis uraikan telah menempatkan pelanggaran ini sebagai salah satu jenis kejahatan di bidang ekonomi.

Dalam kaitan ini perhatian internasional terhadap kejahatan ekonomi sangatlah wajar, karena kejahatan tersebut secara langsung berpengaruh dan mengancam program pembangunan ekonomi negara.

Pengaruh negatif dari delik-delik di bidang ekonomi terutama di negara-negara berkembang telah pula dikemukakan dalam laporan kongres PBB ke 7, bahwa kejahatan sebagai produk sosial disebabkan oleh beraneka ragam faktor dan diantaranya faktor ekonomilah yang memegang peranan utama.¹⁷⁶

¹⁷⁵ Kompas 17 Maret 1997.

¹⁷⁶ . Lihat catatan kaki No. 69 halaman 83.

Selanjutnya dikemukakan pula bahwa pengaruh negatif dari kejahatan-kejahatan terhadap program pembangunan nasional di negara-negara berkembang sangatlah jelas dan berbahaya. Di negara-negara sedang berkembang, program-program pembangunan nasional sangat dirintangi oleh semakin meningkatnya kejahatan - kejahatan ekonomi (*economic crimes*) seperti penggelapan, penipuan, penyelundupan, penghindaran pajak, penyalahgunaan bantuan (milik umum dan negara) korupsi yang merajalela, penyuapan dan penyalahgunaan kekuatan-kekuatan ekonomi oleh korporasi nasional dan transnasional.¹⁷⁷

Dengan memperhatikan pengaruh dan dampak negatif serta sifat atau ciri dari kejahatan ekonomi yang salah satunya antara lain karena peran korporasi, maka wajar bila pusat perhatian ditujukan pada upaya penanggulangannya.

Salah satu upaya penanggulangan kejahatan ekonomi termasuk di dalamnya kejahatan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual yang masih sering dipermasalahkan adalah dengan menggunakan hukum pidana. Penggunaan hukum pidana dinilai bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa sejarah menunjukkan

¹⁷⁷ . Lihat catatan kaki No. 70 halaman 83.

perekonomian Indonesia tidak menjadi baik meskipun ada ancaman pidana yang sangat berat.¹⁷⁸ Terlepas dari pendapat tersebut demikian Barda Nawawi Arief mengatakan dilihat dari sudut kebijakan upaya untuk mengoperasionalkan sanksi terhadap tindak pidana ekonomi (TPE) seyogyanya tidak semata-mata diutamakan pada pemberatan pidana pokok, tetapi juga pada upaya mengefektifkan pengoperasionalisasian jenis-jenis sanksi yang bersifat ekonomis dan administratif.¹⁷⁹

Sejalan dengan pernyataan di atas Muladi mengatakan, “ ambivalensi sikap dalam penegakan hukum ekonomi seringkali juga didasarkan atas skala prioritas pembangunan. Dalam sistem ekonomi yang berimbang dimana faktor ekonomi merupakan primadona karena *leverage effect* yang diharapkan terhadap bidang-bidang pembangunan yang lain, seringkali pendekatan non penal dikedepankan dari penggunaan sarana penal. Sebagai contoh dikemukakan beberapa kejanggalan dalam penegakan UU No. 4 tahun 1982. Saat ini bila terjadi total enforcement dari pasal 22 UU No. 4 tahun 1982, jelas akan menimbulkan kehancuran sebagian besar industri di Indonesia. Demikian pula penyelesaian tindak pidana perpajakan yang lebih senang menggunakan pendekatan administratif. Apalagi perlindungan

¹⁷⁸. Sudarto, **Hukum Dan Hukum Pidana**, Bandung, Alumni, 1981, Halaman 88.

¹⁷⁹. Muladi Dan Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Bandung, Alumni, 1992, halaman 163.

konsumen yang lemah mengingat aspek-aspek politik yang melekat padanya.

Lebih lanjut dikatakan dalam kasus-kasus yang serius secara teoritik pertimbangan pembedaan justru penting yakni untuk tujuan *moral and deterrent effects*. Dalam kejahatan dilakukan oleh korporasi alasan untuk sekali-kali menggunakan hukum pidana lebih beralasan mengingat viktimologisnya yang sangat luas. Kerugian dapat timbul terhadap negara (tindak pidana pajak), masyarakat (tindak pidana lingkungan), perusahaan saingan (kompetisi tidak jujur), karyawan (tindak pidana perburuhan), dan konsumen (tindak pidana penipuan melalui iklan).¹⁸⁰

Dilihat dari sudut politik kriminal penggunaan suatu sarana hukum tidak dapat secara a priori atau secara absolut dinyatakan sebagai suatu keharusan atau sesuatu yang harus ditolak. Hal ini berarti dilihat dari sudut politik kriminal pokok persoalannya tidak terletak pada masalah pro dan kontra terhadap penggunaan sanksi pidana, tetapi yang lebih penting adalah garis-garis kebijakan yang bagaimanakah yang seyogyanya ditempuh dalam menggunakan sanksi pidana.

Sanksi pidana dapat merupakan penjamin dan sekaligus pengancam terhadap kebebasan manusia. Sebagai penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan manusiawi. Demikian pula akan

¹⁸⁰. Muladi, Lihat catatan kaki No. 105 halaman 112.

menjadi pengancam apabila digunakan secara serampangan.

Memperhatikan alasan di atas nampaknya penggunaan hukum pidana masih diperlukan keberadaannya, meskipun dalam penerapannya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, cermat, selektif dan limitatif.

Kejahatan di bidang ekonomi khususnya di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual memerlukan strategi khusus dalam penanganannya. Hal ini selain pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual menurut ketentuan TRIPs pada hakekatnya terjadi dalam lingkup dan skala hubungan perdagangan internasional, juga sifat pelanggaran tersebut menghendaki/ menuntut metoda penegakan hukum yang berbeda secara mendasar dengan penegakan hukum terhadap perkara kejahatan lainnya.

Untuk itulah kebijakan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi termasuk kejahatan di bidang Hak Atas kekayaan Intelektual harus ditempuh dengan pendekatan politik kriminal. Terkait disini disamping masalah hukum (pidana, perdata dan administrasi) juga masalah etik / moral.

Dengan demikian dalam merumuskan politik kriminal terhadap kejahatan ekonomi termasuk di dalamnya kejahatan Hak atas Kekayaan Intelektual dapat digunakan sarana penal maupun sarana non penal.

1. *Penggunaan Sarana Penal.*

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *represif* (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Menurut Sudarto penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala (*kurien am symptom*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.¹⁸¹

Upaya penal pada hakekatnya sama dengan penegakan hukum pidana dalam arti sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi atau bekerja dan terwujud secara konkrit dalam menanggulangi kejahatan (kejahatan ekonomi).

Berkaitan dengan kejahatan ekonomi yang berkaitan dengan kejahatan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya Kejahatan di bidang Merek yang perlu diantisipasi di era perdagangan bebas adalah peran korporasi.¹⁸²

¹⁸¹ Sudarto, lihat catatan kaki no. 95 halaman 104.

¹⁸² .Korporasi sebenarnya adalah pengertian di bidang hukum perdata, sebagai badan hukum. Rechtsperson, legal entities atau Corporation. Istilah ini dalam hukum pidana diperluas menjadi " kumpulan terorganisir dari orang atau kekayaan baik merupakan badan hukum ataupun bukan ". Bandingkan dengan pasal 15 UU No. 7 Drt 1955 tentang **Tindak Pidana Ekonomi**, Pasal 17 UU No. 11 PNPS 1963 tentang **Tindak Pidana Subversi**, Pasal 49 UU No. 9 tahun 1976 tentang **Narkotika**.

Korporasi sebagai bagian dari kejahatan White Collor Crime hanya mencakup kejahatan oleh *Big Bussiness* dan bukan oleh *small Scale bussiness*. Contohnya a *defrauding stockholders* b. *defrauding the public* c. *defrauding the government*. Mardjono Reksodiputro, *Bahan Penataran" Hukum Pidana Dan Kriminologi"*, FH Undip, 1994, halaman 3.

Kejahatan-kejahatan korporasi yang menonjol sebagai dampak era globalisasi adalah : ¹⁸³

1. *Price fixing*, contohnya :

a. Para perusahaan raksasa melakukan persetujuan diantara mereka sendiri untuk menawarkan harga yang jauh dibawah harga pasar, tujuannya untuk melemahkan perusahaan-perusahaan kecil yang menjadi saingan. jika mereka sudah jatuh barulah mereka mulai menaikkan harga.

b. *Geographical market sharing*.

Para perusahaan membagi daerah-daerah pasar yang potensial ke dalam wilayah - wilayah yang memungkinkan salah satu anggota persengkongkolan itu melakukan penawaran harga yang rendah. Penawaran harga yang rendah itu dimungkinkan karena dalam satu wilayah tertentu hanya ada satu perusahaan yang menguasai.

c. *Rotational bidding*.

para perusahaan melakukan persengkongkolan melakukan sistem bergilir diantara para anggotanya untuk dapat memenangkan penawaran terhadap kontrak-kontrak bisnis atau kontrak dengan pemerintah, caranya mereka mengadakan

¹⁸³ . Dwidja Priyatno, **Antisipasi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi Dalam Era Globalisasi**, "Majalah Hukum Dan Pembangunan", Universitas Indonesia, Halaman 71.

koordinasi siapa yang harus memberikan penawaran yang luar biasa tingginya (sehingga gagal memenangkan kontrak) dan siapa yang dapat giliran memenangkan kontrak (dengan penawaran yang pantas).

d. *Identical bidding*.

Para perusahaan memberikan penawaran yang identik untuk setiap bentuk kontrak, walaupun sebenarnya ia sanggup memberikan penawaran yang berbeda .Tujuannya untuk memastikan semua penjaga mendapatkan bagian dari pasar yang tersedia tanpa resiko kehilangan keuntungan.

2. *False Advertising* (Penipuan iklan).

Bentuk penipuan melalui media untuk meyakinkan masyarakat agar produknya yang tidak sesuai dengan fakta menjadi laku di pasaran.

3. *Kejahatan Lingkungan*.

Perusahaan yang melalaikan pelestarian lingkungan dengan menimbulkan polusi akibat kegiatan produksi.

4. Berkaitan dengan kejahatan di bidang Hak Atas Kekayaan Interlektual yang dilakukan oleh korporasi menurut salah seorang peserta pertemuan *Intellectual Property Rights* (IPR) di Hongkong adalah *Piracy Industri*.

Indonesia yang tercatat sebagai negara yang termasuk negara pembajak Hak Atas Kekayaan Intelektual, menurut data IIPA (*International Intellectual Property Alliance*), diakui kebenarannya oleh Sekretaris Umum Asosiasi Rekaman Video Indonesia (ASIREVI) Wihadi Wiyanto, meskipun tidak tidak begitu saja mempercayai data-data yang dikemukakan. Bisa jadi angka dan datanya demikian, tetapi tidak terlalu tinggi. Karena kebanyakan barang bajakan yang beredar di Jakarta adalah produk Taiwan, katanya.¹⁸⁴

Dari pengamatan penulis khususnya berkaitan dengan kejahatan di bidang Merek, nampak banyak sekali beredar di pasaran pemalsuan produk pakaian jadi, seperti Hamer, Piere Cardin, Levis, Ero dan Osella yang menurut salah seorang penjualnya di pasok dari sebuah pabrik di Tangerang, Jawa Barat. Dari penelusuran ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya terdapat beberapa buah kasus , yaitu pemalsuan produk PT Maspion oleh PT Ganda Guna Indonesia (sedang dalam proses), Pemakaian Merek kaos Osella secara illegal oleh Wandu Pranoto, pengusaha konveksi, untuk itu dihukum dua tahun penjara.

Kesulitan dan sedikitnya data yang terungkap ke permukaan, bukan berarti kejahatan *Piracy Industri* yang dilakukan oleh korporasi maupun oleh pengusaha skala rumah tangga tidak banyak terjadi di

¹⁸⁴ . Kompas, 17 Maret 1977.

Indonesia. Hal ini lebih banyak disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

1. Kebijakan pemerintah yang selama beberapa dekade lebih mengutamakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan pembangunan di bidang kehidupan sosial dan budaya lainnya, termasuk bidang hukum. Akibatnya hukum dan penerapannya dibiarkan dalam kondisi yang memprihatinkan.
2. Terkait unsur kolusi, suatu proses kerjasama timbal balik antara aparat birokrasi dengan aktor ekonomi yang memiliki tanggungjawab bersama atas kerugian - kerugian yang diderita pihak ketiga. Sebagai contoh kasus mie- instant, produk makanan yang kadaluarsa; terbukti telah merupakan suatu tindakan yang tidak melindungi konsumen. Hal ini jelas merupakan pelanggaran yang memiliki aspek pidana, tidak hanya aspek keperdataan. Realitanya Pemerintah hanya menganjurkan kepada korporasi tersebut untuk menarik kembali produk yang kadaluarsa tanpa dilakukan tindakan lainnya.
3. Kejahatan yang terungkap dan dilakukan oleh korporasi maupun oleh pengusaha kecil pada umumnya diselesaikan dengan negosiasi, meskipun tidak jarang perbuatannya telah merugikan masyarakat konsumen.

4. Mempersoalkan pemalsuan Merek melalui pengadilan diakui banyak orang akan memakan waktu yang lama, meskipun pengadilan di Indonesia menganut sistem cepat, sederhana dan biaya murah, namun realitanya tidaklah demikian. Disamping itu menurut Dirjen HCPM Polri telah menangkap dan menahan pelaku, namun kemudian tersangka dibebaskan dan perkaranya tidak pernah sampai ke pengadilan.¹⁸⁵ Kenyataan di atas menunjukkan kepastian hukum masih sulit diraih, paling tidak lama diperolehnya.

Kiranya tidak berlebihan apabila salah satu laporan dari kongres PBB ke VI di Caracas, Venezuela 1980 mengatakan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran atau penyalahgunaan di bidang ekonomi (*economic abuse*) termasuk bentuk-bentuk pelanggaran yang sulit dijangkau oleh hukum.¹⁸⁶

Kesulitan tersebut dapat dimengerti, oleh karena karakteristik atau corak pokok dari pelanggaran di bidang ekonomi, termasuk kejahatan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya.

¹⁸⁵ Kompas, 20 Februari 1977

¹⁸⁶ . Lihat Catatan kaki No. 80 halaman 89.

Kedudukan sosial, ekonomi yang kuat dari si pelaku serta keadaan sekitar perbuatan yang mereka lakukan, tentu membawa problem tersendiri bagi usaha penanggulangannya, terutama menyangkut pengusutan dan treatmentnya. Dalam konteks ini, usaha penanggulangan melalui sarana penal, selain bermakna mengidentifikasi dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dilarang (kriminalisasi), dibutuhkan usaha maksimal untuk menetapkan dan mengoperasionalkan sanksi-sanksi yang tepat dan efektif sesuai dengan karakter atau sifat serta tujuan dari kejahatan dimaksud.

Untuk memahami serta menunjukkan logika penerapan sanksi pidana yang efektif dalam menanggulangi kejahatan di bidang ekonomi, khususnya kejahatan Merek, terlebih dahulu perlu dilihat kebijakan legislatif dalam merumuskan sanksi tersebut dalam hukum positif. Peninjauan masalah ini sangat penting karena kebijakan legislatif pada dasarnya merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses penegakan hukum pidana.

Dengan demikian tahap kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis bagi upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Tahap ini merupakan tahap formulasi yang menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap penegakan hukum berikutnya, yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

Kecenderungan yang menonjol dalam kebijakan legislatif dalam merumuskan sanksi pidana terhadap kejahatan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, selama ini lebih mengutamakan pidana pokok, dalam arti hanya memperberat sanksi pidana penjara dan denda yang dilipatgandakan.

Sebagai contoh dapat dikemukakan perumusan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 81, 82, dan 84 UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek sebagai berikut :

Pasal 81 : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 82 : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek, terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain, untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 84 ayat 1: setiap orang yang memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang atau jasa tersebut menggunakan Merek terdaftar milik orang lain secara tanpa hak, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dari ketentuan di atas nampak bahwa kebijakan legislatif dalam merumuskan ancaman sanksi pidana hanya mengutamakan pidana pokok saja tanpa memberikan alternatif kepada hakim untuk menerapkan atau memfungsikan jenis-jenis pidana yang bersifat ekonomis dan administrasi keperdataan.

Dalam hubungan ini sangat relevan himbauan kongres PBB ke VI lewat salah satu laporannya yang antara lain mengatakan bahwa untuk mengefektifkan penanggulangan kejahatan ekonomi disarankan penggunaan tindakan-tindakan yang bersifat keperdataan dan administratif (*civil and administrative measure*) disamping pidana penjara dan denda.¹⁸⁷

Himbauan dari Kongres PBB itu sejalan dengan apa yang telah digariskan dalam persetujuan TRIPs sebagaimana termuat dalam pasal 61 Trips sebagai berikut :

Pasal 61 TRIPs : Para anggota TRIPs harus memasukkan dalam hukum pidananya, hukuman yang memadai apabila terjadi suatu pemalsuan Merek dagang atau Hak Cipta secara sengaja. Pemalsuan dan pembajakan ini harus dilakukan dalam suatu taraf komersial. Agar dicantumkan kemungkinan memenjarakan atau menentukan membayar denda yang cukup tinggi untuk menakutkan mereka (*deterent*). Satu dan lain hal sejalan dengan hukuman yang berlaku untuk kejahatan yang dipandang serupa. Dalam hal tertentu, maka upaya hukum yang terdapat ini akan mencakup pula penyitaan, pemusnahan dari

¹⁸⁷ . Sixth UN Congress, Op. Cit, Halaman 68.

barang-barang palsu atau bahan-bahan yang telah dipergunakan dalam pemalsuan ini.¹⁸⁸

Dari apa yang telah dianjurkan oleh Kongres PBB maupun dalam persetujuan TRIPs pada hakekatnya dapat dimengerti, oleh karena pidana pokok pada dasarnya sangat terbatas jangkauannya, apalagi diterapkan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi yang tujuan utamanya mengutamakan keuntungan secara ekonomi.

Untuk itulah kiranya kebijakan legislatif dalam merumuskan sanksi pidana dalam suatu ketentuan undang-undang tidak lagi cenderung mengutamakan pidana pokok semata, tetapi perlu juga melengkapi dengan jenis-jenis sanksi berupa pidana tambahan dan tindakan tata tertib.

Dengan pengenaan sanksi pidana perampasan barang-barang tertentu sebagai contoh misalnya, penutupan pabrik atau pemusnahan barang-barang yang diduga hasil kejahatan, mempunyai dampak secara langsung terhadap kegiatan pemalsuan dan pembajakan yang bakal dilakukan. Selain itu nilai ekonomi dari barang tersebut relatif

¹⁸⁸. Bandingkan dengan Pasal 74 UU No. 19 tahun 1992 antara lain :

- (1). Atas permintaan pemilik Merek atau penerima lisensi Merek terdaftar selaku penggugat, selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan perdagangbarang atas jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut.
- (2). Dalam hal tergugat dituntut pula menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan setelah penggugat membayar harganya kepada penggugat. (garis bawah pen).

cukup tinggi, sehingga dapat melumpuhkan kegiatan tersebut secara menyeluruh.

Demikian pula dengan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim atau tindakan menempatkan perusahaan si terhukum di bawah pengampuan, menurut penulis sangat efektif secara strategis, karena paling tidak sanksi tersebut sekaligus berfungsi sebagai sarana sosial kontrol dari masyarakat demi menekan ruang lingkup kegiatan mereka. Masih banyak jenis sanksi lain yang sekatagori dengan sanksi-sanksi tersebut di atas yang dapat dioperasionalkan dan sangat efektif untuk menanggulangi kejahatan di bidang pemalsuan dan pembajakan Hak Atas kekayaan Intelektual, khususnya di bidang kejahatan Merek.

Sebenarnya secara formal tidak ada halangan untuk merumuskan penerapan sanksi-sanksi dimaksud secara tegas dalam suatu perundang-undangan, oleh karena sebagaimana diisyaratkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kita (KUHP), bahwa jenis-jenis pidana itu disamping tersedia dan dapat dijatuhkan untuk jenis tindak pidana tertentu.

Sebagai contoh hal ini secara jelas dianut oleh UU No. 7 Drt tahun 1955 sejauh menyangkut hakekat penjatuhan pidana tambahan dan tindakan tata tertib. Untuk jelasnya akan dikutip beberapa pasal dibawah ini :

Pasal 6 ayat 3 menyatakan lain daripada itu (pidana penjara, kurungan dan denda, pen), dapat dijatuhkan juga hukuman tambahan tersebut dalam pasal 7 (pencabutan hak, penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan si terhukum, perampasan barang-barang, pencabutan seluruhnya atau sebagian keuntungan tertentu) atau tindakan tata tertib dalam pasal 8 (dibawah pengampuan, membayar uang jaminan), dengan tidak mengurangi dalam hal-hal yang memungkinkannya dijatuhkannya tindakan tata tertib yang ditentukan dalam peraturan lain.

Pasal 9 ayat 1 menyatakan Tindakan tata tertib yang tersebut dalam pasal 8 dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pidana, kecuali dalam hal diberlakukan pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan pengertian bahwa dalam hal itu tidak dapat dijatuhkan tindakan tata tertib tersebut dalam pasal 8 sub b.

Pasal 15 ayat 1 menyatakan : jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum perseroan persatuan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap keduanya.

Memahami aturan yang terkandung dalam kutipan-kutipan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa pencantuman secara tegas perihal pidana tambahan dan tindakan tata tertib dalam suatu ketentuan undang-undang akan lebih mengefektifkan jenis-jenis pidana tersebut untuk diterapkan. Disamping itu dengan mengingat banyak

hakim-hakim yang masih berrfikir secara *legalistis*, sehingga tanpa pencantuman secara tegas akan berdampak pada tidak diterapkannya ketentuan tersebut dalam praktek.

Berkaitan dengan penerapan pidana tambahan dan tindakan tata tertib, misalnya sampai dilakukan penutupan perusahaan, mungkin ada yang berpendapat bahwa pengenaan pidana seperti itu akan merugikan banyak pihak, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat, karena sempitnya lapangan kerja saat ini atau dengan kata lain akan merusak atau mengganggu tata ekonomi masyarakat dan negara.

Terhadap pendapat tersebut dapat dikemukakan bahwa penggunaan *treatment-treatment* tidak harus dilakukan tanpa landasan rasional. Untuk itu selain dilakukan atau diterapkan secara rational proporsional, dibutuhkan profesionalisme serta semangat dan sikap yang dijiwai oleh suatu kehendak untuk memandang dan berkeyakinan bahwa dunia ini akan selalu menjadi lebih baik, bila ditangani secara bijaksana.¹⁸⁹

Hal yang paling utama sebenarnya dengan diterapkannya pidana tambahan dan tindakan tata tertib disamping akan efektif dan tepat guna, juga di dalamnya memuat sanksi yang bersifat ekonomi

¹⁸⁹ Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, halaman 8

dan administratif yang langsung menyentuh jaringan atau akar dari kejahatan.

Pengenaan pidana pokok yang dianggap berat, misalnya penjara dan denda tidaklah memadai untuk menanggulangi kejahatan, khususnya di bidang Merek, sebab sebagaimana telah disinggung di muka bahwa para pelaku dalam melakukan perbuatannya telah mengambil atau memperhitungkan resiko terhadap denda yang bakal mereka tanggung, dan itu semua telah diperhitungkan secara matang untung dan ruginya.

Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini dimana penegakan hukumnya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, sebagai contoh Putusan Mahkamah gung No. 2314. K/ Pid/1990, tanggal 10 April 1991 hanya menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan, terhadap Boen She Kwie (Akuy) yang telah terbukti melakukan pemalsuan Pestisida jenis Fungsida dengan Merek Daconil 75 W.P. dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 298/Pid/1987/PT.DKI, tanggal 25 Nopember 1987, hanya menjatuhkan putusan selama 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan terhadap Ny. Yanti Lisda yang telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana memperdagangkan pita-pita kaset berisi lagu-lagu yang dilekati dengan merek lain, tanpa dilekati/tanpa memakai stiker pajak penjualan dan melakukan persaingan curang. Disamping itu dapat pula kita lihat Pengadilan

negeri Jakarta Barat hanya menghukum Wandu Pranoto selama dua tahun penjara, karena pemalsuan Merek kaos Osella. Demikian juga putusan Pengadilan Negeri Surakarta tahun 1995 yang telah menjatuhkan hukuman enam bulan penjara dan denda Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Hisar Husma Gultom (32) dan Tatang Karsena (42), selaku Komisaris dan Direktur Utama PT. Multi Santosa yang telah terbukti memalsukan pupuk cair Merek Atonik produksi PT Mastalin Mandiri.¹⁹⁰

Kelemahan pidana penjara¹⁹¹ terhadap kejahatan ekonomi termasuk kejahatan di bidang Merek terletak pada keterbatasannya dalam menjangkau jaringan yang vital dan potensial yang mendukung terwujudnya kejahatan tersebut, seperti barang-barang tertentu yang justru berperan dalam kegiatan mereka. Oleh karena itu tidak mustahil bila kelak akan terwujud perbuatan yang disertai modus operandi yang lebih canggih.

Berdasarkan uraian di atas maka paling tidak dapat diketemukan dua kelebihan yang sekaligus menjadi corak pokok dari pidana tambahan dan tindakan tata tertib yang berpengaruh langsung

¹⁹⁰ . Lihat Kompas 26 Februari 1977.

¹⁹¹ . Masalah efektifitas pidana penjara ini dalam menanggulangi kejahatan bisnis masih diperdebatkan. Soedjono D, mengatakan kendatipun hukuman yang diperberat terhadap para pelaku tindak pidana bisnis mungkin dapat membuat yang lainnya jera terhadap kejahatan bisnis, tidak terdapatnya sanksi seperti itu hingga kini lebih menyulitkan untuk mengetahui apakah kejahatan bisnis ini dapat dijerakan dengan cara ini. Soedjono, *Kejahatan Bisnis*, Op.Cit, halaman, 99.

terhadap semakin merajalelanya kejahatan, khususnya kejahatan di bidang Merek, yaitu :

pertama, penambahan sanksi-sanksi tersebut pada pidana pokok, penjara untuk aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku, denda dapat menghapuskan atau paling tidak dapat mengurangi keuntungan yang mungkin dapat diraih atau telah ditargetkan. Dengan demikian sekaligus bersifat represif.

Ke dua, pengenaan sanksi - sanksi berupa pidana tambahan dan tindakan tata tertib adalah efektif untuk melemahkan atau mempersempit ruang gerak serta basis dan jaringan yang kondusif bagi terwujudnya atau semakin semaraknya kejahatan Merek. Dengan demikian berfungsi sebagai sarana preventif yang cukup handal.

Untuk itulah sekali lagi dalam tahap formulasi pencantuman pidana tambahan dan tindakan tata tertib, seperti pemusnahan barang-barang bajakan, pengumuman putusan hakim, menempatkan perusahaan di bawah pengampuan sampai pada penutupan perusahaan harus dirumuskan secara tegas. Tanpa itu akan berdampak tidak diterapkannya ketentuan tersebut dalam praktek, mengingat hakim kita pada umumnya masih berfikir legalistis.

Sebagaimana telah diutarakan di atas, tahap formulasi ini merupakan dasar, landasan dan pedoman bagi tahap penegakan hukum berikutnya. Oleh karena itu sebaik apapun perumusan dalam undang-undang dibuat pada tahap formulasi, tidak akan berarti bila tidak didukung oleh kebijakan aplikatif untuk adanya peranan aparat penegak hukum yang baik, karena hal tersebut memiliki peran strategis dalam proses penegakan hukum.

Melihat realitas yang ada selama ini kondisi penegakan hukum di tanah air selama ini khususnya yang berkaitan dengan kejahatan di bidang Merek masih belum memuaskan dalam arti belum ditanganinya persoalan tersebut secara serius.

Kondisi pembajakan di tanah air selama ini cukup semarak. Hal ini terlihat begitu banyaknya merek terkenal yang dibajak, seperti Guess, Esprit, D& G, Country Fiesta, Osella, Hammer yang begitu bebasnya dipasarkan di daerah blok M, Tanah Abang Jakarta, Pasar Baru Bandung, namun tidak diambil tindakan oleh aparat penegak hukum.

Sekalipun demikian diakui ada beberapa perusahaan yang telah ditindak meskipun masih belum sebanding dengan kejahatan yang terjadi. Hal ini tidak terlepas dari kondisi si pelaku sendiri yang pada umumnya adalah pelaku kelas teri (pengusaha konveksi) yang tidak mempunyai status ekonomi atau politik yang kuat.

Berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum di Hak atas kekayaan Intelektual, khususnya di bidang Merek selama ini sebenarnya tidak terlepas dari beberapa faktor sebagai berikut :

1. Pemusatan penanganan kejahatan di bidang HAKI termasuk Merek, hanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga masalah yang mungkin timbul adanya keengganan untuk berperkara di pengadilan bagi para pihak di daerah, karena faktor biaya dan waktu.
2. Penguasaan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) atas masalah HAKI masih kurang memadai, sehingga banyak pelaku yang tidak ditangkap maupun munculnya putusan yang belum menggembirakan.
3. Adanya faktor X yang mempengaruhi putusan pengadilan, sehingga banyak pemegang Merek yang tidak peduli, apabila mereknya dipasarkan secara illegal.

Dengan melihat kondisi yang ada, untuk meningkatkan aparatatur hukum yang sedang tidur secara hukum dan moral, kiranya perubahan perlu dilakukan, khususnya dalam menghadapi era perdagangan bebas dengan sanksi pembalasan silang (cross retaliation) yang mungkin dilakukan oleh pihak asing, antara lain melalui upaya sebagai berikut :

1. Membenahi lembaganya, baik di bidang seleksi penerimaan, pendidikan dan latihan, kenaikan jenjang, gaji yang memadai dan hukuman disiplin yang tegas bagi pelanggar.

2. Meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum dengan instansi terkait, misalnya, Ditjen Bea cukai dan Ditjen Imigrasi dan Ditjen HCPM.¹⁹²

2. Penggunaan Sarana Non Penal.

Penggunaan sarana non penal pada dasarnya adalah suatu upaya melalui berbagai usaha pencegahan kejahatan tanpa harus menggunakan sistem peradilan pidana (*prevention without punishment*).

Hal ini nampak adanya perbedaan antara sarana penal dan non penal, yaitu penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *represive* (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial. Adapun tujuan utamanya adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap timbulnya kejahatan.

¹⁹² . Lihat catatan Kaki no. 142 halaman 144

Penggunaan upaya non penal ini memiliki posisi kunci dan strategis dan atau pencegahan kejahatan ini harus lebih menonjol dan diutamakan dibandingkan dengan pemberantasan kejahatan.

Kongres PBB ke VII tahun 1985 dalam dokumen kongres mengenai "*crime prevention in the context of development*" (dokumen A/CONF.121/L9), membenarkan hal ini antara lain dengan menyatakan sebagai berikut : bahwa upaya-upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan yang mendasar.

Arief Gosita juga sependapat dengan pernyataan di atas, yang antara lain menyatakan :¹⁹³

1. Tindakan pencegahan adalah lebih baik dari tindakan represif dan koreksi. Usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokratis yang dapat menjurus ke arah birokratis yang merugikan/ penyalahgunaan kekuasaan/ wewenang.

Usaha pencegahan dapat dilakukan secara perorangan sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif. Misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi kurban kriminalitas, tidak lalai mengunci rumah/ kendaraan, memasang lampu di tempat gelap dan lain-lain.

2. Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti antara lain stigmatisasi (pemberian cap pada terhukum) pengasingan, penderitaan dalam berbagai bentuk pelanggaran hak asasi, permusuhan, kebencian terhadap satu sama lain, yang dapat menjurus ke arah *residivisme*.
3. Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian usaha pencegahan dapat

¹⁹³. Arief Gosita, dikutip dari A Karim Nasution, **Kriminalitas dan Pembangunan, Pencegahan Dan Pengendaliannya**, Prisma, No. 5 Mei 1982.

membantu orang mengembangkan orang bernegara dan bermasyarakat lebih baik lagi.

Selanjutnya Harijadi S. Hartowardoyo pernah pula menulis bahwa tindakan pencegahan adalah lebih penting dari pemberantasan dalam penanggulangan kejahatan. Ia mengatakan antara lain sebagai berikut : ¹⁹⁴

Konon ada kata bersayap yang dikatakan berasal dari Napoleon yaitu pertahanan terbaik ialah menyerang. Sebelum suatu kejahatan terjadi, sebelum suatu pelanggaran dilakukan orang, alat-alat negara melaksanakan tugasnya dengan mengambil langkah-langkah pencegahan.

Benar bahwa undang-undang sudah dibuat, peraturan pelaksanaannya sudah diumumkan, tapi dalam kenyataannya tidak semua rakyat tahu adanya undang-undang dan peraturan itu, disamping adanya kecenderungan untuk melanggarnya. Karena itu hukum hanya dapat ditegakkan, jika disamping mengundang hukum, alat-alat negara juga melakukan tindakan pencegahan itu. Jika langkah-langkah preventif sudah diambil tetapi pelanggaran terhadap tata-tertib masih juga berjalan, barulah pada tempatnya kita mengambil langkah represif atau pemberantasan. Dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, tindakan represif selalu merupakan langkah terakhir, bukan langkah pendahuluan.

Akhirnya perlu juga dikemukakan pendapat Presiden Soeharto, yang juga menegaskan pentingnya dilaksanakan pencegahan kejahatan disamping pemberantasannya sebagai berikut : ¹⁹⁵

Peristiwa-peristiwa kerusuhan disertai pengrusakan yang akhir-akhir ini menunjukkan gejala meningkat, perlu ditangani dengan tuntas. Diharapkan alat-alat keamanan, khususnya Kepolisian dengan bantuan dan kerjasama unsur-unsur ABRI serta alat keamanan lainnya, dapat mengambil langkah dan

¹⁹⁴ Kompas, 15 Maret 1982

¹⁹⁵ Kompas, 2 Pebruari 1997

menemukan pola operasional pencegahan dan pemberantasannya seefektif mungkin.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Untuk itulah dalam mengantisipasi kejahatan, khususnya kejahatan di bidang Merek di era globalisasi kita harus melihat permasalahan kejahatan secara makro dan dilakukan peninjauan secara dimensional. Hal ini berarti semua fenomena yang ada dan relevan yang dapat merupakan faktor kriminogen harus diperhitungkan. Dengan demikian kita harus melihat dan memperhatikan terlebih dahulu hubungan antara semua fenomena yang ada dan saling berkaitan, saling mempengaruhi.

Berkaitan dengan kejahatan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang Merek dimana adanya keterkaitan ini nampak dari adanya hubungan antara pelaku dan korban atau masyarakat sebagai calon korban. Korban sebagai partisipan utama memainkan peranan penting bagi terjadinya suatu kejahatan. Situasi

dan kondisi pihak korban dapat merangsang pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. Pihak korban sendiri tidak melakukan suatu tindakan, berkemauan atau rela menjadi korban. Situasi dan kondisi yang ada pada dirinyalah yang merangsang, mendorong pihak lain melakukan suatu kejahatan, karena kerap kali antara pihak pelaku dan pihak korban tidak terdapat hubungan terlebih dahulu. Dalam kondisi seperti ini pihak pelaku memanfaatkan pihak korban untuk memenuhi kepentingannya dan keinginannya berdasarkan motivasi serta rasionalisasi (bahkan melegitimasi tindakan jahatnya).

Berkaitan dengan kejahatan Merek, situasi dan kondisi korban yang pada umumnya termasuk golongan ekonomi kurang mapan, didorong oleh jaman yang serba konsumtif dan penuh gengsi, serba bikinan luar negeri, dimanfaatkan oleh pihak pengusaha atau korporasi untuk memenuhi kepentingan dan keinginannya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan membuat suatu produk bajakan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat dibalik usaha legalnya.

Atas dasar tersebut maka strategi yang perlu dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi timbulnya kejahatan Merek di era globalisasi, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penyuluhan hukum masyarakat.

Harus digaris bawahi bahwa betapun masalah Hak Atas Kekayaan Intelektual memang masih merupakan hal yang baru bagi sebagian besar masyarakat. Oleh karenanya, masalah pokoknya adalah penyebarluasan pemahaman tentang arti, fungsi dan peranan Hak Atas kekayaan Intelektual tersebut dikalangan masyarakat. Sama pula pentingnya menyebarluaskan pemahaman tersebut dikalangan aparat penegak hukum untuk lebih meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

Hasil pengamatan selama ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap masalah tersebut mempengaruhi terhadap tingkat kesadaran terhadap hak-hak yang dimiliki. Apalagi mengenai kapan dan bagaimana harus menegakkan atau mempertahankan hak itu sendiri, khususnya bagi pemilik Merek. Keadaan ini semakin memprihatinkan, kalau kondisi serupa juga berlangsung dikalangan aparat penegak hukum dan praktisi hukum.

Seiring dengan langkah di atas, pemahaman mengenai hal itu juga perlu terus diarahkan terhadap masyarakat guna menyadari hak dan kepentingannya selaku konsumen produk. Selama ini diakui, bahwa masyarakat tidak dapat berbuat

banyak, apabila dikelabui dengan Merek palsu dan produk yang tidak memenuhi standar.

Namun demikian penghargaan terhadap HAKI harus tetap tumbuh dari kalangan Hak Atas Kekayaan Intelektual itu sendiri. Merekalah yang berkepentingan dalam hal ini. Mereka jugalah yang pertama kali seyogjanya menjalankan peran utama melindungi kepentingannya dan sekaligus konsumennya. Hanya saja pemahaman hal-hal di atas memang harus diingatkan sejak awal dan kontinyu.

2. Peningkatan partisipasi masyarakat.

Peningkatan partisipasi masyarakat memiliki peran yang cukup besar, agar suatu rencana pemberantasan kejahatan sukses. Masyarakat hendaknya diarahkan menjadi patner yang baik dalam memberantas kejahatan, karena masyarakat sendiri adalah kekuatan yang dominan yang tidak dapat dikesampingkan dalam tujuan tersebut. Terlibatnya masyarakat dalam pemberantasan kejahatan, khususnya terhadap kejahatan Merek adalah sangat penting. Partisipasi demikian dapat memiliki berbagai bentuk, yaitu dari mobilisasi intensif semua sektor, sampai kepada usaha yang lebih sederhana, seperti melaporkan telah terjadinya pembajakan atau pemalsuan Merek, tidak membeli barang-barang hasil

bajakan. Hal ini penting sebagai usaha untuk membuat operasi penjahat menjadi lebih sulit.

3. Memberikan pendidikan soal Hak Atas kekayaan sedini mungkin.

Pendidikan disini memiliki peran yang cukup strategis, oleh karena persoalan Hak Atas kekayaan Intelektual masih dianggap asing oleh sebagian besar penduduk Indonesia yang dikenal sebagai penduduk yang agraris. Falsafah guyub atau rasa kebersamaan yang dianut masyarakat agraris secara mendadak terpaksa harus digantikan dengan falsafah yang datang dari Barat yaitu individualistis karena percepatan kemajuan jaman. Prinsip-prinsip yang tertuang dalam Hak Atas kekayaan Intelektual memang lebih mencerminkan adanya pengakuan sekaligus penghormatan atas hasil karya cipta seseorang. Untuk itulah melalui jalur pendidikan baik di tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi, diharapkan secara bertahap dapat merubah pola pikir masyarakat akan penghargaan terhadap karya cipta milik orang lain.

4. Peningkatan keadaan sosial-ekonomi masyarakat.

Hal ini juga tidak kalah strategisnya dalam mencegah timbulnya kejahatan Merek, oleh karena ditengah budaya konsumtif seperti sekarang ini, telah pula mendorong

masyarakat untuk memiliki sesuatu benda tanpa lagi memperhitungkan, apakah benda tersebut asli atau palsu, yang penting dapat terjangkau oleh kemampuan ekonominya. Apalagi dengan teknologi yang semakin canggih, produk asli maupun bajakan dari segi kualitas tidak berbeda jauh. Kondisi seperti ini telah pula dimanfaatkan oleh pengusaha untuk memalsukan atau membajak Merek atau hasil karya cipta seseorang yang sedang digandrungi oleh masyarakat. Oleh karena itu dengan meningkatnya sosial ekonomi masyarakat, kecenderungan masyarakat untuk lebih memilih barang yang murah dengan mentoleransi kualitas seminimal mungkin, secara bertahap akan berubah.

5. Kerjasama internasional.

Kerjasama internasional dewasa ini merupakan suatu keharusan dalam pelaksanaan program pencegahan kejahatan ¹⁹⁶, khususnya dalam kejahatan di bidang hak Atas kekayaan Intelektual, khususnya di bidang Merek, karena sifat transnasional dari kejahatan ini dalam segala bidang pada

¹⁹⁶. Menurut Braithwaite, kontrol yang efektif dalam menghadapi kejahatan transnasional harus dilakukan melalui kontrol yang bersifat internasional, yakni dengan kerjasama internasional yang lebih besar, apakah kerjasama internasional tersebut bertujuan untuk memadukan Undang-undang nasional, untuk mengadakan standar laporan yang bersifat uniform, untuk tukar menukar informasi terhadap praktek-praktek jahat atau untuk membangun kelompok internasional mengenai reporter anti korupsi. Dikutip dari I.S. Susanto, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Ekonomi*, Penataran " Hukum Pidana Dan Kriminologi ", Semarang 1995, Op. Cit. halaman 48.

umumnya selalu melibatkan teritorial negara lain. Untuk itu pula kerjasama ini diperlukan guna mencegah agar kejahatan tersebut tidak semakin besar.

Bentuk kerjasama ini dapat diwujudkan melalui pertemuan-pertemuan secara rutin antar anggota TRIPs atau antar pemerintahan untuk memantau perkembangan yang terjadi berkaitan dengan modus operandi kejahatan Merek, saling tukar informasi mengenai perkembangan Merek di masing-masing negara. Dalam konteks keadaan dan masalah ini maka sebaiknya pertemuan tersebut diagendakan setiap tahun, mengingat pesatnya dan semakin eratnya kaitan antara Hak Atas Kekayaan Intelektual perdagangan internasional. Mencegah dan memberantas kejahatan Hak Atas kekayaan Intelektual, khususnya pembajakan atau pemalsuan Merek yang sifatnya kejahatan transnasional merupakan komitmen moral dari masing-masing negara.

Kiranya segala apa yang terurai di atas, setidaknya merupakan langkah strategis untuk mencegah timbulnya kejahatan di Bidang Hak Atas kekayaan Intelektual, khususnya di bidang Merek atau paling tidak dapat menanggulangi tumbuh suburnya kejahatan tersebut.

Namun untuk itu semua akan segera terwujud bila diikuti oleh kemauan politik yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan semua pihak yang terkait untuk memberantas kejahatan tersebut.

Sebagai kata akhir hal yang perlu digarisbawahi, penyebaran Hak Atas kekayaan Intelektual oleh pihak pemerintah selama ini, harus diakui sejujurnya, bahwa usaha penyebarannya terasa kurang. Bagaimanapun juga usaha ini harus ditingkatkan, karena pemerintahlah yang pada dasarnya paling berkepentingan dan bahkan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan segala Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Perwujudan adagium bahwa " setiap orang dianggap mengetahui Undang-undang ", memang tidak cukup hanya mengundang suatu Undang-undang yang selesai dibuat dengan cara menempatkannya dalam Lembaran Negara. Lebih penting lagi, perlu ada usaha-usaha yang sungguh-sungguh untuk menyebar luaskan pemahaman materi Undang-undang tersebut kepada masyarakat termasuk aparat pemerintah, khususnya aparat penegak hukum. Untuk itu pemanfaatan peran mass media merupakan solusi terbaik untuk memasyarakatkan Undang-undang, termasuk Hak Atas kekayaan Intelektual.

BAB IV.

PENUTUP

IV. A. KESIMPULAN.

1. Secara substantif UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek telah memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemilik Merek dan sekaligus kepada konsumen. Hal ini nampak dari ruang lingkup pengaturannya yang tidak hanya terbatas pada Merek dagang saja, melainkan juga meliputi Merek Jasa. Disamping itu juga dianutnya sistem konstitutif yang meninggalkan sistem deklaratif, yang berarti perlindungan hukum atas Merek hanya akan berlangsung bila dimintakan pendaftaran, diakomodasikan kemungkinan pendaftaran dengan menggunakan hak prioritas, diintroduksinya lembaga pengumuman, kemungkinan penggunaan Merek berdasarkan perjanjian Lisensi dan diintroduksinya ancaman pidana yang cukup tinggi dan bersifat kumulatif.

Namun demikian masih nampak adanya kendala - kendala yang menghadang dalam penerapannya. Kendala tersebut antara lain dapat terlihat masih adanya kelambanan birokrasi dalam pemeriksaan persyaratan pendaftaran, sehingga

waktu yang diperlukan relatif cukup lama. Hal ini tidak terlepas dari kondisi petugas yang perlu ditingkatkan disamping masih kurangnya pengalaman Ditjen HCPM dalam mengelola pembinaan Merek, terbukti 5 tahun UU NO. 19 tahun 1992 berlaku, masih melakukan pembenahan menyangkut syarat-syarat pendaftaran Merek. (Surat Dirjen H.U.M. 06.10-01, 29 januari 1977)

Disamping itu belum dibentuknya anggota komisi Banding Merek, sehingga prosedur pengajuannya agak tersendat dan bagi para pihak yang pengajuan bandingnya atas penolakan Mereknya sudah masuk statusnya untuk sementara menjadi tergantung atau ditunda. Demikian juga persyaratan dan tata cara permintaan pencatatan lisensi, sebagaimana dijanjikan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) belum ada, sehingga konsekuensinya setiap pendaftaran lisensi pasti ditolak.

2. Dengan telah diratifikasinya persetujuan GATT putaran Uruguay, yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, sebagai konsekuensinya berupa akibat hukum internal, yang tidak hanya terbatas pada usaha untuk merubah hukum nasionalnya agar sesuai dengan persetujuan internasional yang bersangkutan, namun juga harus disertai jaminan bahwa hukum nasional tersebut

harus diterapkan secara konsisten atau dapat berlaku secara efektif.

Berkaitan dengan persetujuan TRIPs, langkah pembenahan meliputi komponen substansi (UU No. 19 tahun 1992), komponen struktural maupun komponen budaya hukum.

Dari hasil penelitian dan pengamatan, harus diakui secara jujur bahwa masih sangat berat upaya yang harus dilakukan meskipun secara substantif, apa yang diatur dalam UU No. 19 tahun 1992 tidak jauh berbeda dengan apa yang diatur dalam persetujuan TRIPs, namun demikian dari aspek struktural maupun budaya hukum masih cukup memprihatinkan.

Dari aspek substansi ada beberapa catatan yang perlu dikemukakan, karena belum diaturnya atau kurang tegasnya pengaturan tersebut dalam UU NO. 19 tahun 1992, antara lain menyangkut indikasi geographis yang belum diberikan penegasan, persyaratan pendaftaran Merek tidak dikaitkan dengan penggunaannya, adanya campur tangan pengadilan dalam penolakan pendaftaran Merek dan adanya larangan penggunaan Merek, apabila adanya larangan impor atau pembatasan yang ditetapkan pemerintah.

Dari aspek struktural hal yang perlu benahi menyangkut keseriusan penanganan Hak Atas kekayaan Intelektual, khususnya di bidang Merek oleh Pemerintah Cq Dirjen HCPM dalam arti adanya Undang-undang belum menjamin dalam pelaksanaannya, karena tidak dilengkapi atau belum adanya peraturan pelaksanaannya. Demikian juga dari aspek budaya hukum, nampak dari belum membudayanya penghargaan terhadap Hak Atas kekayaan Intelektual. Falsafah guyub atau rasa kebersamaan yang dianut oleh masyarakat agraris dan secara mendadak dihadapkan pada falsafah yang datang dari Barat yaitu individualistis, perlu dipertimbangkan merupakan salah satu penghambat terhadap pengakuan sekaligus penghormatan terhadap Hak Atas kekayaan Intelektual, khususnya di bidang Merek.

3. Kejahatan terhadap Hak Atas kekayaan Intelektual, khususnya di bidang Merek sebagai salah satu jenis kejahatan ekonomi memerlukan strategi khusus dalam penanganannya. Hal ini selain pelanggaran terhadap HAKI menurut ketentuan TRIPs pada hakekatnya terjadi dalam lingkup dan skala hubungan perdagangan internasional, juga sifat pelanggaran tersebut menghendaki/menuntut metoda penegakan hukum yang berbeda

secara mendasar dengan penegakan hukum terhadap kejahatan lainnya.

Untuk itulah kebijakan dalam mengatasi persoalan tersebut harus ditempuh dengan pendekatan Politik kriminal yaitu melalui jalur Penal maupun Non Penal.

Dalam pendekatan penal langkah yang perlu dilakukan pada taraf formulasi untuk mencantumkan secara tegas sanksi yang tidak hanya terbatas pada pidana dan denda saja, melainkan juga meliputi pidana tambahan dan tindakan tata tertib. Hal ini perlu dilakukan mengingat para hakim pada umumnya masih bersifat legalistik. Hal ini perlu ditempuh karena dari hasil penelitian dan pengamatan terhadap beberapa kasus yang ada kecenderungan hakim selalu menjatuhkan sanksi pidana dan denda saja, sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam Undang-undang yang bersangkutan.

Disamping itu yang tidak kalah pentingnya perlunya diijazahi kemungkinan untuk melakukan perjanjian ekstradisi diantara semua anggota GATT untuk menghindari tidak dapat dituntutnya seseorang karena locus delicti berada di luar jangkauan hukum.

Pada tahap aplikatif kondisinya cukup memprihatinkan, hal ini tidak terlepas dari kurangnya profesionalisme dan moral aparat penegak hukum itu sendiri. Untuk itu pembenahan lembaganya, baik di bidang seleksi penerimaan, pendidikan dan latihan, gaji yang memadai dan hukuman disiplin pada pelanggar merupakan solusi terbaik.

Terhadap upaya non penal strategi yang perlu dilakukan meliputi perlunya dilakukan penyuluhan hukum dan partisipasi aktif masyarakat, memberikan pendidikan HAKI sedini mungkin, peningkatan sosial ekonomi dan kerjasama internasional.

Dengan mengintegrasikan ke dua upaya tersebut, kebijakan penal dan non penal ini ke arah penekanan atau pengurangan faktor-faktor kondusif timbulnya kejahatan, diharapkan dapat menekan tumbuh suburnya kejahatan Merek, menumbuhkan kreatifitas masyarakat untuk selalu mencipta dan yang tidak kalah pentingnya masyarakat sebagai konsumen produk tidak dirugikan oleh sekelompok orang yang hanya mencari keuntungan dengan mengabaikan aspek moral.

IV. B. SARAN-SARAN.

Untuk mengantisipasi era perdagangan bebas, khususnya berkaitan dengan persetujuan tentang aspek-aspek perdagangan yang menyangkut Hak Atas kekayaan Intelektual (*agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), perlu kiranya secara terus-menerus dilakukan sosialisasi akan pentingnya penghormatan Hak Atas Kekayaan Intelektual, termasuk di bidang Merek di masyarakat luas dan tidak kalah pentingnya adalah penegakan hukum terhadap pembajakan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dilansir terbanyak dan tertinggi di kawasan Asia, termasuk di Indonesia.

Upaya penegakan hukum yang selama ini dinilai tidak serius, sudah waktunya dikembalikan pada aturan main yang seharusnya. Untuk itu pula sumber daya manusia aparat penegak hukum tanpa kecuali Hakim, Jaksa dan Polisi sebagai penyidik sudah dari sekarang ini dipersiapkan untuk mengantisipasi makin merebaknya industri pembajakan Hak Atas kekayaan Intelektual. Pembenahan administrasi yang jauh dari birokrasi yang berbelit hendaknya perlu juga dipikirkan disamping tersedianya tenaga yang handal.

Bagaimanapun pemberdayaan Hak Atas kekayaan Intelektual ini akan membawa dampak bagi perkembangan ekonomi bangsa. Miskinnya inovasi menyusul tidak dihormatinya hasil karya akan

membawa kemalangan bagi bangsa itu sendiri. Negara akan menjadi bangsa pemakai dan bukan sebagai pencipta.

Untuk itu semua hal yang tidak kalah pentingnya adalah kemauan politik dari pemerintah dan segenap pihak yang terkait untuk memberantas kejahatan Hak Atas kekayaan Intelektual, khususnya Merek secara sungguh-sungguh, kecuali bila mau disebut sebagai negara pembajak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adolf, Huala & Chandrawulan A, 1994, **Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional**, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Arief Nawawi, Barda, 1990, **Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Ekonomi**, Makalah Seminar “ Peranan Hukum Pidana Dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi, Semarang.
- , 1994, **Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara**, Semarang, Ananta.
- , 1991, **Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**, Makalah Seminar Kriminologi VI, Kerjasama Hukum Belanda.
- , 1995, **Efektifitas Pidana Penjara (Tinjauan dari Perspektif Kebijakan Legislatif)**, Makalah Seminar Tentang Pemasyarakatan, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- , 1996, **Batas-batas Kemampuan Hukum pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan**, Makalah Seminar “ Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang.
- , **Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)**, tanpa penerbit dan tahun penerbit.
- Atmasasmita, Romli, 1995, **Pengantar Hukum Pidana Internasional**, Bandung, Eresco.
- , 1994, **Anatomi Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi**, Makalah Penataran Fakultas Hukum UNPAR.
- , 1995, **Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana terhadap Kejahatan Transnasional Terorganisir**, Makalah Penataran Hukum Pidana Dan Kriminologi, Semarang.

- , 1994, **Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi**, Bahan Penataran Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi, Fakultas Hukum UNPAR, Bandung.
- Basri, Faisal, 1995, **Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI**, Jakarta, Erlangga.
- Barrett Margreth, 1991, **Intellectual Property**, first edition, Emanuel Law Outlines, Inc.
- Blau, Peter M & Meyer, Marshall W, 1981, **Birokrasi Dalam Masyarakat Modern**, Edisi kedua, UI-Press.
- Box, Steven, 1983, **Power, Crime And Mystification**, Tavistock Publication, London And New York
- Brotosusilo, Agus, **Dampak yuridis, Pertimbangan Ekonomis Dan Cakrawala Sosiologis, Ratifikasi" Agreement Establishing The World Trade Organization/WTO " Oleh Indonesia**, Hukum Dan Pembangunan Nomor 2 tahun 1996.
- Clinard, Marshall B & Peter C. Yeager, 1980, **Corporate Crime**, The Free Press, London.
- Cornish, W.R. 1989, **Intellectual Property**, London, Sweet & Maxwell.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1994, **Kejahatan Bisnis (Orientasi Dan Konsepsi)**, Bandung, Mandar Maju.
- , 1991, **Hukum Pidana Dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pasca Industri**, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar UNPAR.
- , 1994, **Kebijakan Non Penal Dalam menanggulangi kejahatan Di Bidang Ekonomi**, Penataran, Fakultas Hukum UNPAR.
- , 1993, **Dimensi Kebijakan Kriminal Di Dalam Masyarakat**, Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi, UNDIP.
- Djojohadikusumo, Soemitro, 1989, **Indonesia Dalam Perkembangan Dunia**, Jakarta, LP3ES.
- Djumhana, Muhamad & Djubaedilah, 1993, **Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori Dan Prakteknya di Indonesia**, Jakarta, Citra Aditya Bakti.

- Faisal, Sanapiah, 1990, **Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi**, Cet. I, Malang, Yayasan Asih Asah Asuh.
- Gautama, Sudargo, 1994, **Hak Milik Intelektual Dan Perjanjian Internasional: TRIPs, GATT, Putaran Uruguay (1994)**, Jakarta, Citra Aditya Bakti.
- Hadi, Sutrisno, 1981, **Metode Research**, Jilid III, Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Hamzah, Andi, 1994, **Efektifitas Hukum Pidana Positif Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi**, Penataran Tindak Pidana Ekonomi. Penataran, Fakultas Hukum UNPAR.
- Hartono, Sunaryati, 1988, **Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia**, Bandung, Binacipta.
- , 1985, **Kemungkinan Penerapan Sanksi Pidana terhadap Praktek-praktek Bisnis Internasional**, Kertas Kerja Seminar “ Aspek-aspek Pidana Dalam Kegiatan dunia Usaha, Jakarta.
- Heinz Koesters, Paul, 1987, **Tokoh-tokoh Ekonomi Mengubah Dunia**, Jakarta, Gramedia.
- Jussawalla, Meheroo, 1992, **The Economics of the Intellectual Property in a world Without Frontiers**, Greenwood Press, London.
- Kansil, Nico, **Perlindungan Hukum Dalam Bidang Hak Milik Intelektual**, Makalah Diskusi Tentang Merek, Medan.
- Keraf, A. Sonny, 1993, **Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur**, Jakarta, Kanisius.
- Kesowo, Bambang, 1994, **Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Di Indonesia**, Kerjasama Fakultas Hukum UNDIP dengan Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- , 1991, **Perlindungan Hukum Serta Langkah-langkah Pembinaan oleh Pemerintah Dalam Bidang Hak Milik Intelektual**, Majalah Yuridika, UNAIR, No. 1 tahun VI.
- Khor Kok Peng, Martin, 1993, **Imperialisme Ekonomi baru**, Jakarta, Gramedia.

- Long, Oliver, 1987, **Law and Its Limitations in The GATT Multilateral Trade System**, Martinus Nijhoff Publishers.
- Lubis, Mulya T, 1986, **Peranan Hukum Dalam Perekonomian Di Negara Berkembang**, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- , 1992, **Hukum Dan Ekonomi**, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Marpaung, Leden, 1995, **Tindak Pidana terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Jakarta, Sinar Grafika.
- Meliala, Adrianus, 1993, **Praktik Bisnis Curang**, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Miller, Arthur R & Michael H. Davis, 1995, **Intellectual Property, Patents, Trademarks, And Copyright**, Second Edison, West Publishing.
- Moleong, Lexy J, 1994, **Metode Penelitian Kualitatif**, Cet. V, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.
- Muladi , 1990, **Politik Kriminil Dalam Rangka Penanggulangan Tindak pidana Perbankan Dalam Kerangka Tindak Pidana Ekonomi**, Makalah seminar Tindak Pidana Di Bidang Perbankan, Semarang.
- , 1993, **Kerjasama Internasional Dalam Pencegahan Kejahatan Dan Peradilan Pidana**, Penataran Nasional, UNDIP.
- , 1994, **Korban Kejahatan Korporasi**, Penataran Fakultas Hukum UNPAR.
- , 1994, **Konsep Indonesia Tentang Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi**, Fakultas Hukum UNPAR.
- , 1995, **Pola Kejahatan, Modus Operandi, Pelaku Kejahatan Terorganisir Di Indonesia Dan Antar Negara**, Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi, Semarang.
- , 1995, **Kemungkinan Kriminalisasi Money Laundering Di Indonesia**, Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi, Semarang.
- , 1993, **Kerjasama Internasional Dalam Pencegahan Kejahatan Dan Peradilan Pidana**, Penataran Nasional, Fakultas Hukum UNDIP.
- , 1991, **Kejahatan Di Lingkungan Profesional**, Seminar Kriminologi VI.
- , 1995, **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana**, UNDIP, Semarang.

- & Barda Nawawi A, 1992, **Teori-teori Dan Kebijakan Pidana**, Bandung, Alumni.
- Nainggolan, Paian, 1993, **Pengaruh Hak Milik Intelektual Terhadap Ekspor Produk-Produk Industri Nasional**, Makalah seminar Pengaruh Hak Milik intelektual terhadap Industri Dan perdagangan Internasional.
- Nasution, A. Karim, 1982. **Kriminalitas Dan pembangunan**, Prisma, No. 5
- Prasetyo, Rudi, 1989, **Perkembangan Korpporasi Dalam Proses Modernisasi Dan Penyimpangan-penyimpangannya**, Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH UNDIP.
- Reksodiputro, Mardjono, 1989, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi**, Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, UNDIP.
- , 1995, **Pembaharuan Hukum Pidana**, Universitas Indonesia, Jakarta.
- , 1994, **Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana**, Lembaga Kriminologi UI.
- , 1994, **Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan**, Lembaga kriminologi UI.
- Sahetapy, 1994, **Kejahatan Korporasi**, Bandng, Eresco.
- Saidin, 1995, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Saleh, Ismail, 1990, **Hukum Dan ekonomi**, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Saleh ,Ruslan, 1971, **Mencari asas- asas Umum Yang sesuai Untuk hukum pidana Nasional**, Kumpulan Upgrading Hukum Pidana, jilid 2.
- , 1983, **Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana**, Jakarta, Aksara Baru.
- Schechter, Roger E., 1993, **Unfair Trade Practices And Intelectual Property**, West Publishing.
- Sudarto, 1981, **Hukum Dan Hukum Pidana**, Bandung, Alumni.
- , 1981, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Bandung, Alumni.
- , 1983, **Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat**, Bandung, Sinar Baru.

- Suryomucito, Agus, 1990, **Gunawan, Sengketa Merek Dalam Angka dan fakta,**
Makalah Seminar Pemahaman Dan Kesadaran Bidang Hukum
Merek Dalam Praktek, BPHN, Jakarta
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, **Metodologi Penelitian Hukum Dan Yurimetri,** Ghalia
Indonesia.
- Sumardi, Juajir, 1995, **Aspek-Aspek Hukum Franchise Dan Perusahaan**
Transnasional, Bandung, Citra Aditya.
- Susanto, IS., 1995, **Kejahatan Korporasi,** UNDIP, Semarang.
- , 1989, **Kejahatan Korporasi,** Seminar Nasional, UNDIP, Semarang.
- , 1993, **Kejahatan Korporasi,** Penataran Nasional Hukum Pidana Dan
Krimonologi, Semarang.
- , 1995, **Tinjauan Kriminologis Terhadap kejahatan Ekonomi,** Penataran
Hukum Pidana Dan Kriminologi, Semarang.
- , 1993, **Kajian Kriminologis terhadap Hak Milik intelektual,** Seminar
Nasional, Pascasarjana UNDIP.
- , 1994, **Antisipasi Perkembangan kejahatan Di Bidang Ekonomi,**
Fakultas Hukum UNPAR.
- Tjiptoherijanto, Prijono, 1983, **Ekonomi Indonesia Hubungan Dan Ketergantungan,**
Jakarta, Ghalia.
- Widayadi, Didi, 1995, **Trend Bisnis Curang Di Indonesia,** UNDIP, Semarang.
- Majalah-Majalah :**
- Hukum Dan Pembangunan, No. 2 tahun 1996.
- Prisma, Mei, 1982 No. 5 LP3ES.
- Varia Peradilan VIII No. 92 Mei 1993.
- Tempo, 18 April 1992.
- Koran :**
- Kompas, 13 Februari 1995, 10 februari 1995, 20 Februari 1997, 26 Februari 1997, 15
Maret 1995, 26 April 1995, 27 April 1995, 5 Oktober 1996, 2 februari 1997, 6 Februari
1997, 7 Februari 1997, 17 Maret 1997,
- Suara Pembaharuan, 29 juni 1991